

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PERANAN DINAS BINA MARGA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH UTARA



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

TEUKU FAISAL

NIM. 501473441

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2017**

ABSTRAK

PERANAN DINAS BINA MARGA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH UTARA

Teuku Faisal

NIIM.501473441

fteukufaisal@yahoo.co.id

**Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka**

Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dalam menjalankan perannya sebagai pendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara, terdapat beberapa kendala dalam menunjang kinerja Dinas Bina Marga tersebut. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan dan menganalisis tentang berbagai faktor interen maupun eksteren yang mempengaruhi peran Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peran Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara; 2) Apa kendala Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara; 3) Bagaimana strategi atau kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Bina Marga dalam usaha meningkatkan peranannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Utara. Hipotesis yang diajukan adalah terjadi dampak yang signifikan antara Peran Dinas Bina Marga dengan pembangunan sarana dan prasana serta tingkat pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara. Bentuk metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dengan alat bantu komputasi SPSS versi 20,0 for Windows menunjukkan baik secara parsial maupun simultan bahwa dimensi anggaran dan SDM yang terdapat dalam pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh secara signifikan terhadap dimensi yang terdapat dalam peran Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara sebesar 72,60%, sedangkan sisanya sebesar 27,4% dipengaruhi faktor lain seperti pengaruh lingkungan, perencanaan, pengawasan, dan strategi kepimpinan. Dan secara kualitatif, menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga berperan dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Utara yang sangat mempengaruhi tingkat pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga adalah anggaran dan peralatan yang kurang memadai, SDM serta konsep perencanaan pembangunan belum maksimal dalam mendukung kinerja Dinas Bina Marga. Selanjutnya, oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, membuat strategi dan beberapa kebijakan sebagai antisipasi dalam menghadapi berbagai masalah baik secara interen maupun eksteren.

Kata kunci : Pembangunan, Pelayanan Publik dan Peran Dinas Bina Marga.

ABSTRACT

THE ROLE OF DEPARTMENT OF DUTIES OF MARGA IN SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF FACILITIES AND INFRASTRUCTURE TO INCREASE PUBLIC SERVICES IN NORTH ACEH DISTRICT

Teuku Faisal

NIIM.501473441

Fteukufaisal@yahoo.co.id

Graduate Studies Program

Long Distance University

Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara in performing its role as supporting the development of facilities and infrastructure to improve public services in North Aceh Regency, there are several obstacles in supporting the performance of Bina Marga Office. Through this research, the researcher wanted to reveal and analyze the various internal and external factors that influenced the role of North Aceh Bina Marga Office in supporting the development of facilities and infrastructure to improve public services in North Aceh District. The problems in this research are: 1) how the role of DGH in supporting the development of facilities and infrastructure to improve public services in North Aceh District; 2) What are the constraints of Dinas Bina Marga in supporting the development of facilities and infrastructure to improve public services in North Aceh District; 3) How is the strategy or policy adopted by Dinas Bina Marga in an effort to increase its role to support the development of facilities and infrastructure in North Aceh Regency. The hypothesis proposed is a significant impact between the Role of DGH and the development of facilities and infrastructure and the level of public service of North Aceh Regency. The research method used is quantitative and qualitative. Quantitatively with SPSS computational tools version 20.0 for Windows shows both partially and simultaneously that the dimensions of the budget and human resources contained in the development of facilities and infrastructure significantly influence the dimensions contained in the role of the Department of Highways District of North Aceh of 72.60 %, While the remaining 27.4% influenced by other factors such as environmental influences, planning, supervision, and leadership strategy. And qualitatively, it shows that Dinas Bina Marga plays a role in building and maintaining the road network in North Aceh Regency which greatly influences the level of public service in North Aceh District. Constraints faced by the Office of Highways are inadequate budget and equipment, human resources and the concept of development planning has not been maximized in supporting the performance of DGH. Furthermore, by the Bina Marga Office of Kabupaten Aceh Utara, the strategy and some policies are anticipated in facing various problems both internally and externally.

Keywords: Development, Public Service and Role of DGH.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM

: Peranan Dinas Bina Marga Dalam Mendukung Pembangunan Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Utara

Nama

: Teuku Faisal

NIM

: 501473441

Program Studi

: Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Hari/Tanggal

: Sabtu/08 Oktober 2016

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.A.
NIP.

Pembimbing II

DR. Agus Santosa, M.M
NIP.

Ketua Bidang ISIP

Dr. Darmanto., M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M. Sc, Ph. D
NIP. 19520213 198503 2 001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, 15418
Telp 021. 74155050, Fak. 021. 7415588**

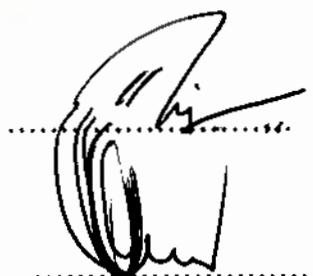
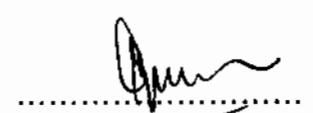
PENGESAHAN

Nama : Teuku Faisal
 NIM : 501473441
 Progam Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
 Judul Tesis : Peranan Dinas Bina Marga Dalam Mendukung Pembangunan Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Utara

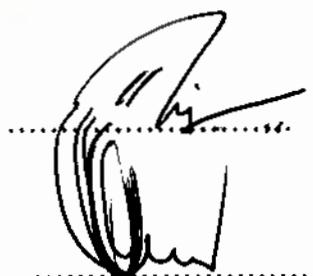
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :
 Hari/ tanggal : Sabtu/08 Oktober 2016
 Waktu : 18.00 Wib S/D Selesai
 dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

**1. Ketua Komisi Penguji
Drs. Enang Rusyana, M. Pd**

**2. Penguji Ahli
Prof. Dr. Ngadisah, MA**



**3. Penguji I/Pembimbing I
Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.A.**

**4. Penguji II/Pembimbing II
DR. Agus Santosa, M.M**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, 15418
Telp 021. 74155050, Fak. 021. 7415588**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **“Peranan Dinas Bina Marga Dalam Mendukung Pembangunan Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Utara”** adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, Juni 2016

Saya yang menyatakan,

Teuku Faisal

NIM. 501473441



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul **“Peranan Dinas Bina Marga Dalam Mendukung Pembangunan Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Utara”**.

Pemilihan Judul penelitian di atas, untuk membuktikan sejauh mana peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung berbagai sektor pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Disamping itu untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat kinerja dimensi peranan Dinas Bina Marga yaitu pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Utara. Sesuai dengan visi kelembagaan Dinas Bina Marga yaitu '*Terwujudnya Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan yang bermanfaat bagi Masyarakat*'.

Dalam Tugas Akhir Program Magister (TAPM)i, penulis memperoleh bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan dukungan serta bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.

2. Bapak DR.Agus Santoso, M.M selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan dukungan serta bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.
3. Bapak Drs. Enang Rusyanam, M.Pd selaku Kepala UPBJJ Banda Aceh Universitas Terbuka, atas kebijaksanaan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.
4. Ibu Drs. Hj. Mariana G, M.Pd selaku Penanggung Jawab Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh.
5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan ilmu pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tepat pada waktunya.

Pada akhirnya penulis berharap semoga penulisan studi mandiri ini dapat bermanfaat dengan baik bagi penulis sendiri maupun bagi para peneliti lanjutan yang memerlukan sebagai literatur atau bahan referensi.

Lhokseumawe, Oktober 2016

Penulis,

RIWAYAT HIDUP

Nama : Teuku Faisal
NIM : 501473441
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Bayu / 23 Juli 1976

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Blangrimueng Kec.Syamtalira Bayu
Pada Tahun 1989
Lulus SI di Universitas Malikussaleh pada tahun 2013

Riwayat Pekerjaan : Tahun 1997 s/d 1998 Sebagai Perencana
di Optima Consultant
Tahun 1998 s/d 2001 Sebagai Tenaga Sukarela
di Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.
Tahun 2001 s/d 2007 Sebagai Honorer
di Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2007 s/d Sekarang Sebagai Pegawai Negeri
Sipil/Kasi Penyusunan Program di Dinas Bina Marga
Kabupaten Aceh Utara

Lhokseumawe , Oktober 2016

Teuku Faisal
NIM. 501473441

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Bagan	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Kajian Teori.....	12
1. Teori Pembangunan.....	12
a. Teori Mordenisasi	12
b. Teori Dependensi.....	13
c. Teori Sistem Dunia	16
2. Pelayanan Publik	19
a. Pengertian Pelayanan Publik	19
b. Asas-asas Pelayanan Publik	20
c. Prinsip Pelayanan Publik	21
d. Jenis Pelayanan Publik	23
e. Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik.....	24

3. Anggaran	26
a. Pengertian Anggaran.....	26
b. Fungsi Anggaran	27
4. Sumber Daya Manusia (SDM)	30
a. Pengertianan Sumber Daya Manusia (SDM).	30
b. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	32
c. Sumber Daya Manusia Dinas Bina Marga Kab.Aceh Utara	37
5. Peranan Dina Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.....	42
a. Peranan	42
b. Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara	43
B. Penelitian Terdahulu	53
C. Kerangka Berpikir	61
1. Kerangka Penelitian	61
2. Kerangka Analisa	63
D. Operasional Variabel.....	64
1. Operasional Konsep	64
2. Hipotesis.....	66
BAB III METODELOGI PENELITIAN	67
A. Desaign Penelitian.....	67
B. Populasi Dan Sampel	68
C. Instrumen Penelitian.....	69
1. Pengertian Instrumen.....	69
2. Jenis-jenis Instrumen Penelitian.....	70
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	71
1. Teknik Pengumpulan Data.....	71
2. Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner	72
E. Metode Analisis Data	74
F. Jadwal Dan Waktu Penelitian	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	76
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	76
B. Hasil Penelitian	96
C. Pembahasan	122

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
DAFTAR BAGAN	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan kemajuan serta perkembangan peran dan fungsi pemerintahan dibidang pembangunan dan pelayanan publik maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing (Sumber : Media Unpad Tahun 2014) . Dalam penelitian Samo Drobne Dan Marija Bogataj, Tahun 2015, tentang “Setting public service obligations in low-demand air transportation networks: Application to the Azores (Alokasi optimal dari Pusat Pelayanan Publik di Tempat Tengah Daerah Fungsional)” mendapatkan suatu kesimpulan bahwa metode untuk cakupan yang optimal dari wilayah negara dengan wilayah fungsional, di mana kota pintar adalah pusat kegiatan, dan alokasi optimal dari layanan mempengaruhi pertumbuhan kota.

Pelayanan publik merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau publik tanpa membedakan golongan tertentu dan diberikan secara sukarela atau dengan biaya tertentu sehingga kelompok yang paling tidak mampu sekalipun dapat menjangkaunya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya tidak berorientasi profit yaitu pelayanan yang dilakukan sebenarnya untuk kepuasan daripada masyarakat sebagai pelanggan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Menurut penelitian Erick F. Oechler Solana ,2014, tentang Public private not-for-profit partnerships: delivering public services to developing countries (Publik swasta tidak-untuk-

keuntungan kemitraan: memberikan pelayanan publik untuk negara-negara berkembang), dengan metode pendekatan analisis deskriptif dan analisis faktor. Akhir penelitian, dengan kesimpulan bahwa : menetapkan kerangka kerja yang membuat Kerjasama Pemerintah Swasta (PPP) lebih mudah diakses oleh negara-negara berkembang. Sebuah kemitraan antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk mengalokasikan risiko kepada orang yang mampu untuk menghindari atau mengurangi mereka dan tanggung jawab yang paling mampu untuk memiliki pelayanan yang berkelanjutan kepada penerima manfaat dengan cara finansial suara.

Selanjutnya, menurut UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Sumber : Christy Marintan Sitorus, 2013). Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Ni Luh Putu Puspitasari Tahun 2015 tentang “Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bandung” dengan menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif dan analisis faktor*, mendapatkan suatu kesimpulan bahwa dari lima belas variable terbagi menjadi tiga faktor (Analisis Deskriptif). Dan pengelompokannya adalah sebagai berikut :

1) Faktor kesediaan

Meliputi variabel kesediaan petugas, kelancaran komunikasi, pemberian solusi,kepastian jadwal, kejelasan Informasi, dan kecepatan proses, dengan

nilai *eigensebesar* 6,36 yang mampu menjelaskan indikator sebesar 42,37 persen.

2) Faktor kemampuan

Meliputi variabel keramahan petugas, kemampuan petugas, dan tanggung jawab petugas,dengan nilai *eigen* sebesar 1,75 yang mampu menjelaskan indikator sebesar 11,65 persen.

3) Faktor perhatian

Meliputi variabel Penataan Ruangan, Penampilan Petugas,Sarana Prasarana, Perhatian petugas, Keadilan perlakuan, dan keamanan dan kenyamanan,dengan nilai *eigen* sebesar 1,12 yang mampu menjelaskan indikator sebesar 7,49 persen.

Dan berdasarkan hasil analisis faktor, variabel kesediaan petugas adalah variabel yang paling mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam pengurusan ijin usaha pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Badung karena memiliki nilai koefisien (*loadingfactor*) tertinggi yaitu sebesar 0,80. Ini berarti kesediaan aparat pemberi layanan dalam membantu masyarakat pencari ijin khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat diperlukan dalam membentuk kualitas pelayanan publik yang baik, sehingga semakin banyak usaha yang ada, dan kesadarannya untuk melegalkan usahanya dengan melengkapi persyaratan perijinan yang berarti semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dari penerimaan pajak tersebut secara langsung akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.

Menelaah tentang Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, sebagai salah satu dinas teknis dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang bertanggung

jawab terhadap upaya peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan milik kabupaten dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Utara. Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara secara eksplisit memuat tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Sesuai Qanun tersebut, Dinas Bina Marga bertugas melaksanakan pembangunan di bidang jalan, jembatan, pemeliharaan, peralatan dan perbekalan bidang kebinamargaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Lebih lanjut, Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang kebinamargaan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- 2) Melaksanakan pelayanan umum, ketatausahaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian data, penyusunan rencana dan program Dinas;
- 3) Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang yang berhubungan dengan infrastruktur bidang bina marga;
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang bina marga;
- 5) Melaksanakan, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi bidang pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 6) Melaksanakan menginventarisasi, mengevaluasi, meneliti pelaksanaan rencana program/proyek pembangunan;

- 7) Membina unit pelaksana teknis Dinas; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.(Sumber:Renstra Dinas Bina Marga 2012-2017)

Melihat dari uraian tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, memiliki peranan besar dalam menunjang maupun mendukung pembangunan dan pelayanan publik (public service) dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Karena dengan ketersediaan jaringan jalan yang berkualitas merupakan prasyarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini karena penyediaan jaringan jalan ke wilayah perdesaan akan mempunyai pengaruh positif terhadap kondisi sosial-ekonomi wilayah perdesaan (Donnges. 2007, Heng, 2007, Lombard. ---, Oraboune. 2008, Wasike. 2001). Dengan adanya jaringan jalan yang memadai maka aksesibilitas wilayah akan meningkat sehingga proses pengembangan ekonomi lokal dan penyediaan beragam infrastruktur pendukung lainnya akan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan perspektif ekonomi, jaringan jalan perdesaan dan antar kecamatan maupun antar pusat kegiatan yang memadai akan memungkinkan terjadinya transaksi ekonomi dengan lebih intensif, hal ini terjadi karena biaya yang dibutuhkan untuk proses transportasi untuk memasarkan komoditas pertanian yang diproduksi oleh kawasan perdesaan menjadi lebih murah dan waktu yang dibutuhkan juga menjadi lebih singkat (Wasike. 2001, Brown. 1990, Donnges . 2007, Rustiadi. 2009). Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara memperoleh kesempatan untuk mengakumulasi modal yang bermanfaat untuk meningkatkan skala ekonomi

kawasan Aceh Utara. Lebih lanjut, aksesibilitas wilayah kabupaten Aceh Utara yang memadai juga akan memicu peningkatan nilai lahan sehingga mendorong pemanfaatan lahan secara lebih intensif. Sementara itu, berdasarkan perspektif sosial, ketersediaan jaringan jalan perdesaan yang memadai akan memberikan banyak keuntungan sosial (Heng. 2007). Sebagai contoh, proses interaksi antar kelompok masyarakat akan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dalam penelitian Khatmi & Mutia, Tahun 2012, tentang Pengaruh Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gayo Lues, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas pembangunan jalan dan jembatan. Secara parsial yaitu: pelayanan publik berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas pembangunan jalan dan jembatan. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas pembangunan jalan dan jembatan. Efektivitas jalan dan jembatan mempengaruhi pengembangan wilayah disebabkan adanya akses masyarakat dalam perdagangan, pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, Dalam konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan selfsupporting-nya organisasi daerah, instansi Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Aceh Utara. Infrastruktur yang baik dan lengkap, akan memperlancar perekonomian di daerah. begitu juga sebaliknya, jeleknya infrastruktur akan menghambat perekonomian sehingga pembangunan didaerah menjadi lambat dan tidak berkembang. Menurut

Gant (Nasution,2008: 42), tujuan pembangunan ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan- kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Asri Dwi Asmarani,Tahun 2010, dalam penelitiannya tentang Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten : Pendekatan Analisis SWOT dan AHP, melalui pendekatan analisis SWOT dan AHP dengan menggunakan 2 instrumen kuisioner yaitu kuisioner SWOT dan kuisioner AHP, menyimpulkan bahwa sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro.

Pada saat ini, beban kerja bidang infrastruktur jalan pada Dinas Bina Marga kabupaten Aceh Utara adalah sepanjang 2.032,8 KM (T.1 hal. 133), yang merupakan jalan yang menghubungkan antar kecamatan , antar pusat kegiatan, pariwisata dengan kawasan perdesaan termasuk dalam sistem jaringan jalan kabupaten kabupaten Aceh Utara.(Sumber : Data Base Bina Marga Tahun 2014)

Dengan melihat beban kerja Dinas Bina Marga yang memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penguat dalam mendukung terhadap peranan Dinas Bina Marga tersebut. Adapun faktor utama tersebut adalah Dimensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mempengaruhi Dinas Bina Marga dalam menjalankan peran tersebut selain faktor lain-lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini seperti pengaruh lingkungan,perencanaan,pengawasan, dan strategi

kepimpinan. Selanjutnya Oleh Imam Ghozali , Tahun 2013, dalam penelitiannya berjudul tentang “Analisa Pengaruh partisipasi Anggaran Manajerial melalui Komitment Tujuan Anggaran Dan Job Relevant Information (JRI) sebagai Variabel Intervebing (Penelitian terhadap perusahaan Manufaktur di Indonesia)” berkesimpulan sebagai berikut :

- a) Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada tingkat signifikansi probabilitas di bawah 0,05 ($p=0,002$),
- b) Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap komitmen tujuan anggaran tetapi besarnya pengaruh tersebut tidak signifikan.
- c) Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap JRI pada tingkat signifikansi probabilitas di bawah 0,05 ($p=0,007$).
- d) Komitmen tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap JRI namun besarnya pengaruh tersebut tidak signifikan.
- e) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen tujuan anggaran terhadap kinerja manajerial pada tingkat signifikansi probabilitas di bawah 0,05 ($p=0,027$) dan (6) JRI berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial namun besarnya pengaruh tersebut tidak signifikan.

Sedangkan Untuk dimensi Sumber Daya Manusia (SDM), Dalam penelitian Hari Wicaksono, Tahun 2011, tentang Analisis Hubungan Kualitas SDM PNS Dan

Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun dengan menggunakan metode chi square, Didapat adanya hubungan kualitas SDM PNS dengan dimensi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan dengan kinerja Pemerintah. Hal ini ditunjukan dengan nilai chi square tabel. Dari sini disimpulkan bahwa adanya hubungan dari kualitas SDM PNS dengan kinerja Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Peranan Dinas Bina Marga Dalam Mendukung Pembangunan Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Utara”.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.
- 2) Apa kendala Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.
- 3) Bagaimana strategi atau kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Bina Marga dalam usaha meningkatkan perannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Utara.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.
- 2) Untuk mengetahui apa kendala Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan sarana dan prasana untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana strategi atau kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Bina Marga dalam usaha meningkatkan peranannya untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Utara.

D. Mamfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi mamfaat dan kegunaan bagi pihak yang terkait didalamnya, yaitu :

- 1) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu teori pembangunan dan Pelayanan publik, baik bagi penulis sendiri ataupun penulis lain yang tertarik dalam bidang ini.
- 2) Secara Praktis, sebagai masukan ataupun sumbangsih pemikiran untuk Dinas Bina Marga dan Dinas atau Badan yang terkait lainnya, dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program/kegiatan yang lebih efisien dan efektif dimasa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Pembangunan

Menurut Gant (Nasution,2008: 42), tujuan pembangunan ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan - kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Teori Pembangunan, terbagi atas 3 teori, antara lain teori modernisasi, dependensi dan teori dunia. Dengan ulasan sebagai berikut :

a. Teori Modernisasi

Perspektif teori Modernisasi klasik menyoroti bahwa negara Dunia Ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya. Sementara negara-negara Barat dilihat sebagai negara modern. aliran modernisasi memiliki ciri-ciri dasar antara lain: "Sumber perubahan adalah dari dalam atau dari budaya masyarakat itu sendiri (internal resources) bukan ditentukan unsur luar". Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi. Dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Modernisasi merupakan proses sistematis. Modernisasi melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi dsb. Ciri-ciri pokok teori modernisasi :

- 1) Modernisasi merupakan proses bertahap.
- 2) Modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi.
- 3) Modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya, sebagai proses Eropaanisasi dan Amerikanisasi, atau modernisasi sama dengan Barat.
- 4) Modernisasi juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur.
- 5) Modernisasi merupakan perubahan progresif
- 6) Modernisasi memerlukan waktu panjang. Modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner, dan bukan perubahan revolusioner.

Tokoh-tokoh teori modernisasi:

1) Harrod-Domar

Berpendapat bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Prinsip dasar : kekurangan modal, tabungan dan investasi menjadi masalah utama pembangunan.

2) Walt .W. Rostow

Teori Pertumbuhan Tahapan Linear (*linear-stages-of growth-models*) proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Masyarakat Tradisional è masyarakat pertanian. Ilmu pengetahuan masih belum banyak dikuasai.
- b) Prakondisi untuk Lepas Landas è masyarakat tradisional terus bergerak walaupun sangat lambat dan pada suatu titik akan mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas.. contoh adanya campur tangan

u/ meningkatkan tabungan masyarakat terjadi, dimana tabungan tsb dimanfaatkan u/sektor2 produktif yang menguntungkan.

Misal Pendidikan

- c) Lepas Landas è ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5%-10 %.
- d) Bergerak ke Kedewasaan è teknologi diadopsi secara meluas.
- e) Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi è Pada tahap ini pembangunan sudah berkesinambungan

3) David McClelland

Teori: need for Achievement (n-Ach). kebutuhan atau dorongan berprestasi, dimana mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia wiraswasta dengan n.ach yang tinggi. Cara pembentukannya melalui pendidikan individu ketika seseorang masih kanak-kanak di lingkungan keluarga.

4) Bert F. Hoselitz

Membahas faktor-faktor non ekonomi yg ditinggalkan Rostow yang disebut faktor “kondisi lingkungan”. Kondisi lingkungan maksudnya adalah perubahan-perubahan pengaturan kelembagaan yang terjadi dalam bidang hukum, pendidikan, keluarga, dan motivasi.

5) Alex Inkeles & David H. Smith

Ciri-ciri manusia modern:

- a) Keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru
- b) Berorientasi ke masa sekarang dan masa depan

- c) Punya kesanggupan merencanakan
- d) Percaya bahwa manusia bisa menguasai alam

Bila dalam teori Modernisasi Klasik, tradisi dianggap sebagai penghalang pembangunan, dalam teori Modernisasi Baru, tradisi dipandang sebagai faktor positif pembangunan. Teori Modernisasi, klasik maupun baru, melihat permasalahan pembangunan lebih banyak dari sudut kepentingan Amerika Serikat dan negara maju lainnya.

b. Teori Dependensi

Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori ini mencermati hubungan dan keterkaitan negara Dunia Ketiga dengan negara sentral di Barat sebagai hubungan yang tak berimbang dan karenanya hanya menghasilkan akibat yang akan merugikan Dunia Ketiga. Negara sentral di Barat selalu dan akan menindas negara Dunia Ketiga dengan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara sentral.

Teori ini berpangkal pada filsafat materialisme yang dikembangkan Karl Marx. Salah satu kelompok teori yang tergolong teori struktural ini adalah teori ketergantungan yang lahir dari 2 induk, yakni seorang ahli pemikiran liberal Raul Prebisch dan seorang pemikir marxis yang merevisi pandangan marxis tentang cara produksi Asia yaitu, Paul Baran.

- 1) Raul Prebisch : industri substitusi import. Menurutnya negara-negara terbelakang harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi impor.
- 2) Paul Baran: sentuhan yang mematikan dan kretinisme. Baginya perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran beda dengan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara pinggiran, system kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme yang membuat orang tetap kerdil.

Ada 2 tokoh yang membahas dan menjabarkan pemikirannya sebagai kelanjutan dari tokoh-tokoh di atas, yakni:

- 1) Andre Guner Frank : pembangunan keterbelakangan. Bagi Frank keterbelakangan hanya dapat diatasi dengan revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis.
- 2) Theotonio De Santos : Membantah Frank. Menurutnya ada 3 bentuk ketergantungan,yakni: 1. Ketergantungan Kolonial: hubungan antar penjajah dan penduduk setempat bersifateksploratif; 2. etergantungan Finansial- Industri: pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan financial-industri. 3. Ketergantungan Teknologis- Industrial: penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industri.

c. Teori Sistem Dunia

Teori sistem dunia yang dikemukakan oleh **Immanuel Wallerstein**. Hal ini dikarenakan bahwa dalam suatu sistem sosial perlu dilihat bagian-bagian secara menyeluruh dan keberadaan negara-negara dalam dunia internasional tidak boleh

dikaji secara tersendiri karena ia bukan satu sistem yang tertutup. Teori ini berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia. Wallerstein menyatakan sistem dunia modern adalah system ekonomi kapitalis. Menurut Wallerstein, sistem dunia kapitalis dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu :1).Negara *core* atau pusat, è mengambil keuntungan yang paling banyak, karena kelompok ini dapat memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu; 2).Semi-periferi atau setengah pinggiran è mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksplotir; 3). Negara periferi atau pinggiran.

Menurut Wallerstein negara-negara dapat “naik atau turun kelas,” misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran, dan sebaliknya. Naik dan turun kelasnya negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Selanjutnya Wallerstein merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu:

- 1) Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Sebagai misal negara pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri oleh karena mahal sedangkan komiditi primer mereka murah sekali, maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor. Dengan ini ada kemungkinan negara dapat naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran.
- 2) Kenaikan kelas terjadi melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan - perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar dan kemudian lahir apa yang disebut dengan MNC. Akibat dari perkembangan ini, maka munculah industri-industri di negara-negara

pinggiran yang diundang oleh perusahaan-perusahaan MNC untuk bekerjasama. Melalui proses ini maka posisi negara pinggiran dapat meningkat menjadi setengah pinggiran.

- 3) Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Misalnya apa dilakukan oleh Peru dan Chile yang dengan berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Namun demikian, semuanya ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Jika tidak, mungkin dapat saja gagal.
- 4) Perbandingan antara Teori Dependensi dan Teori Sistem Dunia

Tabel 2.1

Tabel Perbandingan Teori Dependensi Dan Teori Sistem Dunia

Elemen	Teori Dependensi	Teori Sistem Dunia
Perbandingan		
Unit Analisis	Negara-Bangsa	Sistem dunia
Metode Kajian	Historis structural	Dinamika sejarah dunia
Struktur Teori	Dua kutub (sentral-pinggiran)	Tiga kutub (sentral-semi pinggiran-pinggiran)
Arah Pembangunan	Deterministik	Peluang terjadinya mobilitas
Arena Kajian	Negara pinggiran	Negara pinggiran, negara semi pinggiran dan sistem ekonomi dunia

2. Pelayanan Publik

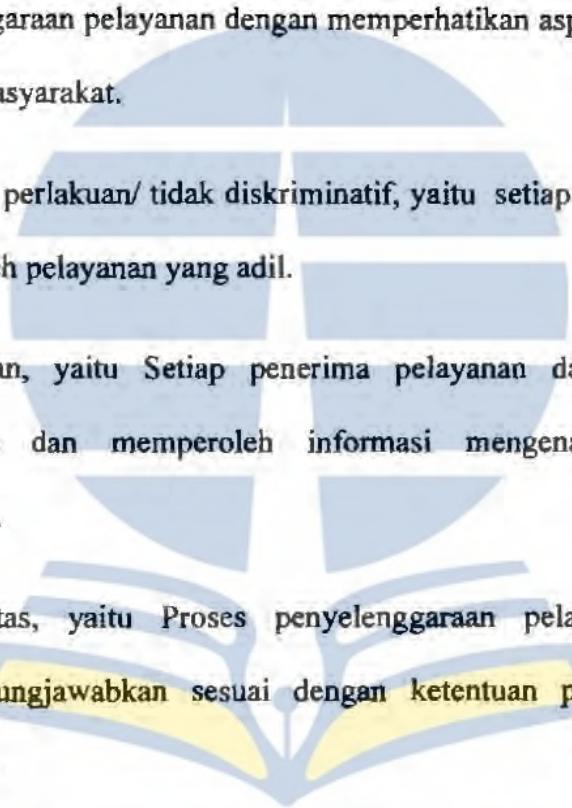
a. Pengertian Pelayanan Publik

Defenisi Pelayanan Publik Menurut UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Wasistiono (Saleh, 2010: 24), pelayanan publik adalah sebagai pemberian jasa yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan, pemerintah, swasta) kepada publiknya dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Pamudji (Napitupulu, 2007: 165), konsep pelayan publik diturunkan dari makna public service yang berarti: “berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa”.

b. Asas- Asas Pelayanan Publik

Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Adapun asas-asas pelayanan publik adalah:

- 1) Kepentingan umum, yaitu; pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- 2) Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- 3) Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

- 
- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
 - 5) Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
 - 6) Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
 - 7) Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
 - 8) Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
 - 9) Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
 - 11) Ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

- 12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

c. Prinsip Pelayanan Publik

Menurut Ridwan (2010: 101), Prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- 1) Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan
- 2) Kejelasan, memuat tentang ; a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
- 3) Kepastian waktu, di mana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
- 4) Akurasi, di mana produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- 5) Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
- 6) Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik

- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika)
- 8) Kemudahan akses, di mana tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika
- 9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, di mana pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas
- 10) Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain- lain.

d. Jenis Pelayanan Publik

Menurut Undang- Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik dikelompokkan dalam beberapa jenis yang didasarkan pada ciri-ciri dan sifat-sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan. Jenis-Jenis pelayanan itu sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin- izin,

rekomendasi, keterangan tertulis, pembayaran pajak, dan lain-lainnya. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, akta kelahiran/kematian).

- 2) Pelayanan Barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung sebagai unit atau sebagai individual dalam satu system. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya. Contoh pelayanan ini adalah pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon
- 3) Pelayanan Jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu system pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat, laut, dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadaman kebakaran. Pelayanan publik sebagaimana disebutkan tadi diberikan kepada masyarakat manakala memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan itu biasanya berbentuk dokumen-dokumen, formulir-formulir, biaya. Pelayanan publik di Indonesia sebagian besar dilakukan melalui mekanisme tatap muka langsung. Operasionalisasi

pelayanan publik pada umumnya dilaksanakan oleh jajaran birokrasi paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jumlah jajaran unit pelayanan ini dipastikan cukup banyak dan tersebar di berbagai lokasi. Dalam hal ini standarisasi pelayanan menjadi aspek penting agar pelayanan di satu tempat dengan tempat layanan lainnya tidak terlalu berbeda.

e. Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik

Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban :

- 1) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
- 2) Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan
- 3) Menempatkan pelaksana yang kompeten
- 4) Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai
- 5) Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
- 6) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan
- 7) Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
- 8) Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
- 9) Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya
- 10) Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik

- 11) Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan
- 12) Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Menurut Warsito, Tahun 2005, Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis; yang meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter, dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Sedangkan Mardiasmo (2002:61) menyatakan bahwa “anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, “anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”. Widjaja (1995:1) menyebutkan anggaran adalah : “ungkapan keuangan dari program kerja untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan”. Penulis lain mendefinisikan, “anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja dalam suatu periode dan sumber pendapatannya” (Bahtiar, 2002:14). Penganggaran (budgeting) merupakan

aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Penganggaran merupakan aktivitas yang terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran (*budget cycle*). Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses secara simultan. Ketika anggaran masih dilaksanakan dan belum dibuat pelaporan, proses perencanaan dan penyusunan telah dimulai. Disinilah terjadi kesulitan untuk memanfaatkan pelaporan dan hasil pemeriksaan untuk dipakai sebagai masukan dalam proses penyusunan anggaran.

b. Fungsi Anggaran

Menurut Bastian (2005:164), anggaran berfungsi sebagai berikut :

- 1) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja,
- 2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang,
- 3) Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan,
- 4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja,
- 5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi,
- 6) Anggaran merupakan instrumen politik,
- 7) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik menurut Nordiawan (2006:48) antara lain sebagai berikut :

1) Anggaran sebagai alat perencana

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat.

2) Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

3) Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.

4) Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang dilakukan oleh bagian / unit kerja lainnya.

6) Anggaran sebagai alat penilai kerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu aktifitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7) Anggaran sebagai alat komunikasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motifasi yang baik jika memenuhi “menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai”. Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya tidak terlalu tinggi jangan terlalu rendah.

Terhadap peran Dinas Bina Marga yang mempunyai 2 (dua) dimensi utama pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, anggaran sangat mempengaruhi terhadap target kinerja Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Karena secara umum, kondisi fisik jaringan jalan pada kawasan perdesaan di banyak negara berkembang relatif masih belum memadai (Donnges. 2007, Heng. 2007, Oraboune. 2008, Wasike. 2001). Sebagian besar jaringan tersebut adalah jalan tanah yang sulit untuk dilalui pada musim penghujan, serta tidak dipelihara secara teratur akibat terbatasnya kapasitas perencanaan dan terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia (Donnges. 2007, Leyland. ----). Konsekuensinya, sebagian kawasan perdesaan relatif terisolasi dan tidak dapat diakses dengan mudah. Kondisi ini kemudian menyebabkan terhambatnya upaya pengembangan ekonomi perdesaan karena tingkat aksesibilitas wilayah yang rendah menyebabkan komoditas pertanian yang merupakan produk utama kawasan perdesaan menjadi tidak kompetitif untuk dipasarkan serta menyebabkan upaya penyediaan infrastruktur dasar lainnya menjadi terhambat.

Proses pembangunan jalan perdesaan di Indonesia terutama berkaitan dengan mekanisme permintaan dan penawaran. Pada satu sisi, sebagian besar penduduk tinggal di kawasan perdesaan dengan kondisi jaringan infrastruktur yang relatif

kurang memadai. Sementara pada sisi lain, kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran dalam peningkatan/memelihara jaringan jalan yang memadai juga sangat terbatas. Sehingga tingkat kerusakan jalan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan untuk meningkatkan/memelihara jaringan jalan yang ada (Wasike, 2001). Kondisi ini terjadi akibat jumlah anggaran yang dimiliki pemerintah sangat terbatas (Brown. 1990, Heng. 2007) dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran yang terbatas tersebut ke banyak sektor pembangunan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung tercapainya kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang baik, masalah yang tidak kurang pentingnya adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan. Ketersediaan anggaran yang memadai tidak akan memberikan dampak positif yang besar bagi penunjang pembangunan, bila kemampuan sumber daya manusia (SDM) pada instansi atau organisasi tersebut dalam memanfaatkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan masih sangat terbatas. Akibatnya, terjadi *bottlenecking* dalam suatu program/kegiatan. Oleh karena itu, permasalahan kapasitas organisasi dalam merekrut sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu titik krusial yang harus diidentifikasi dalam proses pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut Veithzal Rivai, sumber daya manusia sebagai salah satu unsur masukan (*input*) yang nantinya akan diubah menjadi keluaran (*output*) berupa barang atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai *input*, sumber daya

manusia tidak dapat menjadi unsur tunggal, melainkan harus dikombinasikan pula bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, metode dan juga teknologi. (Sumber : CiputraUceo.com). Disamping itu, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, begitu pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebenar-benarnya. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefenisikan sumber daya manusia. Menurut Susilo (2002:3) "sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya". "Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan", sebagaimana yang dikemukakan oleh David Ulrich (Mathis dan Jackson,2002:4). Maka dari itu, Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan (Tambunan,2003:15). "Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Sehingga bagian terpenting dari peningkatan nilai sumber daya manusia adalah dengan mendayagunakan semua bakat-bakat orang-orang yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi di luar organisasi. Disebabkan perubahan kependudukan tenaga kerja, manajemen sumber daya manusia harus memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang bervariasi. Ditambahkan, praktisi sumber daya manusia haruslah orang-orang yang meyakinkan semua tenaga kerja tanpa melihat latar belakang mereka,

menyediakan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitas mereka "sebagaimana dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2002:29). Begitu juga dengan pemerintahan, apabila di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan daerah tersebut berjaya. Bagi perekonomian negara, kejayaan suatu pemerintahan akan menjadikan perekonomian suatu negara lebih baik. Oleh karena itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis (Kuratko dan Hodgetts, 1998:87). (Sumber : M.Arif Irsan,Tahun 2010)

b. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen sumber daya manusia merupakan pengelolaan orang didalam organisasi secara optimal agar kinerja organisasi pun seperti yang diharapkan. Asumsi yang lahir dari manajemen sumber daya manusia adalah bahwa manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karsa. Semua potensi ini mempengaruhi upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Bagaimana bagusnya rumusan tujuan dan rencana organisasi, maka akan sia – sia jika unsur sumber daya manusia tidak dikelola secara profesional. Ada beberapa definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan manajemen sumber daya manusia. Menurut Stoner (2002:20) "Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang – orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya". Menurut Handoko (2000:47): Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu

maupun tujuan organisasi. Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya kesinambungan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Menurut Mathis dan Jackson (2002:4) "manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dilihat dari bakat seseorang untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi.

Dari pengertian – pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak yang optimal terhadap kinerja organisasi. Proses manajemen yang akan dibahas dalam hal ini, menekankan pada:

1) Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses dimana manajer menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat, dan pada saat yang tepat, yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas – tugas yang akan menolong organisasi tersebut mencapai sasaran secara keseluruhan secara efektif dan efisien. Dalam pengertian praktis, bahwa semua manajer harus memastikan bahwa semua pekerjaan dalam area tanggung jawab mereka selalu diisi dengan orang – orang yang berkemampuan yang dapat melakukannya secara tepat. Menurut Dessler (1997) mendefinisikan perencanaan pekerjaan sebagai proses memformulasi rencana – rencana untuk mengisi lowongan masa depan berdasarkan pada suatu analisis dari

posisi yang diharapkan yang dapat diisi oleh calon yang berasal dari dalam ataupun luar organisasi. Agar pemenuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja dapat tercapai, maka proses perencanaan harus diarahkan pada tujuan utama dari perencanaan itu sendiri. Ada tiga macam tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan SDM, yaitu : 1) menjamin adanya jumlah dan kualitas SDM sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, 2) dapat meningkatkan pendayagunaan SDM, dan 3) meningkatkan SDM dan memberikan kepuasan kerja.

2) Perekutan Sumber Daya Manusia

Penarikan (*recruitment*) SDM merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber – sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga yang diperlukan, proses seleksi, peneinpatan, dan orientasi tenaga kerja. Penarikan SDM bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang cukup agar manajer dapat memilih sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Agar hasil dari perekutan dapat dikatakan berhasil atau efektif, maka terdapat empat indikator untuk menunjukkan efektifitas dari perekutan SDM, yaitu : a) jumlah (kuantitas) pelamar mencukupi, b) kualitas pelamar menunjukkan persyaratan yang dibutuhkan, c) biaya per pelamar yang direkrut, d) waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang kosong.

3) Seleksi Sumber Daya Manusia

Seleksi adalah suatu proses untuk memilih individu yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan untuk mengisi jabatan didalam organisasi. Proses seleksi bertujuan untuk menyesuaikan antara kemampuan dan

ketrampilan sumber daya manusia yang tertulis dalam lamaran kerja dan apa yang dibutuhkan organisasi. Proses seleksi yang baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan sebuah organisasi. Oleh karena itu seleksi harus didasarkan pada standar yang jelas. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dasar kebijaksanaan dalam mengadakan seleksi sumber daya manusia adalah : mengadakan seleksi dengan cara yang paling efektif dan dengan biaya serendah – rendahnya untuk mendapatkan tenaga kerja yang sebaik – baiknya (Manulang : 1981).

4) Sosialisasi atau Orientasi

Orientasi atau Sosialisasi merupakan program yang didesain untuk membekali karyawan baru dengan informasi yang diperlukan agar dapat berfungsi secara baik dan efektif dalam organisasi (Stoner dkk ; 1995). Lebih jauh orientasi ditujukan untuk memperkenalkan sumber daya manusia pada tiga hal yang utama, yaitu : 1) informasi umum mengenai kerja rutin sehari – hari, 2) tinjauan sejarah organisasi, tujuan, operasi, dan produk atau jasa, 3) kebijakan organisasi, peraturan kerja, dan tunjangan.

5) Pelatihan dan Pengembangan

Istilah pelatihan (*training*) mengacu pada serangkaian kegiatan yang memberikan peluang untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Program pelatihan diberikan kepada karyawan yang baru maupun karyawan yang telah ada, tujuannya adalah untuk menghadapi situasi – situasi yang berubah. Sementara itu program pengembangan (*development*) dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan

jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan umum. Menurut Pigors dan Myers (1961:33)

Pendidikan dan Pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau ketrampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau *need assessment*, yang menyangkut tiga aspek, yaitu : analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan analisis pribadi.

6) Penilaian Prestasi

Prestasi kerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk mengetahui apakah sumber daya manusia yang ada telah bekerja sesuai dengan standar -- standar yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah menetapkan kebijaksanaan organisasi untuk dapat meningkatkan kontribusi atau peranan lain. Manajemen sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan efektivitas perusahaan melalui kebijaksanaan, prosedur dan metode yang digunakan untuk mengelola orang – orang dalam organisasi tersebut. Menurut Martoyo (1992:84) Setiap organisasi apapun bentuknya senantiasa akan berupaya dapat tercapainya tujuan organisasi yang

serta mempunyai tugas melakukan penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b) Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBA, APBN dan sumber lain yang sah;
- c) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan program Bina Marga;
- d) Penyiapan data dan informasi dibidang pelaksanaan program Bina Marga;
- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bina Marga;
- f) Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Bina Marga; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan wilayah Kabupaten Aceh Utara. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga, dan mempunyai tugas melakukan pembangunan jalan dan jembatan serta pemanfaatan dan rekomendasi perizinan di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kabupaten Aceh Utara;
- b) Pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pembangunan peningkatan jalan dan penggantian jembatan Kabupaten Aceh Utara;
- c) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Kabupaten Aceh Utara. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga, serta mempunyai tugas melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan serta jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan, pemanfaatan dan penanggulangan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan pemanfaatan dan penanggulangan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengujian dan Peralatan

Bidang Pengujian dan Peralatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengujian dan peralatan. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga, serta mempunyai tugas melakukan penelitian uji tanah, geoteknik, bahan, konstruksi, pengelolaan peralatan dan perbekalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penelitian uji tanah, geoteknik dan bahan konstruksi;
- b) Pelaksanaan pengujian dan penetapan standar mutu dan konstruksi;
- c) Pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan;
- e) pelaksanaan pemberian dukungan pemanfaatan peralatan dan perbekalan dalam pelaksanaan penanggulangan akibat bencana;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pengujian dan peralatan; dan
- g) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala dinas yang membawahi 5 (lima) organ utama dinas. Kelima organ utama Dinas terdiri atas Sekretariat Dinas, bidang Program dan Pelaporan, bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,

bidang Pengujian dan Peralatan, dan kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya, untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, masing-masing organ utama Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dibagi dalam bentuk seksi/sub-bagian yang memiliki tanggung jawab tertentu yang bersifat sinergis dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Secara rinci, masing-masing seksi/sub-bagian struktur Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada (Bagan Struktur Dinas Bina Marga hal.132 Terlampir).

5. Peranan Dinas Bin Marga Kabupaten Aceh Utara

a. Pengertian Peranan

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya. (Soekanto 2009:212-213).

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009: 213) peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dan Menurut para penganut pendekatan interaksionisme simbolik, setiap tindakan pengambilan peranan pada dasarnya harus memerhatikan dua faktor berikut (Narwoko, 2010:22).

- 1) Dugaan orang sebelumnya terhadap tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka.
- 2) Pemikiran atau pandangan orang inengenai perilaku mereka sendiri dengan mengingat tafsiran mereka terhadap tanggapan orang lain. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

b. Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara

b.1 Visi dan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Bina Marga memiliki visi misi yang dijalankan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.

Adapun visi Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara untuk periode 2012 - 2017 adalah *Terwujudnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Bermamfaat Bagi Masyarakat “BERKAT”*

Selanjutnya visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu penjabaran visi Dinas

Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dirumuskan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas Aparatur Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara yang kredibel;
- 2) Menyusun strategi, program prioritas perencanaan dan pelaporan;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara;
- 4) Mengupayakan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap untuk kelancaran arus transportasi;
- 5) Melakukan pembinaan jasa konstruksi dan perizinan; dan
- 6) Meningkatkan secara terus menerus kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

b.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Dan tujuan ini yang digunakan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang termaktub dalam Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.2
MISI – TUJUAN

No	Misi	Tujuan
1	Meningkatkan kualitas Aparatur Dinas Bina Marga.	1.1 Meningkatkan kesadaran Aparatur untuk melaksanakan tugas yang tertib, teratur dan efisien;
2	Menyusun strategi, program prioritas perencanaan dan pelaporan.	2.1 Meningkatkan kualitas tahapan proses perencanaan, pembangunan dan pengawasan serta data base jalan dan jembatan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan;
3	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Bina Marga	3.1 Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kantor yang memadai;
4	Mengupayakan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap untuk kelancaran arus trasportasi.	4.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap dan berkualitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan pangan dan daya saing terutama pada kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;
5	Melakukan pembinaan jasa konstruksi dan perizinan	5.1 Optimalisasi peran pihak jasa konstruksi dan perizinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur jalan dan jembatan.
6	Meningkatkan secara terus menerus kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu.	6.1 Mendorong upaya untuk meningkatkan kinerja pada seluruh bidang dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

Adapun sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.3
TUJUAN – SASARAN

No	Tujuan	Sasaran
1	Misi 1 : Meningkatkan kualitas Aparatur Dinas Bina Marga. 1.1 Meningkatkan kesadaran Aparatur untuk melaksanakan tugas yang tertib, teratur dan effisien;	1.1.1 Tertib absensi 100%; 1.1.2 Seluruh aparatur melaksanakan tugas sesuai Sistem Manajemen Mutu.
2	Misi 2 : Menyusun strategi, program prioritas perencanaan dan pelaporan 2.1 Meningkatkan kualitas tahapan proses perencanaan, pembangunan dan pengawasan serta data base jalan dan jembatan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan;	2.1.1 Perencanaan berjalan sesuai jadwal; 2.1.2 Pembangunan berjalan sesuai dengan jadwal; 2.1.3 Pengawasan berjalan sesuai dengan jadwal; 2.1.4 Akurasi database jalan dan jembatan 100%.
3	Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Bina Marga 3.1 Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kantor yang memadai;	3.1.1 Tersedianya kelengkapan fasilitas kantor, alat-alat berat dan alat laboratorium; 3.1.2 Tingkat pemakaian sarana dan prasarana 100% (tidak ada keluhan).
4	Misi 4 : Mengupayakan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap untuk kelancaran trasportasi 4.1 Meningkatkan pembangunan	4.1.1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 56% dengan rencana capaian 5 (lima) tahun kedepan adalah 70,66% atau 2,93% pertahun; 4.1.2 Jembatan dalam kondisi baik

No	Tujuan	Sasaran
	infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap dan berkualitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan pangan dan daya saing terutama pada kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;	adalah 63,58% dengan rencana capaian 5 (lima) tahun kedepan adalah sebesar 81,47% atau 3,58% pertahun.
5	Misi 5 : Melakukan pembinaan jasa konstruksi dan perizinan 5.1 Optimalisasi peran pihak jasa konstruksi dan perizinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur jalan dan jembatan.	5.1.1 Kinerja jasa konstruksi sesuai target setiap pekerjaan dari segi kualitas, waktu, harga dan regulasi; 5.1.2 Semua perizinan terkait dengan konstruksi sesuai dengan peraturan dan perundungan yang berlaku.
6	Misi 6 : Meningkatkan secara terus menerus kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dengan menerapkan Sistem manajemen Mutu 6.1 Mendorong upaya untuk meningkatkan kinerja pada seluruh bidang dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu.	6.1.1 Peningkatan kinerja yang terlaksana minimum satu ide pertahun perbidang.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan literatur-literatur dari sumber penulis lain yang berhubungan dengan makalah yang penulis sampaikan tentang "Peranan Dinas Bina Marga Dalam Mendukung Pembangunan Dan Pelayanan

Publik Kabupaten Aceh Utara". Tujuannya adalah untuk lebih menyempurnakan penulisan, dan memperoleh hasil yang lebih baik dalam penulisan ini.

Adapun sumber-sumber penulis terdahulu dapat diperlihatkan pada dibawah ini.

Tabel 2.6 Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu

No	Judul Penulisan	Peneliti /Tahun	Metode	Hasil
1	PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Suatu Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud)	KRISTIAN LALUA S/Tahun 2013	Analisis deskriptif dengan data kualitatif	1. Dalam pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bappeda Kabupaten Kepulauan Talaud Menggunakan metode partisipatif, yang dirasa masih kurang dimana tingkat partisipatif RPJPD tidak signifikan mewakili kebutuhan masyarakat. 2. Dalam melaksanakan musrembang Bappeda menyiapkan bahan untuk RPJPD, dan dalam musrembang tersebut Bappeda hanya melibatkan pegawai-pegawai dalam Bappeda, tidak semua komponen yang berkompeten dalam pengelolaan pembangunan dilibatkan. 3. Dalam melaksanakan penyusunan rancangan akhir dilakukan oleh Bupati. 4. Dalam penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

				menjadi Perda, dan sebelum disahkan menjadi Perda Bappeda meminta Bupati untuk menyetujui Perda tersebut.
2	PERANAN BAPPEDA DALAM MENYUSUN MUSRENBANG	Selsuanda Musasma dan Sujianto/ Tahun 2013	Qualitatif	Peranan BAPPEDA dalam Musrenbang Kabupaten Siak Tahun 2012 sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan terlaksana dengan baik.
3	Analisa Pengaruh partisipasi Anggaran Manajerial melalui Komitment Tujuan Anggaran Dan Job Relevant Information (JRI) sebagai Variabel Intervebing (Penelitian terhadap perusahaan Manufaktur di Indonesia)	Imam Ghazali 2005	Qualitatif (Data Primer dengan Quitioner Dan Responden)	<p>(1) partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada tingkat signifikansi probabilitas di bawah 0,05 ($p=0,002$),</p> <p>(2) partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap komitmen tujuan anggaran tetapi besarnya pengaruh tersebut tidak signifikan,</p> <p>(3) partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap JRI pada tingkat signifikansi probabilitas di bawah 0,05 ($p=0,007$),</p> <p>(4) komitmen tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap JRI namun besarnya pengaruh tersebut tidak signifikan,</p> <p>(5) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen tujuan</p>

				<p>anggaran terhadap kinerja manajerial pada tingkat signifikansi probabilitas di bawah 0,05 ($p=0,027$) dan</p> <p>(6) JRI berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial namun besarnya pengaruh tersebut tidak signifikan</p>
4.	<p><i>ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BANDUNG</i></p>	<p><i>NI LUH PUTU PUSPIT ASARI/T ahun 2015</i></p>	<p>Analisis deskriptif dan analisis faktor.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa dari limabelas variable terbagi menjadi tigafaktor dan pengelompokannya adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Faktorkesediaan meliputi variabel kesediaan petugas, kelancaran komunikasi, pemberian solusi, kepastian jadwal, kejelasan Informasi, dan kecepatan proses, dengan nilai <i>eigen</i> sebesar 6,36 yang mampu menjelaskan indikator sebesar 42,37 persen.</p> <p>2). Faktor kemampuan meliputi variabel keramahan petugas, kemampuan petugas, dan tanggung jawab petugas,dengan nilai <i>eigen</i> sebesar 1,75 yang mampu menjelaskan indikator sebesar 11,65 persen.</p> <p>3) Faktor perhatian m e l i p u t i : Penataan Ruangan, Penampilan Petugas,Sarana Prasarana, Perhatian</p>

			<p>petugas, Keadilan perlakuan, dan keamanan dan kenyamanan dengan nilai <i>eigen</i> sebesar 1,12 yang mampu menjelaskan indikator sebesar 7,49 persen</p> <p>Berdasarkan hasil analisis faktor, variabel kesediaan petugas adalah variabel yang paling mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam pengurusan ijin usaha pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Badung karena memiliki nilai koefisien (<i>loading factor</i>) tertinggi yaitu sebesar 0,80. Ini berarti kesediaan aparat pemberi layanan dalam membantu masyarakat pencari ijin khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat diperlukan dalam membentuk kualitas pelayanan publik yang baik, sehingga semakin banyak usaha yang ada, dan kesadarnya untuk melegalkan usahanya dengan melengkapi persyaratan perijinan yang berarti semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dari penerimaan pajak tersebut secara langsung</p>
--	--	--	---

				akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.
5.	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi	Ehrmann Suharto o Dan Mocham mad Solichin 2006	Qualitatif (Data Primer dengan Quitioner Dan Respond en)	Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen organisasi bukan merupakan variabel moderating dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan senjangan anggaran pada instansi pemerintah
6.	ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN SISTEM LUNAK (<i>SOFT SYSTEM</i>) (Studi Pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang)	Nana Abdul Aziz ¹ , Bambang Supriyono ² , MR. Khairul Muluk/ Tahun 2013	Metode Kualitatif	Kesimpulan yang didapat bahwa proses penyusunan RKPD menunjukan masih terdapat kompleksitas permasalahan. Kompleksitas yang dimaksudkan adalah tahap penyusunan mulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD, sampai musrenbang tingkat kota. Pendekatan <i>soft systems methodology</i> mengelompokan kompleksitas tersebut dalam tiga tahap. Strukturisasi permasalahan, mendefinisikan sistem permasalahan dan mendefinisikan sistem permasalahan dan

				membangun model konseptual.
7.	Analisis Hubungan Kualitas SDM PNS Dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun	Hari Wicaksono, Tahun 2011	Metode Chi Square	Didapat adanya hubungan kualitas SDM PNS dengan dimensi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan dengan kinerja Pemerintah. Hal ini ditunjukan dengan nilai chi square tabel. Dari sini disimpulkan bahwa adanya hubungan dari kualitas SDM PNS dengan kinerja Pemerintah.
8.	Setting public service obligations in low-demand air transportation networks: Application to the Azores ; Alokasi optimal dari Pusat Pelayanan Publik di Tempat Tengah Daerah Fungsional	Samo Drobne Dan Marija Bogataj/2015	Qualitatif (Data Primer dengan Quitioner Dan Responden)	Artikel ini menyajikan metode untuk cakupan yang optimal dari wilayah negara dengan wilayah fungsional, di mana kota pintar adalah pusat kegiatan, dan alokasi optimal dari layanan mempengaruhi pertumbuhan kota

9.	<p>Setting public service obligations in low-demand air transportation networks: Application to the Azores; Pengaturan kewajiban pelayanan publik di udara rendah permintaan jaringan transportasi: Aplikasi untuk Azores</p>	<p>João Pedro Pita sebuah, António Pais Antunes sebuah, f, Cynthia Barnhart b, António Gomes de Menezes c, Tahun 2012</p>	<p>Analisis deskriptif dan analisis faktor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pendekatan keputusan untuk membantu pemerintah (otoritas penerbangan) di pengaturan PSO standar yang konsisten dengan anggaran yang tersedia untuk membiayai pelaksanaannya. - Pendekatan ini didasarkan pada penjadwalan penerbangan dan armada Model tugas terpadu untuk menentukan jaringan transportasi udara yang meminimalkan biaya sosial total memuaskan diberikan asal / tujuan target permintaan. - Kegunaan pendekatan diilustrasikan dengan aplikasi untuk jaringan Azores, salah satu jaringan utama Eropa beroperasi secara penuh menurut sistem PSO.
10.	<p>Public private not-for-profit partnerships: delivering public services to developing countries ; Publik swasta tidak-untuk-keuntungan kemitraan: memberikan pelayanan publik untuk negara-</p>	<p>Erick F. Oechler Solana / Tahun 2014</p>	<p>Analisis deskriptif dan analisis faktor</p>	<p>Makalah ini menetapkan kerangka kerja yang membuat Kerjasama Pemerintah Swasta (PPP) lebih mudah diakses oleh negara-negara berkembang. Sebuah kemitraan antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk mengalokasikan risiko kepada orang yang mampu untuk menghindari atau</p>

	negara berkembang			mengurangi mereka dan tanggung jawab yang paling mampu untuk memiliki pelayanan yang berkelanjutan kepada penerima manfaat dengan cara finansial suara.
11.	<p>Comparative analysis of biofuels policy development in Sub-Saharan Africa: The place of private and public sectors;</p> <p><i>analisis komparatif pengembangan kebijakan biofuel di Sub-Sahara Afrika: Tempat sektor swasta dan publik</i></p>	Charles B.L. Jumbe*, Maxwell Mkondiwa Tahun 2011/2012	Analisis deskriptif Dan Kualitatif	Kesimpulannya, seperti yang kita sekarang hidup di sebuah desa global, negara-negara harus melakukan rinci dan sistematis, penilaian khusus negara untuk memastikan kelangsungan hidup dan kelayakan biofuel, dan menentukan "aturan main" untuk melindungi penduduk pedesaan dari kehilangan tanah investor untuk menanam tanaman energi dan memastikan pemerataan manfaat investasi biofuel tanpa berpose ancaman terhadap lingkungan atau mengganggu hak-hak warga negara atau masyarakat. Dimana biofuel layak, PPP harus menjadi bagian dari kebijakan biofuel dan strategi investasi dalam rangka membangun kepercayaan, tanggung jawab kolektif dan manajemen risiko bersama untuk mencapai hasil bersama bagi petani, yang investor dan lingkungan.

<p>12. Construction of Graduate Employment Service System Based on Public Information Platform</p> <p><i>Pembangunan Graduate Pekerjaan Layanan Sistem Berdasarkan Platform Informasi Publik</i></p>	<p>Jun Zheng^{a,*}, Jundong Tang^b, Jiansheng Gao^b/ Tahun 2012</p>	<p>Analisis deskriptif Dan Kuantitatif</p>	<p>dalam rangka memenuhi perubahan yang sulit situasi kerja dan memungkinkan bimbingan kerja yang efektif tepat untuk lulusan universitas, membangun dinamis, kuantitatif dan sistematis informasi pekerjaan platform yang telah menjadi tugas mendesak dari pekerjaan saat bimbingan untuk mahasiswa.</p>
--	---	--	--

i. Kerangka Berpikir

1. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran menunjukkan tentang pola pikir terhadap pemecahan masalah penelitian yang diambil sebagai dasar pemecahan masalah. Hal ini berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan baik dalam kajian teori maupun model analisis yang digunakan.

Secara deskriptif, kerangka pemikiran dalam penelitian tentang peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara ini adalah sebagai berikut:

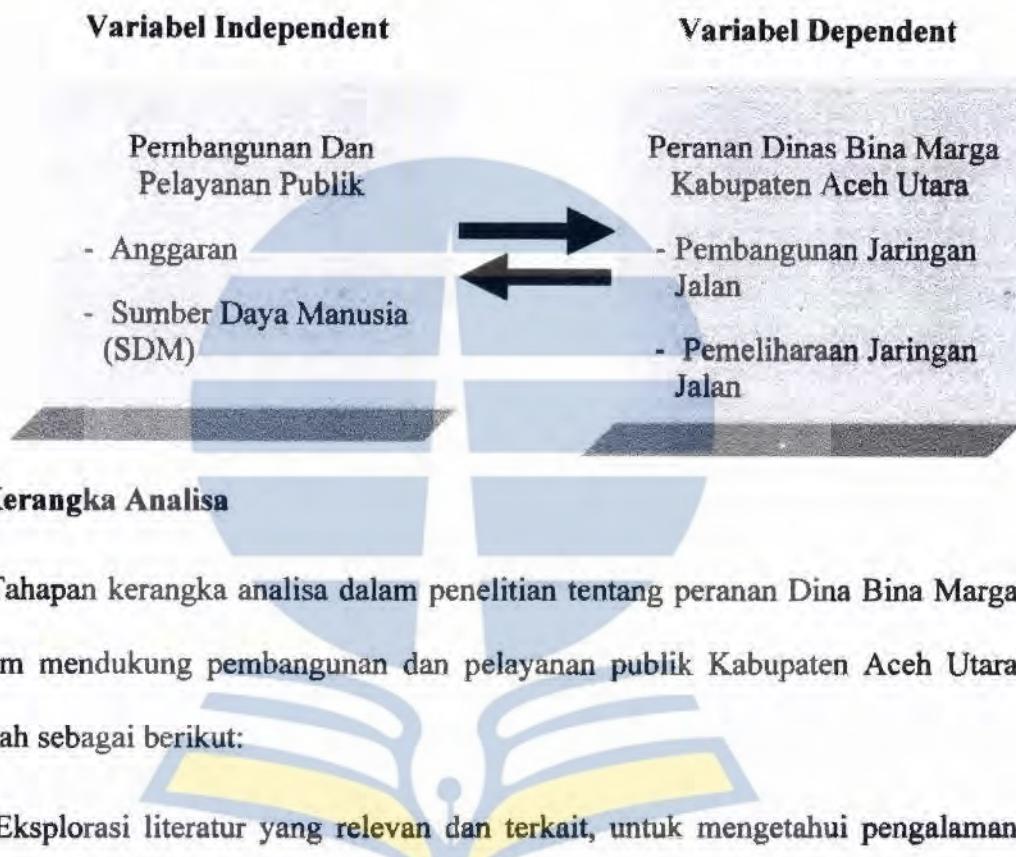
Menurut Pelly (1997: 91), peranan adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status. Dan Menurut (Narwoko, 2010:22) dalam setiap pengambilan peranan harus memperhatikan dua faktor yaitu dugaan orang sebelumnya terhadap tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka, dan pemikiran atau pandangan orang mengenai perilaku mereka sendiri

dengan mengingat tafsiran mereka terhadap tanggapan orang lain. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Untuk teori pembangunan, mengacu kepada pendapat Gant (Nasution, 2008: 42), yaitu tujuan pembangunan ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan- kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Selanjutnya dalam hal pelayanan publik, menurut UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Wasistiono (Saleh, 2010: 24), pelayanan publik adalah sebagai pemberian jasa yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan, pemerintah, swasta) kepada publiknya dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Pamudji (Napitupulu, 2007: 165), konsep pelayan publik diturunkan dari makna public service yang berarti: “berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa”.

Sebagai penunjang peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara, terdapat 2 (Dua) faktor yang sangat mempengaruhi kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh

Utara yaitu kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Besaran anggaran yang tersedia dan quantitas serta qualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan sangat berpengaruh kepada target kinerja peningkatan/pemeliharaan jalan yang menjadi tupoksi utama kerja Dinas Bina Marga kabupaten Aceh Utara. Berikut gambaran (B.2.1) kerangka pemikiran seperti yang tertuang dibawah ini :



2. Kerangka Analisa

Tahapan kerangka analisa dalam penelitian tentang peranan Dina Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

1. Eksplorasi literatur yang relevan dan terkait, untuk mengetahui pengalaman instansi lain yang memiliki peran yang sama dengan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, eksplorasi literatur tersebut untuk mengidentifikasi kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengukur peranan Dinas Bina Marga dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.
2. Eksplorasi literatur yang berkaitan dengan metodologi penelitian tentang peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dalam mendukung

BAB IV

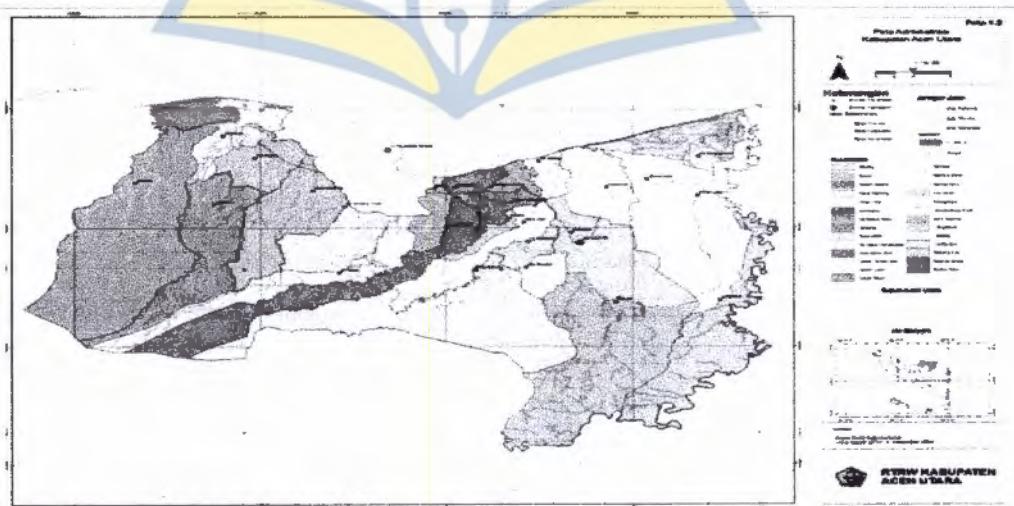
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang berada di sebelah utara. Berdasarkan Peta Bakosurtanal skala 1 : 50.000, maka secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi $96^{\circ} 47' - 97^{\circ} 31'$ Bujur Timur dan $04^{\circ} 43' - 05^{\circ} 16'$ Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya sebagaimana pada Gambar 4.1 adalah:

- Sebelah utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka.
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur.
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah.
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km², atau 329.686 Ha. Dengan panjang garis pantai 51 km, dan kewenangan kabupaten adalah sampai 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan ini adalah 37.744 Ha atau 3.774,4 km². Lebih jelas dapat dilihat Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara
menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1.	Sawang	384,65	11,67
2.	Nisam	114,74	3,48
3.	Nisam Antara	84,38	2,56
4.	Bandar Baro	42,35	1,28
5.	Kuta Makmur	151,32	4,59
6.	Simpang Kramat	79,78	2,42
7.	Syamtalira Bayu	77,53	2,35
8..	Geureudong Pase	269,28	8,17
9.	Meurah Mulia	202,57	6,14
10.	Matang Kuli	56,94	1,73
11.	Paya Bakong	418,32	12,69
12.	Pirak Timu	67,70	2,05
13.	Cot Girek	189,00	5,73
14.	Tanah Jambo Aye	162,98	4,94
15.	Langkahan	150,52	4,57
16.	Seunuddon	100,63	3,05
17.	Baktiya	158,67	4,81
18.	Baktiya Barat	83,08	2,52
19.	Lhoksukon	243,00	7,37
20.	Tanah Luas	30,64	0,93
21.	Nibong	44,91	1,36
22.	Samudera	43,28	1,31
23.	Syamtalira Aron	28,13	0,85
24.	Tanah Pasir	20,38	0,62
25.	Lapang	19,27	0,58
26.	Muara Batu	33,34	1,01
27.	Dewantara	39,47	1,20
Kabupaten		3.296,86	100,00

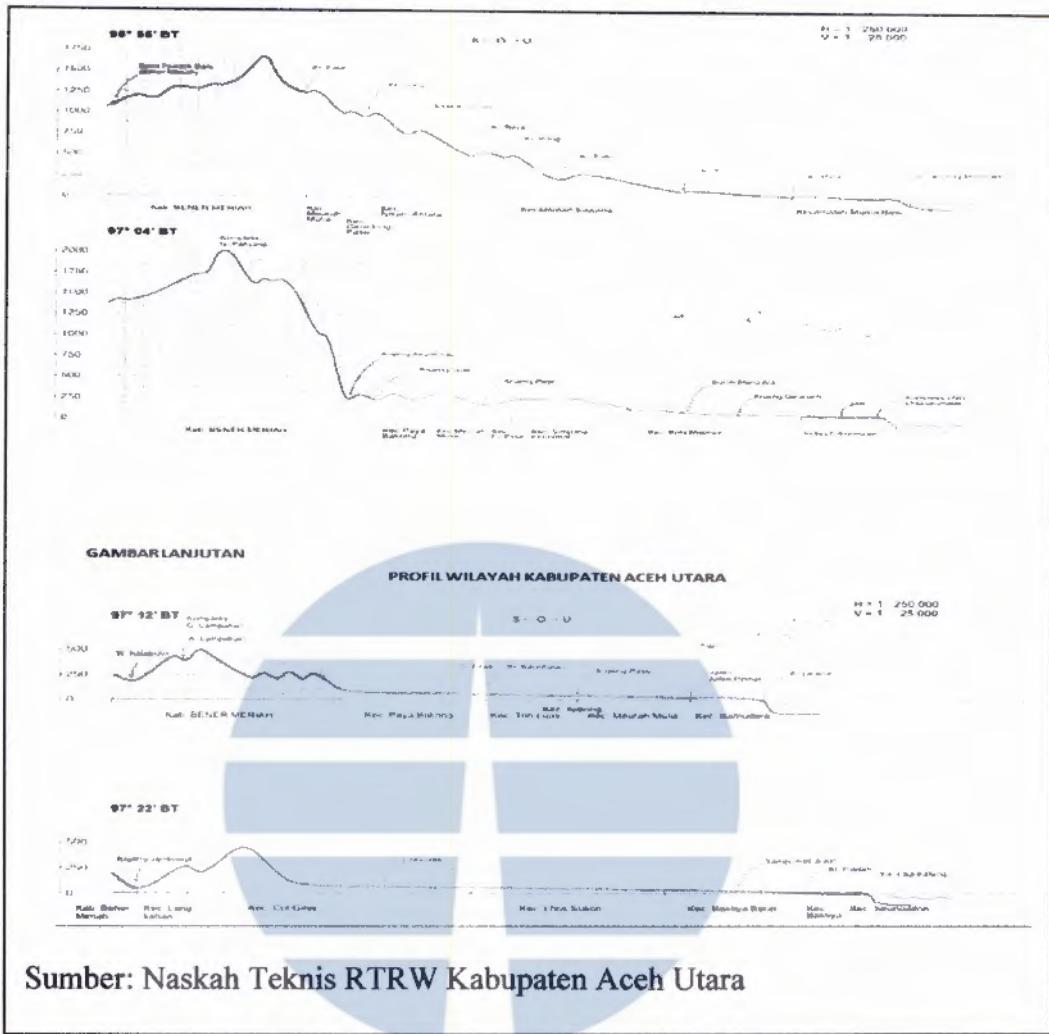
2. Topografi dan Morfologi Wilayah

Dengan batas di sebelah utara merupakan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah :

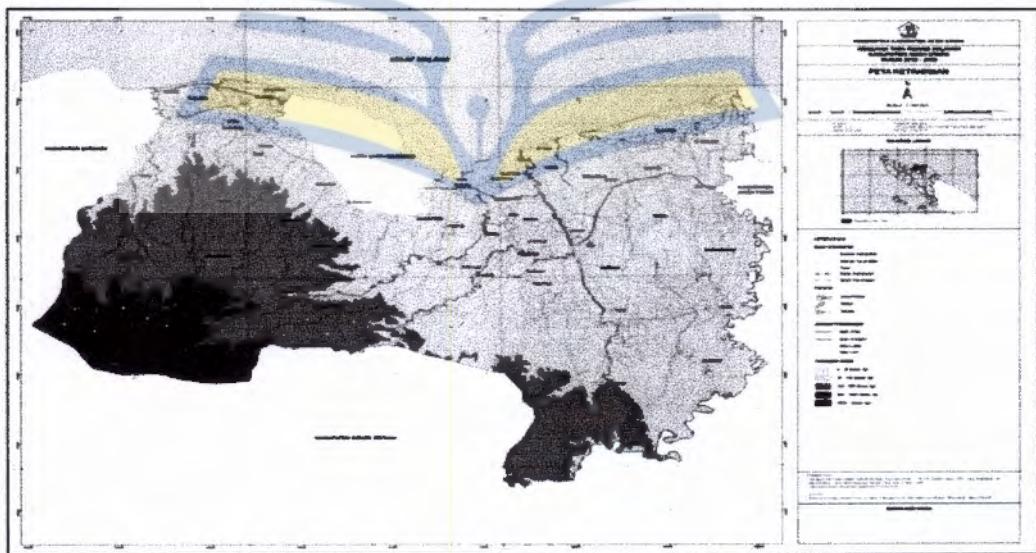
- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona volkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggungan pegunungan.

Selaras dengan geomorfologi tersebut, pada Gambar 2.2 diperlihatkan profil wilayah menurut arah utara – selatan, masing-masing pada garis $96^{\circ} 55'$, $97^{\circ} 04'$, $97^{\circ} 12'$, dan $97^{\circ} 22'$ BT. Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian (Gambar 2.3) yaitu :

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| • 0 – 25 m dpl | : 146.096 Ha, atau 44,31 %; |
| • 25 – 100 m dpl | : 63.781 Ha, atau 19,35 %; |
| • 100 – 500 m dpl | : 88.526 Ha, atau 26,85 %; |
| • 500 – 1000 m dpl | : 20.932 Ha, atau 6,35 %; |
| • Di atas 1000 m dpl | : 10.351 Ha, atau 3,14 %. |



Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara



Gambar 4.2 Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Aceh Utara

Sumber : Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Aceh Utara (Gambar 2.4) yaitu :

- 0 – 2 % : 50,38 %, atau sekitar 166.063 Ha;
- 2 – 8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
- 8 – 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
- 15 – 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
- 25 – 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
- > 40 % : 3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha.



Gambar 4.3 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

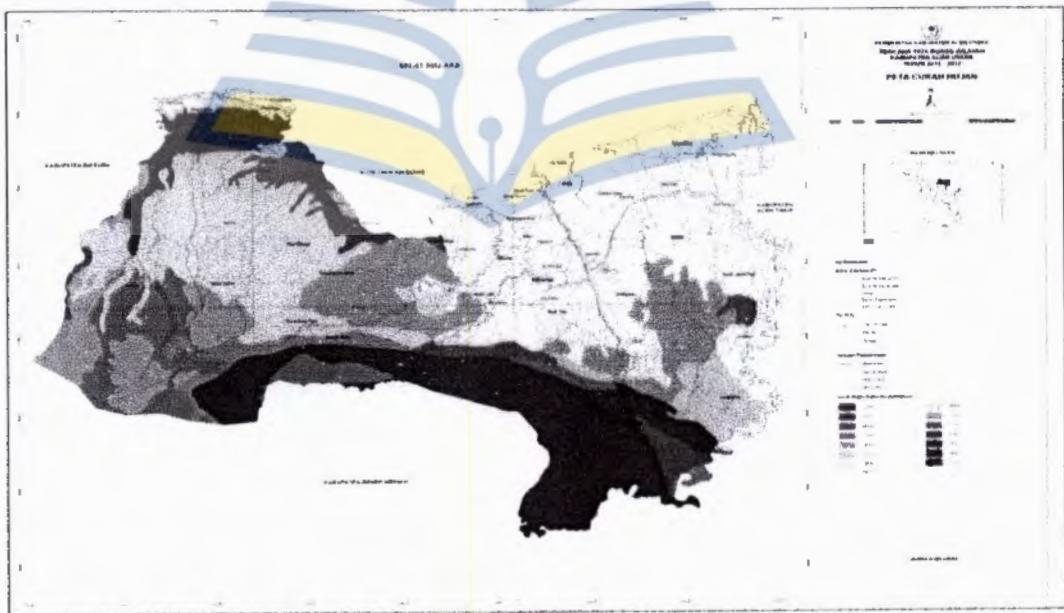
3. Iklim

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson; dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid & Ferguson, termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh, karena pengaruh Pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan

Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30° C, dengan kisaran antara 26° C sampai 36° C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28° C, dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah $32,8^{\circ}$ C. Kelembaban udara berkisar antara 84 – 89 %, dengan rata-rata 86,6 %.



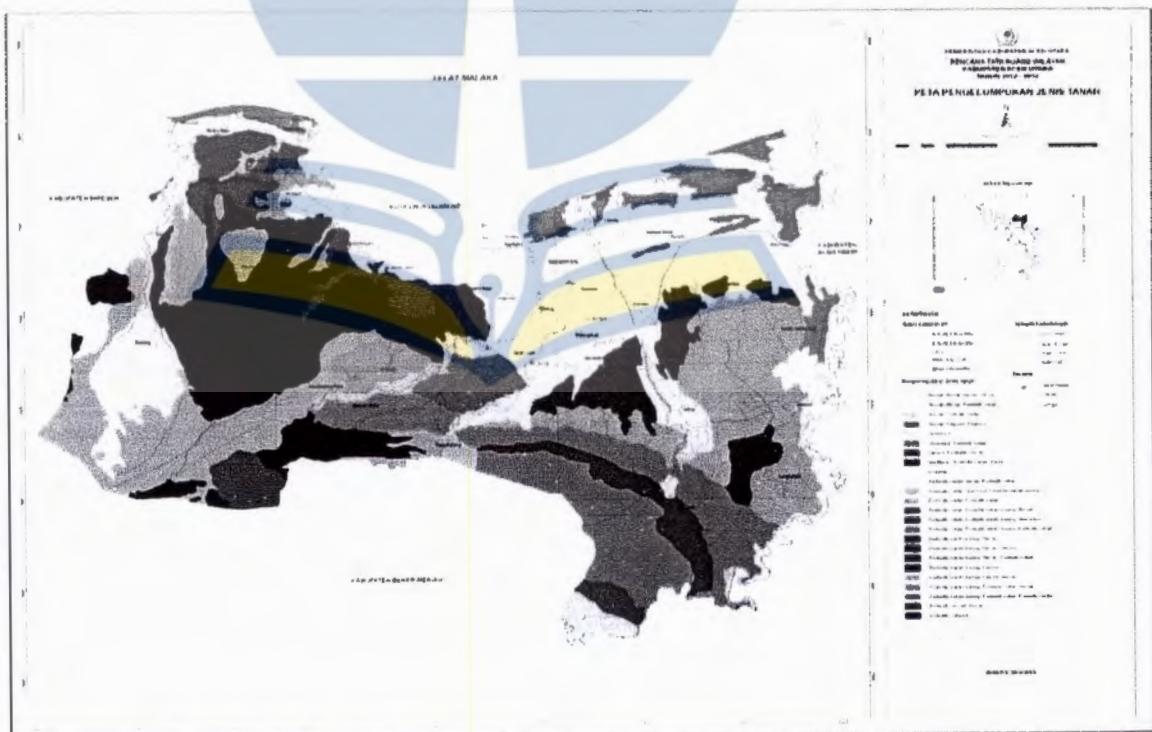
Gambar 4.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara

Sumber : Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

4. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara.

Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsilik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam (>90 cm) sampai yang terdangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 4.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara

Sumber : Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

5. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan, dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS.



Gambar 4.6 Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara

Sumber : Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

D. Potensi Pengembangan Wilayah

Pembangunan Kabupaten Aceh Utara diprioritaskan pada pembangunan yang memperhatikan potensi wilayah yaitu melalui pengembangan kawasan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama sehingga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012 – 2032 dan sesuai karakteristik wilayah maka pengembangan kawasan budidaya dalam rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi ini relatif terletak antara kawasan hutan lindung dan batas dengan Kabupaten Bener Meriah dengan kawasan perkebunan dan kawasan budidaya lainnya. Selain pemantapan kawasan hutan produksi yang telah ada sebelumnya, juga direncanakan pemanfaatan belukar di bagian lebih hulu lagi dari yang direncanakan untuk kawasan perkebunan. Total luas kawasan hutan produksi ini adalah 30.687 Ha.

Sebaran kawasan hutan produksi di Kabupaten Aceh Utara meliputi : Kecamatan Langkahan 1.341 hektar; Kecamatan Cot Girek 9.502 hektar; Kecamatan Meurah Mulia 4.278 hektar; Kecamatan Geureudong Pase 2.710 hektar; Kecamatan Nisam Antar 2.930 hektar; Kecamatan Sawang 4.952 hektar; dan Kecamatan Paya Bakong 5.000 hektar.

Pemanfaatan kawasan butan produksi yaitu berupa :

- a. Eksplorasi hutan, dalam bentuk pengambilan kayu dengan pola tebang pilih dan tanam kembali.
- b. Pengambilan hasil hutan non-kayu seperti : rotan, getah, madu lebah, buah-buahan, dan lain-lainnya

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan sawah (pertanian lahan basah) merupakan pemantapan dari kawasan sawah yang ada dewasa ini dan direkomendasikan penambahan/ perluasannya pada lahan-lahan yang potensial di sekitarnya dan berpeluang untuk dapat dilayani oleh jaringan irigasi/pengairan. Kendati dengan luas yang bervariasi, kawasan

sawah terdapat di semua kecamatan. Total luas kawasan sawah ini adalah 46.901 Ha.

Kegiatan-kegiatan budidaya atau ekonomi produksi lainnya yang potensial tergabung sebagai kegiatan sampingan/diversifikasi antara lain adalah :

- Perikanan air tawar, dengan pola mina-padi, kolam/tebat, kerambah pada saluran irigasi, dan penangkapan pada perairan tersebut;
- Peternakan, yang dapat terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas (terutama itik atau bebek);
- Pertanian palawija/hortikultura, terutama sebagai tanaman selingan dalam kalender tanam, ataupun sebagai tanaman sela.

b. Kawasan Pertanian Lahan Kering (Kebun Campuran)

Kawasan kebun campuran tersebar di semua kecamatan dengan luas mencapai 44.493 Ha. Fungsi kawasan ini adalah sebagai kebun campuran, yang dicirikan oleh variasi tanaman yang beragam dan kegiatan budidaya lainnya meliputi : perumahan perdesaan yang terselip, industri kecil, peternakan, dan lain-lain.

c. Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan

Dengan prinsip bahwa hasil kegiatan sawah yaitu padi merupakan bahan pokok strategis bagi kebutuhan masyarakat, maka keberadaan kawasan sawah ini menjadi sangat penting dan sejauh mungkin dipertahankan luasnya. Apabila masih memungkinkan bagi pencetakan sawah baru pada daerah yang ada dukungan prasarana irigasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan lahan pangan di Kabupaten Aceh Utara. Luasan lahan pangan berkelanjutan mencapai 39.777 ha dari total luas kawasan untuk sawah.

d. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan sebarannya terletak di bagian pedalaman wilayah dengan luasan mencapai 162.672 Ha. Pemanfaatan utama kawasan perkebunan adalah kegiatan budidaya perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

e. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan letaknya tersebar di Kabupaten Aceh Utara khususnya di bagian pedalaman wilayah dan tidak terdelineasi serta tersebar di seluruh kecamatan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan lahan pengembalaan untuk sumber pakan ternak. Kawasan peternakan ini terselip pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan sebagian kawasan permukiman yang memiliki lahan terbuka hijau.

Jenis ternak yang potensial untuk dikembangkan terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ternak besar yang dapat dibudidayakan seperti lembu dan kerbau akan terpusat di Bukit Sentang Kecamatan Lhoksukon, sedangkan ternak kecil adalah kambing dan kelinci. Ternak unggas yang potensial dibudidayakan adalah itik atau bebek.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan tambak merupakan pemantapan dari kawasan tambak yang ada dewasa ini, yang sebarannya adalah di bagian wilayah pesisir, dengan kecenderungan sebaran yang lebih besar di bagian timur. Total luas kawasan tambak adalah 16.712 Ha sedangkan Perikanan tangkap kurang lebih seluas 37.744 Ha.

Rencana pengelolaan kawasan tambak adalah pemanfaatan utama untuk kegiatan tambak yang didukung oleh sistem saluran untuk kebutuhan airnya. Pengembangan potensi serta kawasan peruntukan perikanan didukung dengan pengembangan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuala Cangkoy.

4. Kawasan Peruntukkan Pertambangan

Potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas :

- a. Potensi pertambangan mineral logam terdiri dari:
 - Emas, Meliputi : Kecamatan Murah Mulia;
 - i. Kromium/Emas Putih, meliputi : Kecamatan Geureudong Paseh, Murah Mulia, Paya Bakong, Perak Timur, Cot Gireh; dan
 - Besi, meliputi Kecamatan Paya Bakong.
- b. Potensi pertambangan mineral non logam terdiri dari :
 - Andesit meliputi : Kecamatan Sawang
 - Bentonit, meliputi : Kecamatan Sawang
 - Stronium, meliputi : Kecamatan Sawang dan Tanah Luas
- c. Potensi pertambangan batuan terdiri dari :
 - Batu gunung meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Nisam, Sawang, Simpang Keuramat, Geureudong Pase.
 - a. Pasir meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, Langkahan.
 - b. Pasir urug meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, Langkahan.
 - Batu Kapur meliputi : Kecamatan Muara Batu.

- Tanah liat meliputi : Kecamatan Cot Girek, dan Muara Batu
- a. Potensi pertambangan batubara, meliputi : Kecamatan Sawang, Nisam Antara, Kuta Makmur, Simpang Keramat, Geureudong Pase, Syamtalira Bayu, Murah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Paya Bakong, Pirak Timur, Lhok Sukon, Baktia, Cot Girek, Langkahan, Jambo Aye; dan
- b. Potensi panas bumi potensi energi panas bumi berada di Kecamatan Nisam Antara.
- c. Bahan tambang dari dalam perut bumi, yang dalam hal ini berupa gas alam, seperti yang telah dieksplorasi oleh Perusahaan EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) yang dikenal dengan LNG Arun, instalasi tambang gas melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas area kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektar; meliputi :
 - Kecamatan Syamtalira Aron,
 - Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Nibong,
 - Kecamatan Matangkuli,
 - Kecamatan Paya Bakong,
 - Kecamatan Cot Girek; dan
 - Kecamatan Langkahan.

Bahan tambang dari dalam perut bumi berupa gas alam ini potensi depositnya bersifat antar wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Bahan tambang Galian C dieksplotasi baik di daratan (berupa tanah urug, tanah liat, dan batu kapur), maupun di perairan sungai, dan terutama di tepi sungai (pasir, sirtu, batu, kerikil).

5. Kawasan Peruntukan Industri

a. Kawasan Industri Sedang

Kawasan peruntukan industri sedang berada di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keuramat. Kawasan peruntukan industri sedang yang ada di Kabupaten Aceh Utara merupakan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

b. Kawasan Industri Kecil

Kawasan industri kecil tersebar pada beberapa kecamatan, dan banyak terselip kawasan permukiman. Kawasan industri kecil terdiri dari sentra-sentra industri rumahan (home industry). Kegiatan industri kecil ini merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat kecil khususnya yang berada di pedesaan. Terdapat variasi hasil industri kecil yang potensial untuk dikembangkan. Hasil industri kecil di Kecamatan Tanah Jambo Aye yang dapat dikembangkan adalah industri produk pisang sale, di Kecamatan Dewantara (Ulee Pulo dan Ulee Reuleung) adalah industri pembuatan batu bata, di Kecamatan Muara Batu (Bungkah) dan Kecamatan Baktiya adalah industri produk kerajinan souvenir khas Aceh.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara diklasifikasikan menurut lokasi dan bentuk objeknya, yaitu :

a. Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya yang dikembangkan adalah objek wisata budaya,yaitu :

- Makam Malikussaleh & Malikul Dhahir, di Kec. Samudera;

- Makam Tgk 44, di Kec. Samudera;
- Makam Naina Husam Al-Din, di Kec. Samudera;
- Makam Sidi Abdullah Tajui Nilah, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Syarif, di Kec. Samudera;
- Makam Sultanah Nahrisyah, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Batee Bale A, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Batee Bale B, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Saleh Salihin, di Kec. Samudera;
- Makam Maulana Abdurrahman Al-Fasi, di Kec. Samudera;
- Makam Said Syarif, di Kec. Samudera;
- Makam Perdana Menteri M.Yacob, di Kec. Samudera;
- Makam Raja Muhammad Mns Nibong, di Kec. Syamtalira Bayu;
- Makam Putra Raja Syuhada Cot Plieng, di Kec. Syamtalira Bayu;
- Makam Ratu Al'Ala Binti Malikul Dahir, di Kec. Pirak Timu;
- Makam Tgk Mursalah Ibnu Talabuddin, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Tgk Meunasah Reulob, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Raja Purupi, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Tgk Jrat Manyang, di Kec. Baktiya Barat;
- Makam Tgk Di Glumpang, di Kec. Baktiya Barat;
- Makam Tgk Di Padang, di Kec. Baktiya;
- Makam Tgk Batee Badan, di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Makam Glewang Anval, di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Makam Tgk Pantee Keurajen, di Kec. Sawang;
- Rumah Adat Cut Meutia, di Kec. Matangkuli;

- Makam Cut Meutia, di Kec. Cot Girek.
- b. Pariwisata Alam
 - Objek wisata di pesisir pantai, berupa : Pantai Ulee Rubek di Ulee Rubek Timur dan Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon, Pantai Sawang di Sawang Kec. Samudera, Pantai Pusong di Bangka Jaya Kec. Dewantara; Pantai Dakuta Bungkah di Bungkah Kec. Muara Batu.
 - Objek wisata di pedalaman, berupa : Air Terjun Blang Kulam di Sidomulyo Kec. Kuta Makmur, Air Terjun Seumirah di Kd. Seumirah Kec. Nisam Antara, Pemandian Krueng Sawang di Sawang Kec. Sawang, Pusat Konservasi Gajah (PKG) di Kec. Cot Girek,

7. Kawasan Budidaya Lainnya

a. Kawasan Pelabuhan

Kawasan pelabuhan adalah Pelabuhan Lhokseumawe di Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, dengan luas 166 Ha. Pelabuhan ini dapat melayani kegiatan bongkar muat umum (pelabuhan umum) maupun bongkar muat khusus industri besar (pelabuhan khusus) untuk tujuan luar negeri dan dalam negeri (antar provinsi). Melayani angkutan penyeberangan luar negeri antara Lhokseumawe - Penang/Langkawi (Malaysia). Pelabuhan ini ditetapkan sebagai Pelabuhan Laut Internasional, terkait dengan dukungannya terhadap fungsi PKN Lhokseumawe.

b. Kawasan Bandar Udara

Kawasan Bandar Udara adalah kompleks Bandar Udara Malikussaleh di Kecamatan Muara Batu, dengan luas 83 Ha. Bandara udara ini merupakan bagian dari dukungannya terhadap fungsi PKN Lhokseumawe sehingga diusulkan sebagai bandar udara pengumpulan. Bandara ini dikelola oleh pihak Pemda

Kabupaten Aceh Utara. Rute penerbangan yang dilayani saat ini yaitu Muara Batu-Medan dan Muara Batu-Banda Aceh.

c. Kawasan Pertanian Terpadu

Kawasan pengembangan pertanian terpadu terletak di tengah kawasan hutan produksi di Kecamatan Sawang dengan luasan 430 Ha. Berdasarkan karakter lokasinya, maka kegiatan pertanian yang dikembangkan adalah merupakan pertanian pada lahan kering, baik berupa perkebunan atau pertanian lahan kering maupun pertanian ikutan lainnya seperti peternakan, industri pengolahan hasil pertanian, dan lainnya.

a. Wilayah Laut Kewenangan

Panjang garis pantai mencapai 51 km sehingga berdasarkan kewenangan kabupaten sampai dengan 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan mencapai 37.744 Ha. Pemanfaatan wilayah laut kewenangan saat ini masih terbatas pada bentuk pemanfaatan penangkapan ikan oleh para nelayan di pesisir, dan sebagai alur pelayaran menuju dan dari pelabuhan laut Lhokseumawe di Krueng Geukueh. Peluang pengembangan pemanfaatan selain untuk perikanan tangkap dapat juga untuk kegiatan wisata bahari, potensi tambang di bawah laut, jalur pelayaran tepi pantai, dan lainnya.

b. Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye

Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye terletak di Kecamatan Langkahan yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng Jambo Aye. Waduk yang dibangun dengan kapasitas 1,5 miliar m^3 direncanakan digunakan selain sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah I

Aceh dengan kapasitas 235 MW, juga dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi 55.700 Ha lahan persawahan, sebagai sumber air baku dengan debit 11,6 m³/det dan pengendalian banjir (daerah Langkahan, Tanah Jambo Aye, Baktiya dan Seunuddon), serta tempat rekreasi dan olah raga. Luas daerah genangan waduk ini direncanakan kurang lebih 2.745 Ha yang meliputi wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.

d. Kawasan Waduk Krueng Keureuto

Kawasan Waduk Krueng Keureuto terletak di Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Tanah Luas yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng Keureuto. Fungsi waduk ini adalah selain sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 3,27 MW juga dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi 4.568 Ha lahan persawahan, untuk pengendalian banjir dengan besar kendali 29,94 juta m² (banjir Paya Bakong, Pirak Timu, Matangkuli, Lhoksukon, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Lapang) serta tempat rekreasi dan olah raga. Luas daerah genangan waduk ini direncanakan kurang lebih 710 Ha.

6. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan berdasarkan jenis bencana yang terjadi, yaitu :

1. Bencana longsor, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Gunci dan Gampong Riseh Teungoh (Kecamatan Sawang), Gampong Pase Sentosa (Kecamatan Geureudong Pase), Meunasah Leubok Kliet (Kecamatan Meurah

- Mulia), Gampong Meuria Matangkuli (Kecamatan Matangkuli), Gampong Alue Semambu (Kecamatan Cot Girek);
2. Bencana gelombang pasang, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye);
 3. Bencana banjir, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Binjee dan Gampong Blang Crok (Kecamatan Nisam), Gampong Ulee Nyeu (Kecamatan Bandar Baro), Gampong Meunasah Glong dan Gampong Keude Bayu (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Matang IX dan Gampong Punti (Kecamatan Matangkuli), Gampong Blang Gunci dan Gampong Teungoh Siron (Kecamatan Paya Bakong), Gampong Tanjong Putoh dan Gampong Paya Terbang (Kecamatan Tanah Luas), Gampong Blang Peuria (Kecamatan Samudera), Gampong Meucat (Kecamatan Syamtalira Aron), dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara);
 4. Bencana gempa bumi ; dan
 5. Bencana tsunami, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Pante Gurah dan Gampong Pulo Makmur dan Gampong Pulo Makmur (Kecamatan Muara Batu), Gampong Uteun Geulinggang, Gampong Kd. Krueng Geukeuh, Gampong Paloh Igeuh, dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara), Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen,

Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye).

7. Demografi

Penduduk Kabupaten Aceh Utara tahun 2011 berjumlah 541.878 jiwa yang terdiri dari 268.357 penduduk laki-laki dan 273.521 penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk 2,48 % per tahun. Berdasarkan luas wilayah sebesar 3.296,86 km², maka kepadatan penduduk mencapai 164 jiwa/km².

Tabel 4.2. Tabel Perkembangan Distribusi Penduduk

Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2007 – 2011

No.	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Sawang	31.678	32.080	32.508	33.748	34.521
2	Nisam	15.998	16.158	16.328	17.115	17.235
3	Nizam Antara	11.773	11.891	12.017	12.096	12.277
4	Banda Baro	7.402	7.476	7.555	7.377	7.415
5	Kuta Makmur	21.250	22.181	23.266	22.028	22.339
6	Simpang Kramat	6.691	6.793	8.429	8.710	8.824
7	Syamtalira Bayu	17.903	18.734	18.579	18.955	19.046
8	Geureudong Pase	4.322	3.705	4.291	4.448	4.550
9	Meureuh Mulia	16.766	16.938	17.121	17.612	17.881
10	Matang Kuli	15.735	15.942	16.163	16.424	16.803
11	Paya bakong	11.804	12.213	12.675	12.690	12.875
12	Pirak timu	6.806	6.896	6.992	7.413	7.520
13	Cot Girek	18.225	18.669	19.006	18.342	18.762
14	Tanah Jambo Aye	40.128	41.133	40.368	39.141	40.472
15	Lengkehah	18.574	18.908	19.268	20.938	21.221
16	Seunuddon	23.352	24.240	25.254	23.267	23.476
17	Baktiya	31.285	31.652	32.043	32.465	33.514
18	Baktiaya Barat	16.902	17.344	17.829	16.943	17.334
19	Lhosukon	44.212	45.257	46.217	43.998	45.472
20	Tanah Luas	21.074	21.409	21.768	22.037	22.601
21	Nilpong	9.346	9.474	9.610	9.047	9.247
22	Samudera	22.508	23.011	23.558	24.389	25.099
23	Syamtalira Aron	15.789	15.961	15.616	16.456	16.833
24	Tanah Pasir	7.956	8.404	8.639	8.376	8.431
25	Lapang	8.414	8.368	8.352	7.909	8.075
26	Muara Batu	24.818	25.592	24.480	24.385	25.179
27	Dewantara	45.263	46.277	44.605	43.442	44.876
	Jumlah	515.974	526.706	532.537	529.751	541.878

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Lhoksukon mencapai 45.472 jiwa dan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.137 jiwa/km², sedangkan jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase mencapai 4.550 jiwa dan 17 jiwa/km². Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar Jalan Nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) untuk masing-masing kecamatan sangat bervariasi. Kecamatan Tanah Jambo Aye memiliki LPP terbesar mencapai 3,68 % dan LPP terkecil berada pada Kecamatan Syamtalira Bayu mencapai 0,52 %.

Penduduk menurut kelompok umur dengan komposisi yaitu 33 % berada pada usia 0 – 14 tahun, 63 % pada usia 15 – 64 tahun dan 4 % pada usia 65 tahun ke atas. Berdasarkan komposisi tersebut, maka piramida penduduk Kabupaten Aceh Utara tergolong ke dalam kelompok ekspansif karena sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Penelitian

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hasil penelitian ini, terlebih dahulu kita perlu mengenal dan mengetahui karakteristik yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner ini adalah 108 orang responden yang mewakili setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi sampel yang akan diteliti. Lebih lanjut, responden dikelompokkan berdasarkan : Nama, Jenis Kelamin, Umur, Pekerjaan dan asal

Kecamatan responden tersebut. Untuk jelasnya tentang karakteristik responden, diperlihatkan pada lampiran tabel frequencies hasil olahan data dengan menggunakan SPSS versi 20 for Windows halaman 151.

2. Hasil analisis kuesioner

a. Hasil analisis validitas variabel pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara.

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui kesahihan atau kecocokan angket atau kusioner untuk menjaring data kuantitatif yang dibutuhkan. Jika terdapat r hitung ($>$) r tabel dengan taraf signifikan α sebesar 5% (0,05) dan 1% (0,01) disebut valid. Dengan taraf tersebut maka instrument dinyatakan valid. Nilai r hitung diambil dari output SPSS . Sedangkan nilai r tabel dengan $n= 108$, diambil dari tabel nilai-nilai r product moment.

Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas kuesioner adalah:

- Jika r hitung $>$ r tabel, maka butir –butir kuesiner tersebut dikatakan valid.
- Jika r hitung $<$ r tabel maka butir –butir kuesiner tersebut dikatakan tidak valid. (Sumber : Sugiyono,2008, Statika Untuk Penelitian)

Keabsahan atau kesahihan hasil penelitian sangat ditentukan oleh data diperoleh dari alat ukur yang digunakan. Untuk menguji apakah alat ukur (instrument) yang digunakan memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik, maka perlu dilakukan pengukuran sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan apa yang diukur, sebelum dilakukan uji coba kuesioner dengan sampel responden sebanyak 108 orang. Dari data yang terkumpul dilakukan validitas dan reliabilitas. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas dapat disajikan pada uraian

berikut. Instrumen untuk variabel pembangunan dan pelayanan publik terdiri dari 10 pernyataan, jika dibandingkan dengan r tabel = 0.187 akan tampak dalam kesimpulan. Hasil perhitungan menunjukkan seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Variabel Pembangunan Dan Pelayanan Publik (X)

Dimensi	Item Pernyataan	Korelasi (r hitung)	r Tabel	Kesimpulan
Kemampuan Anggaran	1	0.900	0.187	Valid
	2	0.599	0.187	Valid
	3	0.872	0.187	Valid
Sumber Daya Manusia (SDM)	4	0.536	0.187	Valid
	5	0.434	0.187	Valid
	6	0.411	0.187	Valid
	7	0.569	0.187	Valid
	8	0.755	0.187	Valid

	9	0.503	0.187	Valid
	10	0.596	0.187	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2016

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam instrumen variabel pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara dapat dikatakan valid, sebab ke-10 pertanyaan/pernyataan tersebut nilai r hitung yang didapat $> r$ tabel. Maka instrumen tersebut dikatakan memiliki validitas atau layak digunakan sebagai instrumen penelitian dan memiliki taraf nilai signifikansi α sebesar 5% (0,05) . Ini berarti bahwa setiap item pernyataan ini dapat digunakan untuk mengukur pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara pada dimensi anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). (*Sumber : Peno Suryanto, Modul Pelatihan Analisis Data, diunduh dari [#### b. Hasil analisis validitas variabel peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.](https://www.scribd.com/doc/33059509/Analisis-Validitas-dan-Reliabilitas-Instrumen.</i>)</p>
</div>
<div data-bbox=)*

Jika dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,187 dengan menggunakan sampel sebanyak $N=108$, Maka Instrumen untuk variabel peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 5 pernyataan, dapat dilihat hasil perhitungannya seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Peranan Dinas Bina Marga (Y)

Dimensi	Item Pernyataan	Korelasi (r hitung)	r Tabel	Kesimpulan
Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan	1	0.615	0.187	Valid
	2	0.710	0.187	Valid
	3	0.656	0.187	Valid
	4	0.713	0.187	Valid
	5	0.750	0.187	Valid

Berdasarkan Tabel 4.4. di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam instrumen variabel peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara adalah valid, sebab ke-5 pertanyaan/pernyataan tersebut nilai r hitung yang didapat $>$ r tabel. Maka instrumen tersebut dikatakan memiliki validitas atau layak digunakan sebagai instrumen penelitian dan memiliki taraf nilai signifikansi α sebesar 5% (0,05) . Ini berarti bahwa item-item pernyataan ini dapat digunakan untuk peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara pada dimensi pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Utara.

c. Hasil analisis pengujian reliabilitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara (X).

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan metode belah dua *split-half*

dengan hasil yang disajikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara dengan peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara

No	Variabel	Cronbach's Alpha	r Tabel	Nilai Kehandalan	Keterangan
I	Pembangunan dan pelayanan publik kabupaten Aceh Utara	0, 653	0, 187	> 0, 60	Reliabel
	1. Anggaran	0, 687	0, 187	> 0, 60	Reliabel
	2. Sumber Daya Manusia (SDM)	0, 619	0, 187	> 0, 60	Reliabel
II	Peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara	0,719	0,187	> 0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2016

Berdasarkan Tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan dalam instrumen variabel peranan Dinas Bina Marga dengan pembangunan publik dan pelayanan publik adalah reliabel. Dasar penentuan uji reliabilitas kuesioner penelitian ini mengacu kepada kriteria yang ditetapkan Barker, et. al. (2002:70) yang mengatakan apabila nilai skor yang diperoleh di atas 0,6 sebagai nilai batas suatu instrumen penelitian maka instrument penelitian itu reliable (dapat diterima /cukup baik). Selanjutnya oleh Sekaran (2000:312) juga membagi tingkatan reabilitas dengan ketentuan Conbach Alpha > 0,6 suatu reabilitas yang dapat diterima (Sumber : Data Riset, diunduh dari

<http://datariset.com/olahdata/detail/olah-data-jogja-uji-instrumen>). Dan dengan adanya uji reliabilitas ini maka diperoleh informasi bahwa jawaban responden terhadap kuesioner memperlihatkan kekonsistenan, sehingga hasil perolehan skor jawaban kuesioner dapat dipergunakan dan dianalisis lebih lanjut.

D. Analisis deskriptif variabel penelitian

Dalam sub bab ini akan disajikan dua analisis yaitu analisis statistik kuantitatif. Analisis deskriptif peneliti menyajikan gambaran menyeluruh sesuai dengan objek penelitian dan teori yang dijadikan rujukan untuk diuji melalui data empiris yang diperoleh atas dasar hasil penyebaran kuesioner. Pendeskripsian dan analisis variabel didasarkan pada akumulasi berbagai dimensi dan indikator, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan analisis data primer maupun sekunder. Pengukuran atas variabel-variabel penelitian ditentukan berdasarkan penilaian sikap, persepsi atau pandangan responden terhadap setiap item pertanyaan yang diajukan kemudian data diolah dalam bentuk tabulasi frekwensi.

Untuk mengetahui kondisi variabel yang diamati maka dilakukan pengukuran melalui penyebaran angket. Angket variabel X (pembangunan dan pelayanan publik) dan Y (Peranan Dinas Bina Marga) seluruhnya 15 pertanyaan yang masing-masing disertai 4 pilihan dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil jawaban responden yang merupakan skor untuk setiap item yang diperoleh dari jumlah nilai setiap item pertanyaan merupakan akumulatif jawaban dari 108 responden, selanjutnya dikelompokkan kriteria penilaian yang menguatkan rentang skor ideal sebagai berikut :

Dengan jumlah responden = 108 orang, nilai skala pengukuran terbesar = 4, sedangkan skala pengukuran terkecil = 1, sehingga diperoleh nilai terbesar jumlah kumulatif = $108 \times 4 = 432$ dan nilai terkecil jumlah kumulatif = $108 \times 1 = 108$.

1. Rentang skor maksimum dan minimum adalah $432 - 108 = 324$.
2. Range skor untuk setiap kategori adalah $324 / 4 = 81$

Dari uraian di atas, dapat kita lihat besaran hasil penilaian skor pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) seperti terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 4.6
Rekapitulasi Penilaian Berdasarkan Rata-Rata Skor (Variabel X dan Y)**

No	Rentangan Skor	Kategori/Kualifikasi	Frekuensi/Total Skor Jawaban Responden	Persentase (%)
1	4	Sangat Setuju	3552	60,32
2	3	Setuju	2127	36,12
3	2	Kurang Setuju	206	3,5
4	1	Tidak Setuju	4	0,07

Sumber : Hasil Olahan Data,2016

a. Variabel Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Utara.

Variabel pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 2 (Dua) dimensi yaitu kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Variabel ini diukur dengan 10 item pertanyaan kuesioner. Berdasarkan penyebaran kuesioner untuk setiap dimensi variabel (X) diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Utara

No	Variabel/Dimensi/Pernyataan	Frekuensi/Total Skor	Jumlah Item	Persentase (%)
1	Kemampuan Anggaran	1164	3	100
	Sangat setuju	826		71,13
	Setuju	306		26,29
	Kurang Setuju	30		2,58
	Tidak Setuju	0		0
2	Sumber Daya Manusia (SDM)	2559	7	100
	Sangat setuju	1500		58,62
	Setuju	903		35,29
	Kurang Setuju	152		5,94
	Tidak Setuju	4		0,16
X	Pembangunan Dan Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Utara	3723	10	100
	Sangat setuju	2328		62,53
	Setuju	1209		32,47
	Kurang Setuju	182		4,89
	Tidak Setuju	4		0,11

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Bila diinterpretasikan Tabel 4.7 di atas, Sebanyak 95% responden setuju/sangat setuju bahwa kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum sangat mempengaruhi dan belum maksimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. (*Frequency Jawaban Kuesioner , hal.153 Terlampir*).

Menelaah terhadap peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten Aceh Utara, tidak lepas dari berbagai faktor pendukung yang sangat mempengaruhi kinerja Dinas Bina Marga itu sendiri. Faktor ketersediaan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan dua satu faktor kunci selain faktor lainnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Bina Marga dalam mendukung berbagai sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Aceh Utara.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlunya berbagai pihak yang terkait untuk menyingkapi dan menkondisikan penyediaan anggaran dalam mendukung keberhasilan Dinas Bina Marga dalam meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Utara guna mendukung aspek fisikologis maupun non-fisikologis masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

a. Sub Kemampuan Anggaran.

Salah satu dimensi pembangunan dan pelayanan publik adalah kemampuan anggaran. Dari penyebaran kuisioner, dan tanggapan dari sampel responden yang mewakili berbagai Kecamatan di Aceh Utara terhadap ketiga pernyataan pada dimensi tersebut, hampir 98 % (97,42%) menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap kemampuan anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara, belum memadai untuk mendukung peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Utara.

Dengan kemampuan anggaran yang tersedia, tingkat kerusakan jalan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan untuk meningkatkan/memelihara jaringan jalan yang ada (Wasike. 2001). Kondisi ini terjadi akibat jumlah anggaran yang dimiliki pemerintah sangat terbatas (Brown. 1990, Heng. 2007)

b. Sub Sumber Daya Manusia (SDM)

Dimensi lain dari pembangunan dan pelayanan publik adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Tingkat kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Bina Marga masih sangat perlu ditingkatkan. Hal ini bisa dibuktikan dari penyebaran kuisioner, hampir 94% (93,90%) yang menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan bahwa Quantitas dan qualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bina Marga masih belum sepenuhnya mampu untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dikabupaten Aceh Utara. Dan ini bisa dimungkinkan juga karena ada faktor penempatan pegawai yang masih tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh sejumlah pegawai. Untuk pernyataan ini 96% setuju dan sangat setuju terhadap kondisi yang ada di Bina Marga sekarang. Selanjutnya, untuk pelayanan publik lainnya, berdasarkan angket/kuisioner Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara sudah menunjukan hasil yang baik dalam hal melayani masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai, sumber daya manusia sebagai salah satu unsur masukan (*input*) yang nantinya akan diubah menjadi keluaran (*output*) berupa barang atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai *input*, sumber daya manusia tidak dapat menjadi unsur tunggal, melainkan harus dikombinasikan pula bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, metode dan juga teknologi.

b. Variabel Peranan Dinas Bina Marga.

Dimensi utama dari variabel peranan Dinas Bina Marga yaitu pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan. Nilai hasil dari penyebaran kuesioner untuk

setiap dimensi dalam variabel peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara, dapat diperlihatkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8
Peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara

No	Variabel/Dimensi/Pernyataan n	Frekuensi/ Total Skor	Jumlah Item	Persentase (%)
1&2	Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan	1914	5	100
	Sangat setuju	1224		63,95
	Setuju	666		34,80
	Kurang Setuju	24		1,25
	Tidak Setuju	0		0
Y	Peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara	1914	5	100
	Sangat setuju	1224		63,95
	Setuju	666		34,80
	Kurang Setuju	24		1,25
	Tidak Setuju	0		0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2016

Bila diinterpretasikan Tabel 4.6 di atas , hampir 99% responden setuju dan sangat setuju pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan belum mampu sepenuhnya menunjang peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten Aceh Utara.

Terhadap hal yang tersebut di atas, Dinas Bina Maarga akan mengalami kendala yang serius dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di

Kabupaten Aceh Utara. Hal ini disebabkan, dimensi utama yang menjadi tupoksi utama Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara belum bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Karena kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran yang menjadi dimensi pada variabel (X) belum memadai sebagaimana yang direncanakan.

Dimensi pembangunan dan pemeliharaan jalan sangat dipengaruhi oleh kekuatan anggaran dan Sumber Daya manusia (SDM) dalam meningkatkan target kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.

A,b) Sub variabel Pembangunan Dan Pemeliharaan Jaringan Jalan

Dimensi pembangunan jalan adalah salah satu penggerak Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Dengan adanya kinerja yang terus meningkat pada pembangunan jalan, akan sangat berpengaruh kepada sektor-sektor sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Terutama sektor yang berhubungan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat pedalaman, dan juga dapat mengurangi dari pada kemiskinan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Dengan beban kerja yang ada, kemampuan anggaran yang kurang memadai menjadi suatu hambatan bagi Dinas Bina Marga dalam menjalankan seluruh visi dan misi seperti yang tersebut pada Bab II terdahulu. Dan sebagaimana besar jaringan jalan tersebut, adalah masih terdapat jalan tanah yang sulit untuk dilalui pada musim penghujan, serta tidak dipelihara secara teratur akibat terbatasnya kapasitas perencanaan dan terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia (Donnges. 2007, Leyland. ----). Konsekuensinya, sebagian kawasan perdesaan relatif terisolasi dan tidak dapat diakses dengan mudah. Kondisi ini kemudian

menyebabkan terhambatnya upaya pengembangan ekonomi perdesaan karena tingkat aksesibilitas wilayah yang rendah menyebabkan komoditas pertanian yang merupakan produk utama kawasan perdesaan menjadi tidak kompetitif untuk dipasarkan serta menyebabkan upaya penyediaan infrastruktur dasar lainnya menjadi terhambat.

Selanjutnya, dalam pemeliharaan jaringan jalan Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi kendala adalah ketersediaan jumlah alat berat yang sangat terbatas dalam pemeliharaan jalan secara rutin maupun berkala. Sehingga mengakibatkan kondisi jalan yang telah dibangun akan menjadi sia-sia, dan mengalami kerusakan kembali untuk beberapa periode tahun berjalan. Hal ini juga menjadi bumerang bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara karena akan terus memikirkan anggaran yang besar untuk lokasi yang sama pada beberapa tahun berikutnya.

Dalam penyebaran kuisioner, menunjukkan hasil yang tidak mengejutkan bahwa masyarakat beranggapan bahwa Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara belum menunjukkan peran yang maksimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Dan Hampir 99% (98,75%) responden menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan yang terdapat dalam kuisioner. (*Lampiran Hasil Perhitungan 153-163 Terlampir*).

4.3. Pengujian hipotesis

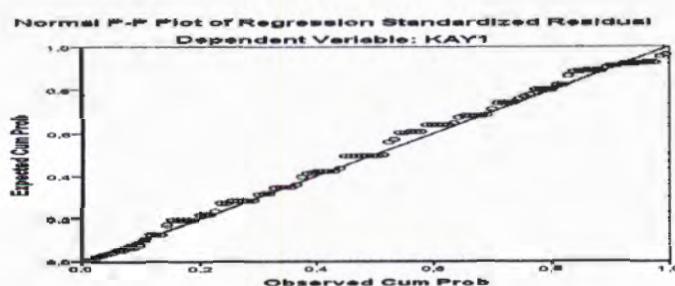
A. Pengujian statistik simultan (secara total/serentak).

Sebagaimana disajikan pada bab III terdahulu, penelitian ini akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi ganda, tetapi sebelum sampai kepada pengujian hipotesis peneliti akan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Sebab aturan menggunakan regresi ganda apabila data yang diperoleh

diasumsikan memenuhi (1). normalitas, (2). heteroskedastisitas, (3). multikolinearitas (4). Autokorelasi. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji kebenaran model regresi linier berganda yaitu pengaruh pembangunan dan pemeliharaan jalan terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Untuk dapat menggunakan regresi berganda, maka data yang digunakan harus memenuhi persyaratan asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Asumsi-asumsi tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

1). Uji normalitas.

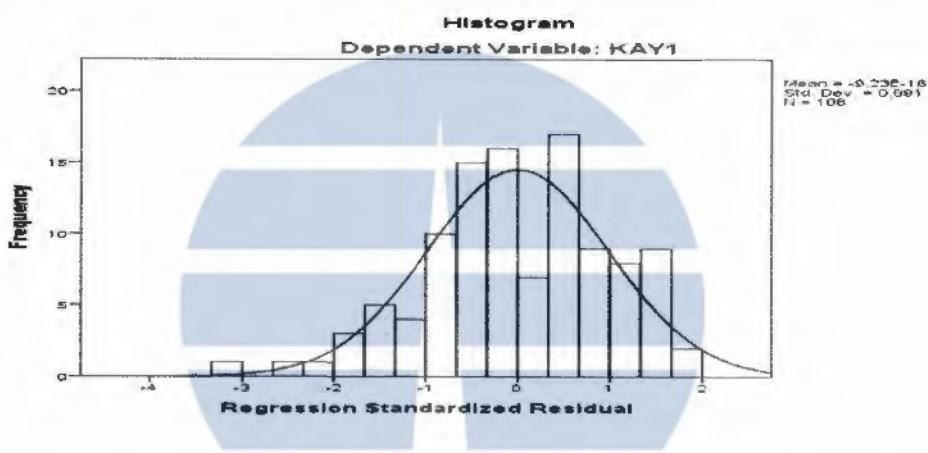
Normalitas dalam statistik parametrik seperti regresi dan Anova merupakan syarat pertama. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau bias terutama untuk populasi kecil yaitu sebanyak 108 orang wakil Musrembang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu melalui pendekatan grafik (histogram dan P-P Plot) atau uji kolmogorov-smirnov, chi-square, Liliefors maupun Shapiro-Wilk. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran data *print out* dibawah ini:



Gambar 4.7

Uji Normalitas Variabel Peranan Dinas Bina Marga
Sumber: Data Primer, 2016 Diolah

Gambar 4.7 di atas, menunjukkan nilai-nilai sebaran error yang berupa dot terletak di sekitar garis lurus dan tidak terpencar jauh dari garis lurus maka disimpulkan bahwa persyaratan asumsi normalitas terpenuhi, artinya uji regresi ganda tentang variabel peranan Dina Bina Marga Kabupaten Aceh Utara layak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, bila dilihat dari data dari distribusi sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.8
Histogram Uji Normalitas Data Variabel Y
Sumber: Data Primer, 2016 Diolah

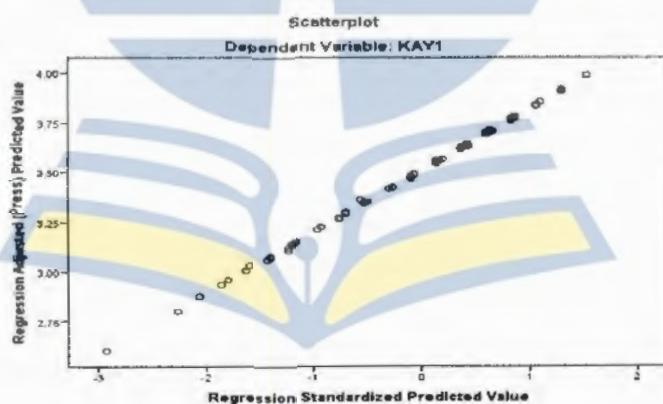
Histogram pada gambar 4.8 di atas, menjelaskan bahwa data distribusi nilai residu (error) menunjukkan bahwa data berdistribusi normal yang diperlihatkan oleh garis lengkung berbentuk bel. Dengan demikian pada gambar 4.7 dan 4.8 memberi kesimpulan bahwa residu dari model dianggap berdistribusi normal. Kedua gambar tersebut menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas dalam penelitian ini.

2. Uji heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Pada model yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari model *Scatterplot* model tersebut.

Jika model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian, jika output *Scatterplot* menunjukkan penyebaran titik-titik data yang tidak berpola jelas, serta titik-titik yang menyehar. Pendekatan lain untuk pengujian heteroskedastisitas adalah dengan pendekatan statistik. Gambar 4.9 dibawah ini menunjukkan bahwa model regresi bahwa residu yang ada mempunyai varians yang konstan dan regresi tidak terlihat residu meningkat atau menurun dengan pola tertentu. Grafik memberi makna bahwa tidak ada heterokedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar *scatterplot* berikut ini :



Gambar 4.9

Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Primer, 2016 Diolah

3. Uji multikolinearitas.

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara satu variabel dependent dengan variabel independent bersifat linier dalam model regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam uji multikolinearitas adalah tidak

terjadi masalah multikolinearitas apabila nilai VIF dibawah 10 dan sebaliknya jika nilai VIF melebihi angka 10, maka disimpulkan telah terjadi multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandar	Standardi	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	dized Coefficien	zed Coefficient				Zero-order	Partial	Part	Toleran
	Std. Error	Beta							VIF
(Const ant) ¹	,358	,191		1,878	,063				
KAX1	,402	,046	,497	8,795	,000	,716	,651	,449	,817
KAX2	,504	,056	,511	9,051	,000	,724	,662	,462	,817
									1,224

a. Dependent Variable: KAY1

Sumber : Data Primer, 2016 Diolah

Berdasarkan gambar pada tabel 4.9 diketahui nilai VIF kurang dari 10 atau hanya berada pada kisaran maksimal 1.224, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas atau masih bisa ditoleransi. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh antara satu variabel dependent peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara terhadap variabel Independet yaitu pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara bersifat linier dalam model regresi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi multikolinearitas terpenuhi.

4. Uji autokorelasi.

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari uji Durbin-Watson standar untuk menentukan adanya atau tidaknya autokorelasi secara umum adalah:

(1)Angka DW = 2 berarti autokorelasi positif

- (2) Angka DW < 1.5 berarti ada gejala autokorelasi
- (3) Angka DW diantara 1.5 – 2.5 berarti tidak ada autokorelasi
- (4) Angka DW diatas > 2 – 4 berarti ada autokorelasi negatif

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

**Tabel 4.10
Uji Autokorelasi Variabel X terhadap Variabel Y**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,852 ^a	,726	,721	,19213	1,820

a. Predictors: (Constant), KAX2, KAX1
 b. Dependent Variable: KAY1

Sumber : Data primer, 2016 diolah

Dari tabel 4.10 di atas, didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 1,820. Pengukuran di atas berdasarkan variabel Y sebagai variabel dependennya. Karena nilai DW (Durbin-Watson) berada diantara 1.000 – 2,000 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memperlihatkan adanya gejala otokorelasi. Dengan demikian berdasarkan asumsi-asumsi statistik di atas, maka alat uji regresi ganda yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi yang diharapkan. Karena itu pengujian hipotesis menggunakan regresi ganda dapat dilanjutkan pada uraian berikut.

5. Regresi linier berganda.

Regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen (bebas) berskala kuantitatif terhadap satu variabel dependen (tidak bebas). Dimensi pada variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan anggaran (X_1), dan Sumber Daya Manusia (X_2). Sementara variabel dependen Y yaitu peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Regresi

linier berganda ini juga digunakan untuk mengetahui apakah peranan Dina Bina Marga dimasa akan datang akan bisa diramalkan oleh faktor kemampuan anggaran (X_1) dan Sumber Daya Manusia (X_2).

Adapun persamaan regresi berganda yaitu $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$. Lebih jelasnya, hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut.

**Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	,358	,191		,063
	KAX1	,402	,046	,497	,000
	KAX2	,504	,056	,511	,000

a. Dependent Variable: KAY1

Dari tabel 4.12 di atas maka persamaan regresi yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah : Peranan Dinas Bina Marga (Y) = $0,358 + 0,402X_1 + 0,504X_2$ persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a). Y = Konstanta = 0,358 ini menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X_1 , X_2 bernilai nol. Artinya, apabila kemampuan anggaran dan Sumber Daya manusia (SDM) tidak mampu mengimplementasikan X_1 , X_2 , maka peranan Dina Bina Marga Kabupaten Aceh Utara yang dihasilkan akan tetap ada sebesar 0,358. Misalnya, ketidakmampuan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan di kabupaten Aceh Utara dengan berbagai kendala, maka peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara tidak akan berubah atau tetap sebesar 0,358. Sebaliknya, apabila pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara mampu mengimplementasikan X_1 , X_2 , dengan baik maka peranan

Dinas Bina Marga akan bertambah atau mengalami kenaikan sebesar 0,358.

Meski demikian peranan Dinas Bina Marga masih ada juga variabel lain yang tidak terdeteksi ($\epsilon/\text{epsilon}$) yang turut mempengaruhinya. Misalnya, sisi kepemimpinan, lingkungan kerja, perencanaan, pengawasan dan lain-lain.

- b). Koefisien regresi X_1 (Kemampuan Anggaran) = 0,402. Artinya, apabila terdapat peningkatan variabel kemampuan anggaran sebesar satu satuan sementara variable independen lainnya tetap maka penyelenggaraan peranan Dinas Bina Marga akan mengalami peningkatan sebesar 0,402.
- c). Koefisien regresi X_2 (Sumber Daya Manusia) = 0.504. Artinya, apabila terdapat peningkatan variabel Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar satu satuan , sementara variabel independen lainnya tetap maka peranan Dinas Bina Marga akan mengalami peningkatan sebesar 0.504.

6. Uji koefisien determinasi (R^2).

Pengujian koefisien determinasi atau R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel Independen yaitu kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menjelaskan variabel dependen (Y) yaitu peranan Dinas Bina Marga . Hasil perhitungan koefisien determinasi atau R.square (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,852 ^a	,726	,721	,19213

a. Predictors: (Constant), KAX2, KAX1
 b. Dependent Variable: KAY1

Sumber : Data Primer, 2016 Diolah

Dari hasil perhitungan untuk nilai R^2 dalam analisis regresi berganda di atas maka diperoleh angka koefisien determinasi R.square atau R^2 sebesar 0,726, artinya 72,60% variasi variable kemampuan anggaran (X_1), dan Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2), dapat menerangkan variasi variabel Peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara. Atau peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara dipengaruhi oleh kemampuan anggaran (X_1), Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2), sebesar 72,60%. Sedangkan sisanya 27,40% dijelaskan oleh variabel residualnya atau variabel lain yang tidak diteliti (epsilon) dalam penelitian ini, misalnya lingkungan kerja, perencanaan, pengawasan, kepemimpinan dan lain-lain.

Adanya peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh siapa Imam Ghazali (thn 2005) dalam tesisnya yang berjudul "Analisa Pengaruh partisipasi Anggaran Manajerial melalui Komitment Tujuan Anggaran Dan Job Relevant Information (JRI) sebagai Variabel Intervebing (Penelitian terhadap perusahaan Manufaktur di Indonesia) (2005). Faktor-faktor dimaksud adalah anggaran dan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruhnya terhadap kinerja manajerial Job Relevant Information (JRI) (di unduh dari [https://www.scribd.com/doc/12782530/Kamp-06-Analisis --- Pengaruh --- Partisipasi - Anggaran- Terhadap-Kinerja](https://www.scribd.com/doc/12782530/Kamp-06-Analisis---Pengaruh---Partisipasi---Anggaran---Terhadap-Kinerja). Dan penelitian Khatmi & Mutia, Tahun 2012, tentang Pengaruh Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gayo Lues, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas pembangunan jalan dan

jembatan. Secara parsial yaitu: pelayanan publik berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas pembangunan jalan dan jembatan. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas pembangunan jalan dan jembatan. Efektivitas jalan dan jembatan mempengaruhi pengembangan wilayah disebabkan adanya akses masyarakat dalam perdagangan, pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian jika dikaitkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian dengan peneliti terdahulu tampak ada pengaruh kuat peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya bila diamati hasil perhitungan setiap dimensi pembangunan dan pelayanan publik , tampak dimensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kesuksesan pembangunan dan pelayanan publik adalah dimensi kemampuan anggaran menjadi urutan pertama. Artinya, kemampuan anggaran merupakan juru kunci untuk mensukseskan atau meningkatkan kinerja Dinas Bina Marga yang memiliki dimensi pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan berbagai sektor lainnya dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian hipotesis berdasarkan Bab II pada uraian berikut ini.

4.4. Pengujian hipotesis secara parsial (satu persatu).

Sebagaimana disajikan pada Bab II terdahulu bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada dua faktor dimensi variabel bebas yang mempengaruhi variabel peranan Dinas Bina Marga kabupaten Aceh Utara, kedua faktor tersebut akan diuji satu persatu.

1) Pengaruh variabel kemampuan anggaran (X_1) terhadap peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara (Y).

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kemampuan anggaran terhadap peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara maka dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \rho X_1 Y = 0$ Tidak terdapat pengaruh kemampuan anggaran terhadap peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.

$H_1 : \rho X_1 Y > 0$ Terdapat pengaruh kemampuan anggaran terhadap peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.

Kriteria pengujian menggunakan alat uji t apabila:

(a). Jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $108-3-1 = 1.982$ maka H_0 diterima. Artinya ada pengaruh sub variabel bebas yaitu X_1 terhadap Y.

(b). Jika $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $108-4-1 = -1.982$ maka H_0 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh sub variabel bebas yaitu X_1 , terhadap Y.

Selanjutnya jika dilakukan perhitungan dimana nilai t_{hitung} variabel komunikasi sebesar $8,795 > 1,982$ dengan nilai signifikan (0.00), Artinya dimensi kemampuan anggaran mempunyai pengaruh terhadap peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Hal ini membuktikan bahwa pengujian hipotesis pertama yang diajukan di Bab II menyatakan terdapat pengaruh antara kemampuan anggaran terhadap peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara benar dan terbukti.

2). Pengaruh variabel Sumber Daya Manusia (X2) terhadap peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara (Y).

untuk mengetahui apakah ada pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap peranan Dinas Bina Marga di kabupaten Aceh Utara, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \rho X_2 Y = 0$ Tidak terdapat pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap peranan Dinas Bina Marga di kabupaten Aceh Utara.

$H_1 : \rho X_2 Y > 0$ Terdapat pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap peranan Dinas Bina Marga di kabupaten Aceh Utara.

Kriteria pengujian menggunakan alat uji t apabila:

a. Jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $108-4-1 = 1.982$ maka H_0 diterima. Artinya ada pengaruh sub variabel bebas yaitu X_2 , terhadap Y .

b. Jika $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} dengan $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas yaitu $n-k-1$ yaitu $108-4-1 = 1.982$ maka H_0 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh sub variabel bebas yaitu X_2 , terhadap Y .

Selanjutnya, jika dilakukan perhitungan dimana nilai t_{hitung} variabel Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar $9,051 > 1.982$ signifikan (bermakna dengan skor 0,00). Artinya dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai pengaruh terhadap peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini membuktikan bahwa pengujian hipotesis pertama yang diajukan di Bab II menyatakan terdapat pengaruh antara Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara, benar dan terbukti.

(*Distribusi Nilai T tabel halaman... Terlampir*), (Sumber : Media Internetan)

4.4. Uji variabel pakai tabel anova atau uji simultan (F_{test})

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pembangunan dan pelayanan publik kabupaten Aceh Utara beserta dimensi-dimensinya yang meliputi dimensi kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara bersama-sama dalam mempengaruhi peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- $H_0 : b_1, b_2, = 0$, berarti tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama dari seluruh dimensi kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap variabel tidak bebas Y peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara.
- $H_0 : b_1, b_2 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama dari seluruh dimensi kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap variabel tidak bebas Y peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitasnya F signifikan $> 0,05$
- H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitasnya nilai F signifikan $< 0,05$

Selanjutnya, tentang uji F ini, oleh Anwar Hidayat, Tahun 2013, (Sumber : Media Internetan) juga mengungkapkan hal yang sama tentang uji F ini.

Hasil uji F dapat dilihat pada tampilan data *print out* berikut ini:

Tabel 4.13
Hasil uji

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,278	2	5,139	139,209
	Residual	3,876	105	.037	
	Total	14,154	107		

a. Dependent Variable: KAY1

b. Predictors: (Constant), KAX2, KAX1

Sumber : Data Primer, 2016 Diolah

Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.13 di atas didapatkan hasil perhitungan untuk nilai F_{hitung} sebesar $139,209 > F_{tabel}$ sebesar 3,086 (signifikan). Artinya, terdapat pengaruh secara bersama-sama atau serentak dimensi kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Aceh Utara dalam artian model regresi ganda ini cukup baik digunakan untuk menghitung pengaruh kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan statistik dan kriteria keputusan penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti pada bab terdahulu adalah **terbukti dan dapat diterima**. (*Distribusi Nilai F tabel halaman,,, Terlampir*), diunduh dari <http://www.konsistensi.com/>

C. Pembahasan

1. Penelitian Secara Kuesioner (Quantitatif)

Sebagaimana dicermati hasil perhitungan statistik diatas yang menunjukkan ada pengaruh variabel anggaran sebesar 8,795 dengan nilai signifikan (0.00). Artinya dimensi kemampuan anggaran mempunyai pengaruh terhadap peranan

Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara. Demikian juga pengaruh variabel Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 9,051 dengan nilai signifikan (0,00), Artinya dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai pengaruh terhadap peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, bila dicermati secara keseluruhan hasil perhitungan untuk nilai F_{hitung} sebesar $139,209 > F_{tabel}$ sebesar 3,086 (signifikan). Artinya, terdapat pengaruh secara bersama-sama atau serentak dimensi kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.

Dari hasil pengaruh tersebut baik parsial (satu persatu) maupun simultan (bersama-sama) tampak bahwa dimensi yang terdapat dalam variabel pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sangat mempengaruhi terhadap peranan Dinas Bina Marga kabupaten Aceh Utara sebesar 72,60%. kemampuan anggaran (X_1), dan Sumber Daya Manusia (SDM), memberikan kontribusi sebesar 72,60%. Sedangkan sisanya 27,40% dijelaskan oleh variabel residualnya atau variabel lain yang tidak diteliti (epsilon) dalam penelitian ini, misalnya pengaruh lingkungan, perencanaan, pengawasan, kepemimpinan dan lain-lain. Artinya, dimensi dalam variabel pembangunan dan pelayanan publik sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan dimensi pembangunan dan pemeliharaan jalan sebagai dimensi dalam variabel dependent, yaitu peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.

Akhirnya, dari berbagai perhitungan, analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan sebelumnya, dapatlah dikemukakan bahwa ternyata dimensi

pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara yaitu kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai pengaruh sebesar sebesar 72,60% terhadap peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan sisanya sebesar 27,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengaruh lingkungan kerja, perencanaan, pengawasan, kepemimpinan dan lain-lain. Hal ini berarti, bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima dan didukung data.

2. Penelitian Secara Wawancara (Qualitatif)

Untuk lebih mempertegas terhadap jawaban dari setiap rumusan masalah yang telah disampaikan pada sub Bab I halaman 10 sebelumnya, dalam penelitian ini juga menggunakan instrumen wawancara atau penelitian secara qualitatif terhadap **Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dan beberapa tokoh masyarakat yang mewakili Kecamatan dalam acara Musrembang Kabupaten Aceh Utara** seperti uraian di bawah ini :

A. Peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara

Peranan bersinonim dengan ‘pengaruh’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘pengaruh’ berarti “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut. Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu

proses keberlangsungan (Hari Soegiman, 1990: 2). Sementara itu, Alvin L. Bertrand, seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu" (Soleman B. Taneko, 1986: 23). Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet (1985: 15), yang mendefinisikan peranan sebagai "sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto (1979:94) menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.Ibid., hal 23. Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang (John M. Echlos, 2000: 489).Ibid., hal 23. Dari beberapa pengertian 'peranan' di atas, dalam penelitian ini peranan didefinisikan sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses keberlangsungan. (Sumber : Media Internetan,Blog Spot Tahun 2010)

Dari pengertian peranan seperti diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu dinas teknis dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan di bidang jalan, jembatan, pemeliharaan, peralatan dan perbekalan bidang kebinamargaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini sesuai dengan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara secara eksplisit memuat tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas

Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Dan juga UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Sumber : Christy Marintan Sitorus, 2013).

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, yang mengatakan bahwa :

“Peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara adalah melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan (rutin dan periodik) antar Kecamatan, Kabupaten, pusat kegiatan, pariwisata dan translok serta akses keberbagai daerah terpencil lainnya untuk mencapai kondisi baik dan mantap jalan. Hal ini berguna untuk menunjang perekonomian masyarakat dari berbagai sektor seperti : pertanian, perkebunan dan perikanan yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Dan dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pembangunan sarana dan prasarana tersebut, maka akan semakin tinggi tingkat pelayanan publik yang baik di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara juga berperan dalam meningkatkan penambahan Pajak Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara melalui pengelolaan peralatan/alat berat dan perbekalan bidang kebinamargaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.”

Terhadap peran Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Utara, beberapa tokoh masyarakat yang mewakili kecamatan dalam acara Musrembang Kabupaten Aceh Utara, memberi tanggapan sebagai berikut :

“Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, belum bisa memberikan peran yang maksimal dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Utara. Karena masih banyak akses jalan dan jembatan ke daerah terpencil yang belum dibangun maupun dipelihara dengan baik oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.”

B. Kendala Yang Dihadapi Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara

Untuk mendukung peran Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dalam pembangunan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya capaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Utara. Adapun faktor utama tersebut adalah anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, disamping faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pengaruh lingkungan, perencanaan, pengawasan, dan strategi kepimpinan.

1. Anggaran

Menurut Warsito, Tahun 2005, Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis; yang meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter, dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Sedangkan Mardiasmo (2002:61) menyatakan bahwa “anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”.

Terhadap peran Dinas Bina Marga yang mempunyai 2 (dua) dimensi utama pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, anggaran sangat mempengaruhi terhadap target kinerja Dinas Bina Marga dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara. Karena secara umum, kondisi fisik jaringan jalan pada kawasan perdesaan di banyak negara berkembang relatif masih belum memadai (Donnges. 2007, Heng. 2007, Oraboune. 2008, Wasike.

2001). Sebagian besar jaringan tersebut adalah jalan tanah yang sulit untuk dilalui pada musim penghujan, serta tidak dipelihara secara teratur akibat terbatasnya kapasitas perencanaan dan terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia (Donnges, 2007, Leyland. ----). Konsekuensinya, sebagian kawasan perdesaan relatif terisolasi dan tidak dapat diakses dengan mudah. Kondisi ini kemudian menyebabkan terhambatnya upaya pengembangan ekonomi perdesaan karena tingkat aksesibilitas wilayah yang rendah menyebabkan komoditas pertanian yang merupakan produk utama kawasan perdesaan menjadi tidak kompetitif untuk dipasarkan serta menyebabkan upaya penyediaan infrastruktur dasar lainnya menjadi terhambat.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung tercapainya kualitas pembangunan dalam mendukung tingkat pelayanan publik yang baik, masalah yang tidak kurang pentingnya adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan. Ketersediaan anggaran yang memadai tidak akan memberikan dampak positif yang besar bagi penunjang pembangunan, bila kemampuan sumber daya manusia (SDM) pada instansi atau organisasi tersebut dalam memanfaatkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan masih sangat terbatas. Akibatnya, terjadi *bottlenecking* dalam suatu program/kegiatan. Oleh karena itu, permasalahan kapasitas organisasi dalam merekut sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu titik krusial yang harus diidentifikasi dalam proses pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik suatu daerah.

Menurut Susilo (2002:3) "sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya". "Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan", sebagaimana yang dikemukakan oleh David Ulrich (Mathis dan Jackson,2002:4). Maka dari itu, Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan (Tambunan,2003:15). "Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Sehingga bagian terpenting dari peningkatan nilai sumber daya manusia adalah dengan mendayagunakan semua bakat-bakat orang-orang yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi di luar organisasi. Disebabkan perubahan kependudukan tenaga kerja, manajemen sumber daya manusia harus memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang bervariasi. Ditambahkan, praktisi sumber daya manusia haruslah orang-orang yang meyakinkan semua tenaga kerja tanpa melihat latar belakang mereka, menyediakan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitas mereka "sebagaimana dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2002:29). Begitu juga dengan pemerintahan, apabila di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan daerah tersebut berjaya. Bagi perekonomian negara, kejayaan suatu pemerintahan akan menjadikan perekonomian suatu negara lebih baik. Oleh karena itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat

penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis (Kuratko dan Hodgetts, 1998:87). (Sumber : M.Arif Irsan,Tahun 2010)

3. Perencanaan Pembangunan

a) Pengertian Perencanaan

Perencanaan menurut Abe (2001) dalam Ovalhanif (2009) adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan yaitu: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, 4) atas-bawah (top-down), (5) bawah-atas (bottom-up).

1. Perencanaan Teknokrat

Menurut Suzetta (2007) adalah proses perencanaan yang dirancang berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dari pengamat professional, baik kelompok masyarakat yang terdidik yang walau tidak mengalami sendiri namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat disediakan pasar,

untuk menghasilkan perspektif akademis pembangunan. Pengamat ini bisa pejabat pemerintah, bisa non-pemerintah, atau dari perguruan tinggi. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, “perencanaan teknokrat dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu”.

2. Perencanaan Partisipatif

Menurut Sumarsono (2010), perencanaan partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subyek pembangunan. Menurut penjelasan UU. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: “perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki”. Dalam UU No. 25 Tahun 2004, dijelaskan pula “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

3. Perencanaan top down

Menurut Suzetta (1997) adalah proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga/departemen/daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.

4. Perencanaan bottom up

Menurut (www.actano.com) adalah planning approach starting at the lowest hierarchical level and working upward (pendekatan perencanaan yang dimulai dari tingkatan hirarkis paling rendah menuju ke atas).

Selain itu, menurut penjelasan UU 25 Tahun 2004, pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

b) TUJUAN PERENCANAAN

Tujuan perencanaan menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter dalam Wikipedia adalah (1) memberikan pengarahan yang baik; (2) mengurangi ketidakpastian; (3) meminimalisir pemborosan; (4) menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Tujuan perencanaan dari masing-masing proses perencanaan sebagai berikut:

1. Perencanaan teknokrat

Tujuannya untuk membangun perencanaan strategis dan perencanaan kontingensi, menetapkan ketentuan-ketentuan, standar, prosedur petunjuk pelaksanaan serta evaluasi, pelaporan dan langkah taktis untuk menopang organisasi (Tomatala, 2010).

2. Perencanaan partisipatif

Tujuannya agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui permasalahannya sendiri di lingkungannya, menilai potensi SDM dan SDA yang tersedia, dan merumuskan solusi yang paling menguntungkan.

3. Perencanaan top down

Tujuannya adalah untuk menyeragamkan “corak”, karena perencanaan top down menurut Djunaedi (2000) dalam kegiatan perencanaan kota dan daerah dilakukan dengan mengacu pada corak yang seragam yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan mengikuti “juklak dan juknis” (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis).

4. Perencanaan Bottom Up

Tujuan adalah untuk menghimpun masukan dari “bawah”, karena menurut Sumarsono (2010), apabila di Indonesia perencanaan bottom up dimulai dari tingkat desa, yang biasanya dihadiri oleh mereka yang ditunjuk peraturan perundangan ataupun kebijakan lain, misalnya melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Jika dikaitkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dan beberapa tokoh masyarakat yang mewakili kecamatan dalam acara Musrembang Kabupaten Aceh Utara, kendala yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga yang berperan dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

- 1). Kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk peningkatan/ dan pemeliharaan jaringan jalan yang memadai sangat terbatas, sehingga tingkat kerusakan jalan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan untuk meningkatkan/memelihara jaringan jalan yang ada;
- 2) Quantitas dan qualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan tupoksi kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara masih belum memadai, sehingga bisa menghambat kinerja maupun peranan Dinas Bina Marga dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Aceh Utara;
- 3) Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, mengakui bahwa faktor kualitas data yang tersedia berkaitan dengan kondisi faktual pemeliharaan jaringan jalan juga relatif tidak bisa diandalkan. Dan dengan sendirinya akan mempengaruhi dalam merumuskan kebijakan anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jaringan jalan tersebut. Dilanjutkan, dengan kesalahan dalam merumuskan kebijakan, dapat menimbulkan konsekuensi pemborosan anggaran karena target pembangunan tidak akan tercapai dan terhambatnya potensi

- pembangunan pada sektor lainnya;
- 4) Jumlah alat berat yang kurang memadai, dan tidak sesuai dengan beban kerja atau panjang jalan yang harus dipelihara secara rutin (Swakelola) oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.
 - 5) Persentase program/kegiatan yang diusulkan dari berbagai pendekatan perencanaan pembangunan masih menunjukkan angka yang minimum dalam mendukung tupoksi/kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Sehingga akan mempengaruhi beberapa sektor pembangunan lainnya, yang berhubungan langsung dengan indikator kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara;
 - 6). Adanya indikasi rencana program/kegiatan prioritas dan kebutuhan pendanaan yang dikeluarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun berjalan masih banyak yang tidak sesuai dengan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan hasil kesepakatan dalam forum Musrembang kecamatan dan kabupaten.

C. Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara

1). Strategi

Strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989).

Secara umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dan Secara khusus Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen

memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan (Sumber : Blogspot Tahun 2012)

2). Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, *kebijakan* adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Menurut Zaenuddin Kabai, kebijakan adalah formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan digunakan pada lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan). Selanjutnya Menurut Mustopadidjaja, Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

(Sumber : Media Internetan, Imron, Ali. 2002)

Dari uraian di atas, jika dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara mengatakan bahwa : “ Untuk strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara telah dimuat dalam Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara Periode Tahun 2012 S/D Tahun 2017.

Adapun Strategi maupun kebijakan yang diterapkan berdasarkan dokumen Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelatihan teknis dan non teknis kepada Aparatur agar berkualitas dan professional, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Aparatur Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan tugas yang tertib, teratur dan efisien;
- 2) Membuat database yang akurat dan Standart Operasional Prosedur (SOP) agar pembangunan tepat sasaran, dengan tujuan untuk dapat Menyusun strategi program prioritas perencanaan dan pelaporan agar dapat meningkatkan kualitas tahapan proses perencanaan, pembangunan dan pengawasan serta data base jalan dan jembatan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan;
- 3) Menyiapkan ruang perpustakaan dan koperasi pegawai serta pengadaan alat berat dan alat laboratorium, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara yang memadai;
- 4) Menerapkan PCM, SCM agar proses pelaksanaan pembangunan berjalan lancar dan tepat sasaran, dengan tujuan untuk mengupayakan infrastruktur jalan dan jembatan yang lebih baik dan mantap demi kelancaran trasportasi, dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan pangan dan daya saing terutama pada kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- 5) Melaksanakan seminar jasa konstruksi dan sosialisasi regulasi tentang perizinan jalan, dengan tujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan peran pihak jasa kontsraksi dan perizinan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur jalan dan jembatan;
- 6) Melaksanakan pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, dan melaksanakan pelatihan tentang teknis kebinamargaan serta melaksanakan pelatihan tentang metodologi pemecahan masalah. Dengan tujuan agar dapat Meningkatkan secara terus menerus kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dengan menerapkan sistem manajemen mutu dan mendorong

upaya untuk meningkatkan kinerja pada seluruh bidang dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

Selanjutnya untuk kebijakan yang diambil oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dalam menjalankan perannya tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menerapkan punishment dan reward. Hal ini merupakan strategi yang diambil dalam hal untuk Meningkatkan kualitas Aparatur Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.
- 2) Membentuk Tim Survey Database Jalan dan Jembatan. Hal ini merupakan strategi yang diambil dalam menyusun program prioritas, perencanaan dan pelaporan serta untuk mendapatkan database jalan dan jembatan yang akurat dengan mengikuti Standart Operasional Prosedur (SOP) agar pembangunan lebih tepat sasaran;
- 3) Mewajibkan iuran untuk perpustakaan dan koperasi serta pengadaan alat berat yang diutamakan untuk swakelola; Dalam hal ini strategi yang diambil dalam hal untuk Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara;
- 4) Mengutamakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta memberdayakan tim monitoring dan evaluasi. Hal ini merupakan strategi untuk mendapatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap demi kelancaran transportasi;
- 5) Membuat kesepakatan dengan Asosiasi penyedia Barang dan Jasa untuk membuat Qanun tentang izin jalan. Hal ini merupakan strategi yang diambil dalam hal untuk lebih berfungsinya bidang pembinaan jasa kontruksi dan perizinan.
- 6) Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan secara terus menerus kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu.
(Sumber : Renstra Dinas Bina Marga 2012-2017)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, bahwa dimensi yang terdapat dalam variabel pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara berpengaruh signifikan terhadap peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dimensi kemampuan anggaran, sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan kinerja pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan Kabupaten Aceh Utara. Yang menjadi tupoksi utama kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor strategis lainnya di Kabupaten Aceh Utara.
2. Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Aceh Utara sangat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Bina Marga dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Utara
3. Jika dilakukan pengujian simultan (serempak/bersama-sama), pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara berserta dimensi-dimensinya yaitu kemampuan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh secara signifikan terhadap peranan Dinas Bina Marga di Kabupaten Aceh Utara sebesar 72,60%. Sedangkan sisanya sebesar 27,40% dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya seperti lingkungan, perencanaan, pengawasan dan kepimpinan serta lainnya yang secara langsung

maupun tidak langsung dapat menunjang maupun menghambat peranan Dinas Bina Marga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.

B. Saran

1. Untuk mendukung peranan Dinas Bina Marga terhadap pembangunan dan pelayan publik lainnya, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan indikasi program/kegiatan dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada tahun berjalan lebih bijaksana dalam memperhatikan terhadap kebutuhan program/kegiatan yang ada di Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara. Karena seperti kita ketahui bersama, beban kerja yang ada di Dina Bina Marga Kabupaten Aceh Utara sekarang adalah menyelesaikan pembangunan dan pemeliharaan jalan sepanjang 2032,8 KM yang akan mempengaruhi berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik kabupaten Aceh Utara.
2. Melakukan pengadaan penambahan alat berat untuk Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, supaya dapat menjaga kualitas jalan secara rutin dan berkala. Sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat lebih menghemat biaya pembangunan infrastruktur jalan dan lainya di masa yang akan datang.
3. Perlu perhatian khusus bagi Dinas Bina Marga dalam merekrut pegawai, karena Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.
4. Dalam melakukan penempatan pegawai, Dinas Bina Marga sebaiknya menyesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan.

DAFTRA PUSTAKA

- Antony, R.N. dan V. Govindarajan. 1998. Management Control System. 9ed. Richard D Irwin, Mc. Grawhill.
- Bastian, I. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi I. (BPFE UGM, Yogyakarta).
- Brownell, P. 1982. Participation in Budgeting Process: When it Works and when it doesn't. *Journal of Accounting Literatur*. pp. 124-153.
- Bungin, M. Burhan. 2006. Metodologi penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Prenada Media Group, Jakarta, Indonesia.
- Brown, John Nicholas. 1990. A Model for Rural Road Maintenance in Zaire. Master Tesis yang tidak dipublikasikan pada Jurusan Perencanaan Kota the Massachusetts Intitute of Technology, USA.
- Chow, C.W; J. C. Cooper; dan S. W. Waller. 1988. Participative Budgeting Effect of a Truth-Inducing Pay Sheme and Information Asymetry on Slack and Performance. *The Accounting Review*. No 1, January: 111-122.
- Donnges, Chris, Geoff Edmonds, dan Bjorn Johannessen. 2007. Rural Road Maintenance: Sustaining the Benefits of Improved Access. International Labour Organization, Bangkok. Dokumen diunduh dari <http://www.ilo.org/public/english/employment/recon/eiip/download/setp/setp19.pdf>, pada tanggal 8 Agustus 2014
- Ela,Nurmala. 2012. Metode Penelitian : Pengaruh Budaya Organisasi Dan SDM terhadap Kinerja Pegawai.
- Fajri, 2014, Analisis Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Desa (Studi Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS di Kabupaten Simeulue).

Ghozali,Imam 2005. Metodologi Penelitian : Analisa pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja manajerial melalui Komitment Tujuan Anggaran Dan Job Relevant Information (JRI) Sebagai Variabel Intervebing (Penelitian Terhadap Perusahaan Manufaktur Di Indonesia). Di unduh dari <https://www.scribd.com/doc/12782530/Kamp-06-Analisis-Pengaruh-Partisipasi-Anggaran-Terhadap-Kinerja> Pada Tanggal 15-16 September 2005

Heng, Salpiseth, Hitomi Nakanishi, dan Yasuhiro Hirobata. 2007. An Integrated Model of Rural infrastructure Design in Developing Countries. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.6, 2007. Dokumen diunduh dari <http://www.tr.tutrp.tut.ac.jp/papers/2007-piseth02.pdf>, pada tanggal 6 September 2014

Halim,A., A. Tjahyono., dan M.F.Husien., 2000. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi Revisi. Yogyakarta. (UPP AMP YKPN).

[http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Christy%20Marintan.pdf.....christy marintan PERANAN DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN \(Studi Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Medan Johor \)](http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Christy%20Marintan.pdf.....christy marintan PERANAN DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN (Studi Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Medan Johor))

http://media.unpad.ac.id/thesis/170720/2011/170720110001_1_1946.pdf ...
“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara”.

<http://mbem25.blogspot.co.id/2012/06/teori-pembangunan.html>, Nurlailii Irmawati lyexz Mbem,, teori pembangunan...

https://www.academia.edu/9350270/PELAYANAN_PUBLIK_DALAM_BIROK_RASI PEMERINTAHAN

<http://datariset.com/olahdata/detail/olah-data-jogja-iji-instrumen>

<http://kaghoo.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-peranan.html>).

<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/11/definisi-strategi.html>

<http://www.landasantteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>

<http://catatankuliah2ku.blogspot.co.id/2010/11/pengertian-perencanaan-tujuan.html>

Hidayat Anwar,2013,tentang uji F dan uji T, yang diunduh dari
<http://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html>

Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Jones, R. dan M. Pendlebury., 1996. *Public Sector Accounting*. Fourth Edition.(Pitman Publishing, London).

Junaidi,2010, Tabel R, diunduh dari (<http://junaidichaniago.wordpress.com>)

Junaidi,2010, Tabel T, diunduh dari (<http://junaidichaniago.wordpress.com>)

Junaidi,2010, Tabel F, diunduh dari (<http://junaidichaniago.wordpress.com>)

Junaidi, 2015, Membaca dan menggunakan tabel F dan Tabel T, diunduh dari
https://www.researchgate.net/publication/277343118_Membaca_dan_Menggunakan_Tabel_Distribusi_F_dan_Tabel_Distribusi_t

Kenis L. 1979. "The Effect of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance." *Accounting Review*. October, p. 707-721

Kluvers, R. 2001. Program Budgeting and Accountability in Local Government.*Australian Journal of Public Administration*. Vol 60 (2). Juni: 35-43.

Leyland, Jo. ----. Prioritising a Process: Community Participation in Prioritising Rural Road Improvements in East Africa. Dokumen diunduh dari www.itdp.org/documents/322_Jo_Leyland_Paper1.doc, pada tanggal 6 September 2014

Lombard, P dan L Coetzer. ----. The Estimation of the Impact of Rural Road Investments on Socio-Economic Development. Dokumen diunduh dari <http://www.roadsfundtz.org/web/pdf/session%203/Estimating%20the%20Impact%20of%20Road%20Inv%20on%20SocioEcon%20>

0%20%20%20%20%20Development.pdf, pada tanggal 6 September 2014

Oraboune, Syviengxay. 2008. Infrastructure (Rural Road) Development and Poverty Alleviation in Lao PDR. Institute of Developing Economies Discussion Paper No. 151. Dokumen diunduh dari https://ir.ide.go.jp/dspace/bitstream/2344/747/3/ARRIDE_Discussion_No.151_orabone.pdf, pada tanggal 6 September 2014

Panpaj, Thampil. 2000. Framework for quantifying social and economic benefits from rural road development; Some thoughts and practical insights. Dokumen diunduh dari http://www.transport-links.org/transport_links/filearea/documentstore/322_Thampil%20Panpaj%20Paper%201.pdf, pada tanggal 8 September 2014

Patton, Carl V, dan David S. Sawicki. 1986. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Prentice-Hall, New jersey, USA

Peno Suryanto,2013, Modul Pelatihan Analisis Data, diunduh dari

Rustiadi, Ernan, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Obor Indonesia – Crescent Press, Jakarta, Indonesia.

Suhartono, Ehrmann & Mohammad Solichin. 2006. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi". Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang. Di unduh dari <https://www.scribd.com/doc/99152134/Pengaruh-Kejelasan-Sasaran-Anggaran>.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : ALFABETA
----- 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : ALFABETA..

Sembiring, Benar Baik 2009, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris Di Pemerintah Kabupaten Karo). Di Unduh dari epository.usd.ac.id/bitstream/123456789/4032/1/09E01980.pdf

Sahid Raharjo,2013. Contoh pengolahan data. diunduh dari <http://www.konsistensi.com/>

Wasike, Wilson S.K. 2001. Road Infrastructure Policies in Kenya: Historical Trends and Current Challenges. Infrastructure and Economic Services Division, Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis, KIPPRA Working Paper No. 1. Dokumen diunduh dari www.kippra.org/Download/wp01.doc, pada tanggal 7 September 2014.

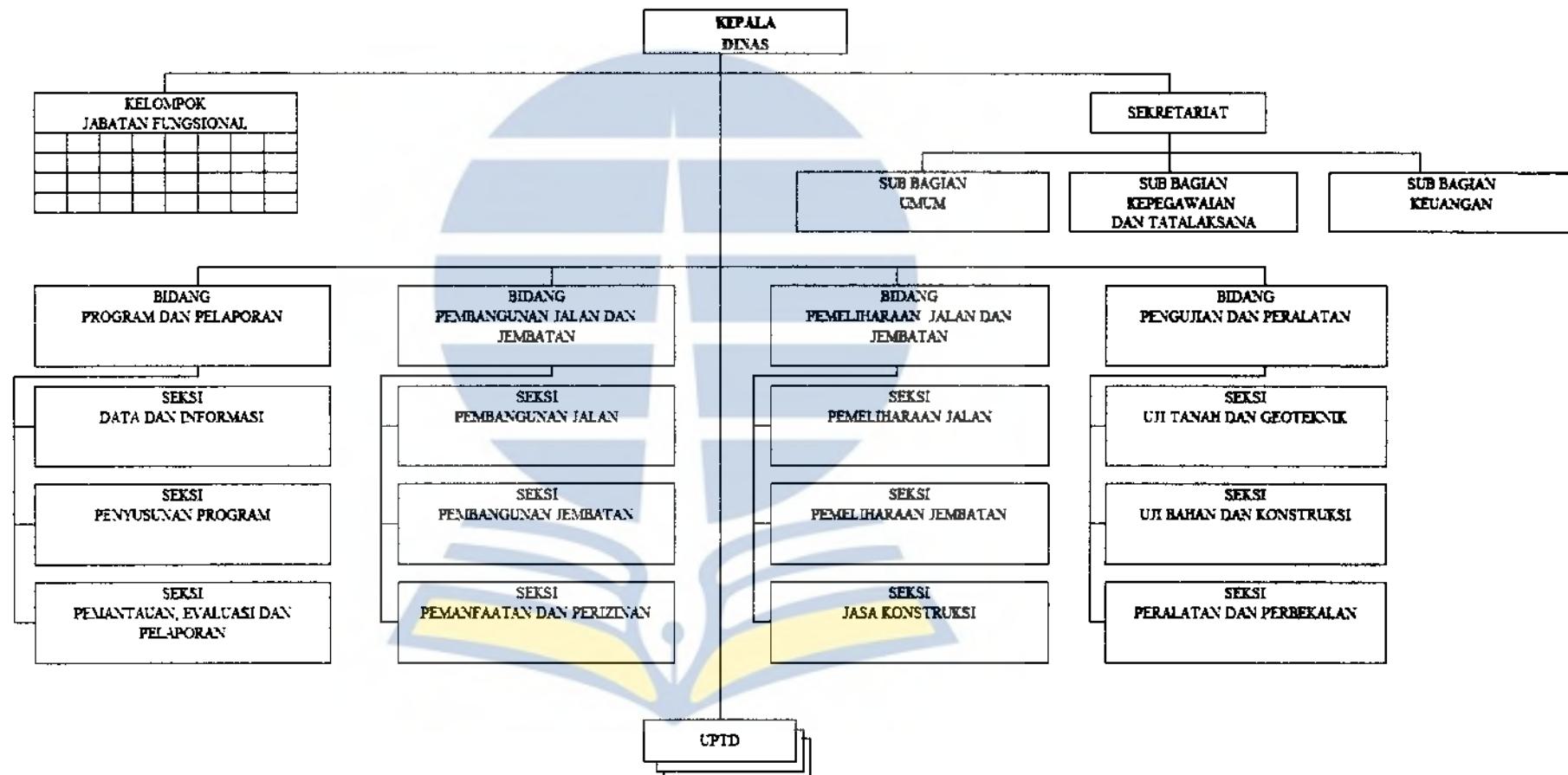
Wrihatnolo, Randi R, dan Riant Nugroho D. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia. PT. Gramedia, Jakarta, Indonesia

Yuhertiana, I. 2003. Principal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik. KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan SistemInformasi FE UTY Yogyakarta. No: 9. April. 403-422.

Yusfaningrum, Kusnasriyanti dan Imam Ghazali. 2005. "Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Tujuan Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) sebagai Variabel Intervening (Penelitian terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia)", Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.

Lampiran Bagan

Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara



T.2.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara

T.2.2.1. Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S3/S2	5
2	S1	43
3	D3	12
4	SLTA	30
5	SLTP	2
6	SD	1
Jumlah		93

T.2.2.2 Tabel Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	ADUM / PIM IV	9
2	SPAMA / PIM III	5
3	SPAMEN / PIM II	-
Jumlah		14

T.2.2.3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5

No	Jabatan	Jumlah
3	Eselon IV	15
4	Fungsional	0
5	Staf	72
Jumlah		93

T.2.2.4. Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Gol. I	3
2	Gol. II	35
3	Gol. III	51
4	Gol. IV	4
Jumlah		93

PETUNJUK ANGKET

No Responden:

.....

**PERANAN DINAS BINA MARGA DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN ACEH UTARA**

1. PETUNJUK PENGISIAN :

- Kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan cermat, jujur dan sebenarnya.
- Berilah tanda checklist (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Ada empat alternatif jawaban, yaitu :
 - SS = Sangat Setuju (4)
 - S = Setuju (3)
 - KS = Kurang Setuju (2)
 - TS = Tidak Setuju (1)

2. KARAKTERISTIK RESPONDEN :

- Nama :
- Usia : Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- Pekerjaan :
- Nama Kecamatan :

No	Pernyataan Variabel	Alternatif Jawaban			
		SS	S	KS	TS
I	Pernyataan Variabel Pembangunan Dan Pelayanan Publik (X)				
I.a.	Kemampuan Anggaran (X1)				
1.	Kemampuan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, belum memadai untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Utara.				
2.	Prioritas program dan kegiatan serta pendanaan dalam tahun berjalan, masih ada yang tidak sesuai dengan Rencana kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.				
3.	Ketersediaan anggaran yang belum memadai dalam menunjang pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.				
I.b	Sumber Daya Manusia (SDM) (X2)				
4.	Qualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bina Marga Kabupaten				

	Aceh Utara, belum sepenuhnya mampu untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Utara.			
5.	Quantitas Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, tidak sepadan dengan beban kerja yang harus dipikul Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.			
6.	Penempatan pegawai secara qualitas di Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara masih ada yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh sejumlah pegawai.			
7.	Secara quantitas, masih banyak pegawai Dinas Bina Marga belum mengikuti berbagai program bimbingan teknis yang sesuai dengan indikator kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.			
8.	Secara quantitas, masih banyak pegawai Dinas Bina Marga belum disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP yang telah ditentukan untuk masing-masing bidang,tingkat dan golongan dalam aturan kepegawaian.			
9.	Secara quantitas dan qualitas, pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan uji kompetensi, guna mendapat apresiasi atau semangat dalam meningkatkan kinerja dalam menunjang peranan Dinas Bina Marga Dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.			
10.	Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pelayanan publik lainnya, hampir sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.			
II. Pernyataan Variabel Peranan Dinas Bina Marga (Y)				
Pembangunan Dan Pemeliharaan Jaringan Jalan (Y₁, Y₂)				
11.	Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya dapat mendukung pelayanan beberapa sektor pembangunan di Kabupaten Aceh Utara.			
12.	Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan yang menjadi tupoksi utama Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, sangat berperan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik berbagai sektor di Kabupaten Aceh Utara.			
13.	Dengan ketersediaan alat berat yang ada di Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara, sangat tidak mendukung pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan secara swakelola di Kabupaten Aceh Utara. Sehingga kondisi kerusakan pada jaringan jalan yang sudah ditingkatkan pada beberapa periode sebelumnya semakin bertambah pada setiap tahun berjalan.			
14.	Out-put kinerja pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan yang dilaksanakan pada tahun berjalan, masih terjadi ketimpangan terhadap target kinerja yang direncanakan dalam dokumen Renja maupun Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara.			
15.	Data tentang kondisi jaringan jalan yang terdapat di Dinas Bina Marga masih ada yang tidak valid, sehingga sasaran pembangunan jaringan jalan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.			

TABEL KARAKTERISTIK RESPONDEN
PERANAN DINAS BINA MARGA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH UTARA

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pekerjaan	kod	Jenis Kelamin	kod	Kecamatan
33	RUDI HENDRAWAN	24	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Syamtalira Bayu
47	M.NASIR	24	Petani	4	Laki - Laki	1	Samudera
94	ISMAIL IB	27	Petani	4	Laki - Laki	1	Cot Girek
11	DIAN SASTRA	28	PNS	5	Perempuan	2	Dewantara
23	DANDALINAR	28	Wiraswasta	6	Perempuan	2	Banda Baro
55	MIFTAHUDDIN	28	PNS	5	Laki - Laki	1	Syamtalira Aron
60	EDI SAPUTRA	28	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Lapang
64	RIDHA BIDAYATI	28	Wiraswasta	6	Perempuan	2	Tanah Luas
70	RIYASRI	28	Wiraswasta	6	Perempuan	2	Nibong
107	SAKRAS	28	PNS	5	Perempuan	2	Seunuddon
56	HANIF PUTRO	29	Wiraswasta	6	Perempuan	2	Syamtalira Aron
62	RAUDAH JAMIL	29	Wiraswasta	6	Perempuan	2	Tanah Luas
65	MOHD. FADHIL, S.ST	29	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Matang Kuli
108	KAMARUDDIN	29	PNS	5	Laki - Laki	1	Seunuddon
6	AINAL MARDIAH	30	PNS	5	Laki - Laki	1	Muara Batu
10	IRMA AMUNA, M.sc	30	PNS	5	Perempuan	2	Dewantara
18	MURDANI	30	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Nisam Antara
67	ABDUL HADI	30	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Matang Kuli
85	ABD. HANAN ARBA	30	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Baktiya
5	SAMARNI	31	PNS	5	Laki - Laki	1	Muara Batu
12	TARMIKI ADAM	31	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Dewantara
32	MUHAMMAD RIZAL	31	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Simpang Keuramat
38	SYAMSIDAR	31	Wiraswasta	6	Perempuan	2	Geureudong Pase
49	LILIS INDRIYANSYAH	31	PNS	5	Perempuan	2	Tanah Pasir
76	ZULFITRIA	31	Wiraswasta	6	Perempuan	2	Paya Bakong
13	JAMALUDDIN	32	Mukim	3	Laki - Laki	1	Nisam
86	HAPMATI	32	Ibu Rumah Tangga	2	Perempuan	2	Baktiya
97	MUZAKIR.SE	32	PNS	5	Laki - Laki	1	Langkahan
96	H. ISKANDAR	33	Petani	4	Laki - Laki	1	Cot Girek
100	HAMDI ABDULLAH	34	Petani	4	Laki - Laki	1	Langkahan
40	T.SDOLIBOL	35	PNS	5	Laki - Laki	1	Geureudong Pase
78	FACRURRAZI	35	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Pirak Timu
20	IRSYAD	36	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Nisam Antara
8	AMRI	37	PNS	5	Laki - Laki	1	Muara Batu
15	MUHAMMAD Ar	37	PNS	5	Laki - Laki	1	Nisam
83	ZULBARNAH	37	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Lhoksukon
92	RAZALI.H.A.MANAN:SP	37	Petani	4	Laki - Laki	1	Baktiya Barat
3	SYUKRI P.ST	38	PNS	5	Laki - Laki	1	Sawang
22	YARANSUL	38	Imum Mukim	3	Laki - Laki	1	Banda Baro
24	FADLY	38	PNS	5	Laki - Laki	1	Banda Baro
28	ARAFAT	38	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Kuta Makmur
36	TGK.SULAIMAN	38	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Syamtalira Bayu
46	SAIPUL BAHRI	38	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Samudera
61	AMIRUL FUARDI	38	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Tanah Luas
99	HAMDANI	38	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Langkahan
104	FAUZI DAISYAH	38	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Tanah Jambo Aye
105	HASANUSI	38	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Seunuddon
9	MANSYURI	39	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Dewantara
17	IDRIS BENDUNG	39	PNS	5	Laki - Laki	1	Nisam Antara
26	ZAKARIA	39	PNS	5	Laki - Laki	1	Kuta Makmur
44	SYAIFULLAH	39	PNS	5	Laki - Laki	1	Meurah Mulia
50	MANSYURI	39	PNS	5	Laki - Laki	1	Tanah Pasir
51	ZAINAL ARDI, S.Pd	39	PNS	5	Laki - Laki	1	Tanah Pasir
66	AZHARI	39	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Matang Kuli
69	MASYARI US	39	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Nibong
72	SYAMSUDDIN	39	PNS	5	Laki - Laki	1	Nibong
77	IBNU SYARDAN	39	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Pirak Timu
79	TARMIKI	39	PNS	5	Laki - Laki	1	Pirak Timu
88	MARTUNIS	39	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Baktiya
91	HAMDANI, ST	39	Petani	4	Perempuan	2	Baktiya Barat
4	MUFTADA	40	PNS	5	Laki - Laki	1	Sawang
14	IBRAHIM	40	Mukim	3	Laki - Laki	1	Nisam
16	A. GANI	40	PNS	5	Laki - Laki	1	Nisam
30	FADHIL, A.Md	40	PNS	5	Laki - Laki	1	Simpang Keuramat
45	SOFYAN PUTEH	40	PNS	5	Laki - Laki	1	Samudera
71	HALIMUDDIN	40	PNS	5	Laki - Laki	1	Nibong
73	ZULRIFU	40	Imum Mukim	3	Laki - Laki	1	Paya Bakong
90	ASNAWI	40	Petani	4	Perempuan	2	Baktiya Barat
93	AU BASYAH	40	Mukim	3	Laki - Laki	1	Cot Girek

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pekerjaan	kod	Jenis Kelamin	kod	Kecamatan
98	PARDIANSYAH	40	Petani	4	Laki - Laki	1	Langkahan
106	AMIRUDDIN	40	Mukim	3	Laki - Laki	1	Seunuddon
1	ABDULLAH	41	PNS	5	Laki - Laki	1	Sawang
29	ALFIAN	41	PNS	5	Laki - Laki	1	Simpang Keuramat
37	ISMAIL, S.Sos	41	PNS	5	Laki - Laki	1	Geureudong Pase
48	HALIMAH	41	Ibu Rumah Tangga	2	Perempuan	2	Samudera
63	NARUDDIN	41	PNS	5	Laki - Laki	1	Tanah Luas
74	HAMDANI	41	Imum Mukim	3	Laki - Laki	1	Paya Bakong
75	M. JAFARAT	41	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Paya Bakong
82	GIRI-5	41	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Lhoksukon
101	DAYAN HASBI	41	PNS	5	Laki - Laki	1	Tanah Jambo Aye
25	T.IDRIS THAIB	42	Mukim	3	Laki - Laki	1	Kuta Makmur
21	TARMIZI	43	PNS	5	Laki - Laki	1	Banda Baro
42	NURDIN ISMAIL	43	Mukim	3	Laki - Laki	1	Meurah Mulia
52	M.ZAMZAMI	43	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Tanah Pasir
57	DAHLAN AB	43	Mukim	3	Laki - Laki	1	Lapang
19	TGK. NASRUDDIN	44	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Nisam Antara
27	MUSLEM	44	PNS	5	Laki - Laki	1	Kuta Makmur
39	LUKMAN	44	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Geureudong Pase
41	H. HASANUDDIN	44	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Meurah Mulia
68	BAHTIAR	44	PNS	5	Laki - Laki	1	Matang Kuli
7	MARZUKI	45	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Muara Batu
80	HAMDANI, SE	46	PNS	5	Laki - Laki	1	Pirak Timu
81	EDI ANWAR	46	Petani	4	Laki - Laki	1	Lhoksukon
84	SAMSUDIN	46	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Lhoksukon
87	SYAHRIZA	46	Petani	4	Laki - Laki	1	Baktiya
95	USMAN.K	46	PNS	5	Laki - Laki	1	Cot Girek
35	CUT MUSLEM	47	Mukim	3	Laki - Laki	1	Syamtalira Bayu
2	SYAUKNANI	48	Imum Mukim	3	Laki - Laki	1	Sawang
53	M.SHALEH	48	Mukim	3	Laki - Laki	1	Syamtalira Aron
43	ABDUL RAHMAN	49	Mukim	3	Laki - Laki	1	Meurah Mulia
54	TGK. M. NASIR	49	Mukim	3	Laki - Laki	1	Syamtalira Aron
59	TM. NUR	49	Mukim	3	Laki - Laki	1	Lapang
31	H.IBRAHIM	50	Mukim	3	Laki - Laki	1	Simpang Keuramat
102	Tgk.M.ISA	50	Mukim	3	Laki - Laki	1	Tanah Jambo Aye
34	ZURMA,S.Sos	51	Wiraswasta	6	Laki - Laki	1	Syamtalira Bayu
58	NURDIN	51	Geuchik	1	Laki - Laki	1	Lapang
89	ISHAK YAHYA	51	Petani	4	Laki - Laki	1	Baktiya Barat
103	ILYAS	51	Mukim	3	Laki - Laki	1	Tanah Jambo Aye



DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN
PERANAN DINAS BINA MARGA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH UTARA

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	ABDULLAH	41	PNS	Laki - Laki	Sawang
2	SYAUKANI	48	Imum Mukim	Laki - Laki	Sawang
3	SYUKRI P.ST	38	PNS	Laki - Laki	Sawang
4	MUFTADA	40	PNS	Laki - Laki	Sawang
5	SAMARNI	31	PNS	Laki - Laki	Muara Batu
6	AINAL MARDIAH	30	PNS	Laki - Laki	Muara Batu
7	MARZUKI	45	Geuchik	Laki - Laki	Muara Batu
8	AMRI	37	PNS	Laki - Laki	Muara Batu
9	MANSYURNI	39	Geuchik	Laki - Laki	Dewantara
10	IRMA AMUNA, M.sc	30	PNS	Perempuan	Dewantara
11	DIAN SASTRA	28	PNS	Perempuan	Dewantara
12	TARMIZI ADAM	31	Wiraswasta	Laki - Laki	Dewantara
13	JAMALUDDIN	32	Mukim	Laki - Laki	Nisam
14	IBRAHIM	40	Mukim	Laki - Laki	Nisam
15	MUHAMMAD Ar	37	PNS	Laki - Laki	Nisam
16	A. GANI	40	PNS	Laki - Laki	Nisam
17	IDRIS BENDUNG	39	PNS	Laki - Laki	Nisam Antara
18	MURDANI	30	Wiraswasta	Laki - Laki	Nisam Antara
19	TGK. NASRUDDIN	44	Geuchik	Laki - Laki	Nisam Antara
20	IRSYAD	36	Wiraswasta	Laki - Laki	Nisam Antara
21	TARMIZI	43	PNS	Laki - Laki	Banda Baro
22	YARANSUL	38	Imum Mukim	Laki - Laki	Banda Baro
23	DANDALINAR	28	Wiraswasta	Perempuan	Banda Baro
24	FADLY	38	PNS	Laki - Laki	Banda Baro
25	T.IDRIS THAIB	42	Mukim	Laki - Laki	Kuta Makmur
26	ZAKARIA	39	PNS	Laki - Laki	Kuta Makmur
27	MUSLEM	44	PNS	Laki - Laki	Kuta Makmur
28	ARAFAT	38	Wiraswasta	Laki - Laki	Kuta Makmur
29	ALFIAN	41	PNS	Laki - Laki	Simpang Keuramat
30	FADHIL, A.Md	40	PNS	Laki - Laki	Simpang Keuramat
31	H.IBRAHIM	50	Mukim	Laki - Laki	Simpang Keuramat
32	MUHAMMAD RIZAL	31	Wiraswasta	Laki - Laki	Simpang Keuramat
33	RUDI HENDRAWAN	24	Wiraswasta	Laki - Laki	Syamtalira Bayu
34	ZURMA,S.Sos	51	Wiraswasta	Laki - Laki	Syamtalira Bayu
35	CUT MUSLEM	47	Mukim	Laki - Laki	Syamtalira Bayu
36	TGK.SULAIMAN	38	Geuchik	Laki - Laki	Syamtalira Bayu
37	ISMAIL, S.Sos	41	PNS	Laki - Laki	Geureudong Pase
38	SYAMSIDAR	31	Wiraswasta	Perempuan	Geureudong Pase
39	LUKMAN	44	Wiraswasta	Laki - Laki	Geureudong Pase
40	T.SDOLIBOL	35	PNS	Laki - Laki	Geureudong Pase
41	H. HASANUDDIN	44	Wiraswasta	Laki - Laki	Meurah Mulla
42	NURDIN ISMAIL	43	Mukim	Laki - Laki	Meurah Mulla
43	ABDUL RAHMAN	49	Mukim	Laki - Laki	Meurah Mulla
44	SYAIFULLAH	39	PNS	Laki - Laki	Meurah Mulla
45	SOFYAN PUTEH	40	PNS	Laki - Laki	Samudera
46	SAIPUL BAHRI	38	Wiraswasta	Laki - Laki	Samudera
47	M.NASIR	24	Petani	Laki - Laki	Samudera
48	HALIMAH	41	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Samudera
49	LILIS INDRIANSYAH	31	PNS	Perempuan	Tanah Pasir
50	MANSYURI	39	PNS	Laki - Laki	Tanah Pasir
51	ZAINAL ARDI, S.Pd	39	PNS	Laki - Laki	Tanah Pasir
52	M.ZAMZAMI	43	Wiraswasta	Laki - Laki	Tanah Pasir
53	M.SHALEH	48	Mukim	Laki - Laki	Syamtalira Aron
54	TGK. M. NASIR	49	Mukim	Laki - Laki	Syamtalira Aron

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Kecamatan
55	MIFTAHUDDIN	28	PNS	Laki - Laki	Syamtalira Aron
56	HANIFA PUTRO	29	Wiraswasta	Perempuan	Syamtalira Aron
57	DAHLAN AB	43	Mukim	Laki - Laki	Lapang
58	NURDIN	51	Geuchik	Laki - Laki	Lapang
59	TM. NUR	49	Mukim	Laki - Laki	Lapang
60	EDI SAPUTRA	28	Wiraswasta	Laki - Laki	Lapang
61	AMIRUL FUARDI	38	Geuchik	Laki - Laki	Tanah Luas
62	RAUDAH JAMIL	29	Wiraswasta	Perempuan	Tanah Luas
63	NARUDDIN	41	PNS	Laki - Laki	Tanah Luas
64	RIDHA BIDAYATI	28	Wiraswasta	Perempuan	Tanah Luas
65	MOHD. FADHIL, S.ST	29	Wiraswasta	Laki - Laki	Matang Kuli
66	AZHARI	39	Wiraswasta	Laki - Laki	Matang Kuli
67	ABDUL HADI	30	Wiraswasta	Laki - Laki	Matang Kuli
68	BAHTIAR	44	PNS	Laki - Laki	Matang Kuli
69	MASYARI US	39	Geuchik	Laki - Laki	Nibong
70	RIYASRI	28	Wiraswasta	Perempuan	Nibong
71	HALIMUDDIN	40	PNS	Laki - Laki	Nibong
72	SYAMSUDDIN	39	PNS	Laki - Laki	Nibong
73	ZULRIFU	40	Imum Mukim	Laki - Laki	Paya Bakong
74	HAMDANI	41	Imum Mukim	Laki - Laki	Paya Bakong
75	M. JAFARAT	41	Geuchik	Laki - Laki	Paya Bakong
76	ZULFITRIA	31	Wiraswasta	Perempuan	Paya Bakong
77	IBNU SYARDAN	39	Geuchik	Laki - Laki	Pirak Timu
78	FACRURRAZI	35	Wiraswasta	Laki - Laki	Pirak Timu
79	TARMIZI	39	PNS	Laki - Laki	Pirak Timu
80	HAMDANI, SE	46	PNS	Laki - Laki	Pirak Timu
81	EDI ANWAR	46	Petani	Laki - Laki	Lhoksukon
82	GIRI-S	41	Geuchik	Laki - Laki	Lhoksukon
83	ZULBARNAH	37	Wiraswasta	Laki - Laki	Lhoksukon
84	SAMSUDDIN	46	Wiraswasta	Laki - Laki	Lhoksukon
85	ABD. HANAN ARBA	30	Geuchik	Laki - Laki	Baktiya
86	HAPMATI	32	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Baktiya
87	SYAHRIZA	46	Tani	Laki - Laki	Baktiya
88	MARTUNIS	39	Wiraswasta	Laki - Laki	Baktiya
89	ISHAK YAHYA	51	Tani	Laki - Laki	Baktiya Barat
90	ASNAWI	40	Tani	Perempuan	Baktiya Barat
91	HAMDANI, ST	39	Tani	Perempuan	Baktiya Barat
92	RAZALI.H.A.MANAN.SP	37	Tani	Laki - Laki	Baktiya Barat
93	AU BASYAH	40	Mukim	Laki - Laki	Cot Girek
94	ISMAYL IB	27	Tani	Laki - Laki	Cot Girek
95	USMAN.K	46	PNS	Laki - Laki	Cot Girek
96	H. ISKANDAR	33	Tani	Laki - Laki	Cot Girek
97	MUZAKIR.SE	32	PNS	Laki - Laki	Langkahan
98	PARDIANSYAH	40	Tani	Laki - Laki	Langkahan
99	HAMDANI	38	Wiraswasta	Laki - Laki	Langkahan
100	HAMDI ABDULLAH	34	Tani	Laki - Laki	Langkahan
101	DAYAN HASBI	41	PNS	Laki - Laki	Tanah Jambo Aye
102	Tgk.M.ISA	50	Mukim	Laki - Laki	Tanah Jambo Aye
103	ILYAS	51	Mukim	Laki - Laki	Tanah Jambo Aye
104	FAUZI DAISYAH	38	Wiraswasta	Laki - Laki	Tanah Jambo Aye
105	HASANUSI	38	Wiraswasta	Laki - Laki	Seunuddon
106	AMIRUDDIN	40	Mukim	Laki - Laki	Seunuddon
107	SAKRAS	28	PNS	Perempuan	Seunuddon
108	KAMARUDDIN	29	PNS	Laki - Laki	Seunuddon

**TABEL PENILAIAN RESPONDEN
VARIABEL PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK (X)**

Dimensi Kemampuan Anggaran (X1)

N/ITEM	1	2	3	X1	X1 ²
1	4	4	3	11	121
2	3	3	3	9	81
3	3	3	4	10	100
4	4	3	4	11	121
5	4	4	4	12	144
6	3	3	3	9	81
7	3	3	3	9	81
8	4	4	4	12	144
9	4	4	4	12	144
10	3	4	3	10	100
11	3	3	3	9	81
12	3	3	3	9	81
13	3	4	3	10	100
14	3	3	3	9	81
15	3	3	3	9	81
16	4	4	4	12	144
17	4	4	4	12	144
18	3	3	3	9	81
19	3	3	3	9	81
20	4	2	4	10	100
21	4	3	4	11	121
22	3	3	3	9	81
23	4	3	4	11	121
24	4	3	4	11	121
25	3	3	3	9	81
26	3	3	3	9	81
27	2	3	2	7	49
28	4	4	4	12	144
29	4	4	4	12	144
30	4	4	4	12	144
31	4	4	4	12	144
32	2	2	2	6	36
33	4	3	4	11	121
34	4	3	4	11	121
35	4	4	4	12	144
36	3	4	3	10	100
37	2	3	2	7	49
38	4	4	4	12	144
39	4	4	4	12	144
40	3	3	3	9	81
41	4	3	4	11	121
42	4	4	4	12	144
43	4	4	4	12	144
44	4	4	4	12	144
45	4	4	4	12	144
46	3	2	3	8	64
47	4	4	4	12	144
48	3	3	3	9	81
49	4	3	4	11	121
50	4	4	4	12	144
51	4	4	4	12	144
52	4	4	4	12	144
53	4	3	4	11	121
54	4	4	4	12	144

N/ITEM	1	2	3	X1	X1 ²
55	4	4	4	12	144
56	4	4	4	12	144
57	4	3	4	11	121
58	4	3	4	11	121
59	4	3	4	11	121
60	4	4	4	12	144
61	4	4	4	12	144
62	4	4	4	12	144
63	4	3	4	11	121
64	4	3	4	11	121
65	4	4	4	12	144
66	4	4	4	12	144
67	4	3	4	11	121
68	4	3	4	11	121
69	4	3	4	11	121
70	4	3	4	11	121
71	4	3	4	11	121
72	4	3	4	11	121
73	3	4	3	10	100
74	3	4	3	10	100
75	4	3	4	11	121
76	4	3	4	11	121
77	4	4	4	12	144
78	4	4	4	12	144
79	4	3	4	11	121
80	2	4	2	8	64
81	3	4	3	10	100
82	4	3	4	11	121
83	4	3	4	11	121
84	4	2	4	10	100
85	4	4	4	12	144
86	4	4	4	12	144
87	4	4	4	12	144
88	4	4	4	12	144
89	4	2	4	10	100
90	4	4	4	12	144
91	4	4	4	12	144
92	4	4	4	12	144
93	4	3	4	11	121
94	4	2	4	10	100
95	4	4	4	12	144
96	3	4	3	10	100
97	4	3	4	11	121
98	4	4	4	12	144
99	4	4	4	12	144
100	3	4	3	10	100
101	4	4	4	12	144
102	3	4	3	10	100
103	3	3	3	9	81
104	4	4	4	12	144
105	3	3	3	9	81
106	4	4	3	11	121
107	4	4	4	12	144
108	3	4	2	9	81
Σ	396	374	394	1164	12740

TABEL PENILAIAN RESPONDEN
VARIABEL PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK (X)

Dimensi Sumber Daya Manusia (X2)

N/ITEM	1	2	3	4	5	6	7	X2	X2 ²	X1+X2	(X1+X2) ²
1	3	2	2	4	2	3	2	18	324	29	841
2	4	3	4	2	2	4	2	21	441	30	900
3	4	3	4	3	1	3	2	20	400	30	900
4	3	4	2	2	2	3	4	20	400	31	961
5	4	4	4	3	4	3	4	26	676	38	1444
6	3	3	4	3	2	4	3	22	484	31	961
7	3	4	3	3	2	4	4	23	529	32	1024
8	4	4	3	3	2	3	4	23	529	35	1225
9	4	4	3	3	2	3	3	22	484	34	1156
10	4	3	3	3	2	3	1	19	361	29	841
11	3	4	3	4	2	3	4	23	529	32	1024
12	3	4	3	3	2	3	3	21	441	30	900
13	4	3	3	3	2	3	3	21	441	31	961
14	3	4	3	3	2	3	4	22	484	31	961
15	3	4	3	3	2	3	2	20	400	29	841
16	4	4	3	3	2	3	2	21	441	33	1089
17	4	4	3	3	2	3	3	22	484	34	1156
18	3	3	4	2	2	3	4	21	441	30	900
19	3	3	3	2	2	3	4	20	400	29	841
20	2	3	3	2	3	2	4	19	361	29	841
21	3	3	4	2	2	3	3	20	400	31	961
22	3	3	3	3	2	4	3	21	441	30	900
23	3	3	4	3	2	3	3	21	441	32	1024
24	3	3	3	4	2	3	3	21	441	32	1024
25	3	4	3	4	3	4	3	24	576	33	1089
26	3	4	3	3	4	4	3	24	576	33	1089
27	3	3	3	4	3	4	3	23	529	30	900
28	4	3	4	4	3	4	4	26	676	38	1444
29	4	4	4	3	3	3	4	25	625	37	1369
30	4	4	3	3	4	4	4	26	676	38	1444
31	4	4	4	4	3	4	4	27	729	39	1521
32	2	3	3	3	3	3	3	20	400	26	676
33	3	3	4	4	4	4	4	26	676	37	1369
34	3	3	4	3	4	4	4	25	625	36	1296
35	4	4	3	3	3	4	4	25	625	37	1369
36	4	4	3	4	4	4	4	27	729	37	1369
37	3	3	3	3	3	3	3	21	441	28	784
38	4	3	4	4	2	2	2	21	441	33	1089
39	4	3	4	4	3	3	2	23	529	35	1225
40	3	4	3	3	2	3	2	20	400	29	841
41	3	4	4	2	4	4	3	24	576	35	1225
42	4	4	3	4	4	4	4	27	729	39	1521
43	4	4	4	4	3	3	3	25	625	37	1369
44	4	4	3	4	4	4	4	27	729	39	1521
45	4	4	4	3	4	4	4	27	729	39	1521
46	2	2	4	4	3	4	3	22	484	30	900
47	4	4	4	4	3	4	4	27	729	39	1521
48	3	4	4	3	3	3	4	24	576	33	1089
49	3	3	4	4	3	4	4	25	625	36	1296
50	4	4	4	3	3	4	3	25	625	37	1369
51	4	4	4	4	3	3	3	25	625	37	1369
52	4	3	4	3	4	4	4	26	676	38	1444
53	3	4	3	3	3	3	3	22	484	33	1089
54	4	4	4	4	4	4	4	28	784	40	1600

N/ITEM	1	2	3	4	5	6	7	X2	X2 ²	X1+X2	(X1+X2) ²
55	4	4	4	4	4	3	3	26	676	38	1444
56	4	4	3	4	3	4	3	25	625	37	1369
57	3	3	3	4	3	4	3	23	529	34	1156
58	4	4	3	4	3	3	4	25	625	36	1296
59	3	4	4	3	4	3	4	25	625	36	1296
60	4	4	4	4	4	3	3	26	676	38	1444
61	4	4	4	3	4	4	4	27	729	39	1521
62	4	3	4	4	4	4	3	26	676	38	1444
63	3	3	4	4	4	4	4	26	676	37	1369
64	3	4	4	4	4	4	4	27	729	38	1444
65	4	4	4	4	4	3	4	27	729	39	1521
66	2	3	4	3	2	4	3	21	441	33	1089
67	4	4	4	3	3	4	3	25	625	36	1296
68	4	3	4	4	3	4	4	26	676	37	1369
69	4	4	3	3	3	4	4	25	625	36	1296
70	4	4	3	4	4	2	3	24	576	35	1225
71	4	4	3	4	4	3	4	26	676	37	1369
72	4	4	4	4	3	4	4	27	729	38	1444
73	3	4	4	3	3	4	3	24	576	34	1156
74	4	3	3	4	3	4	3	24	576	34	1156
75	4	2	4	4	4	4	4	26	676	37	1369
76	4	3	3	4	4	3	4	25	625	36	1296
77	3	3	4	4	3	4	3	24	576	36	1296
78	3	4	3	4	4	1	3	22	484	34	1156
79	4	4	4	4	1	2	3	22	484	33	1089
80	3	2	3	3	3	3	3	20	400	28	784
81	4	4	3	4	4	4	4	27	729	37	1369
82	4	4	4	4	4	4	4	28	784	39	1521
83	3	3	3	4	4	4	4	25	625	36	1296
84	4	4	4	4	4	4	4	28	784	38	1444
85	3	4	4	4	4	4	4	27	729	39	1521
86	4	4	4	4	3	3	3	25	625	37	1369
87	4	4	4	3	3	2	2	22	484	34	1156
88	3	3	4	4	4	4	3	25	625	37	1369
89	4	3	4	4	4	3	4	26	676	36	1296
90	4	4	4	4	4	4	3	27	729	39	1521
91	4	4	4	4	3	2	2	23	529	35	1225
92	4	4	4	4	4	2	3	25	625	37	1369
93	4	4	4	4	4	3	4	27	729	38	1444
94	4	4	4	4	3	4	4	27	729	37	1369
95	4	4	3	4	4	3	3	25	625	37	1369
96	4	3	4	3	3	4	3	24	576	34	1156
97	4	4	3	3	4	3	2	23	529	34	1156
98	3	3	4	3	4	3	4	24	576	36	1296
99	3	2	3	4	2	2	3	19	361	31	961
100	4	4	4	3	3	2	3	23	529	33	1089
101	4	4	3	4	2	4	3	24	576	36	1296
102	3	3	4	2	3	2	3	20	400	30	900
103	4	4	3	2	2	3	4	22	484	31	961
104	4	3	4	3	3	4	3	24	576	36	1296
105	3	4	2	3	3	3	4	22	484	31	961
106	2	3	4	2	2	3	2	18	324	29	841
107	3	2	3	4	3	4	3	22	484	34	1156
108	3	3	3	2	2	3	3	19	361	28	784
	380	381	380	368	329	363	358	2559	61349	3723	129569

TABEL PENILAIAN RESPONDEN
VARIABEL PERANAN DINAS BINA MARGA KABUPATEN ACEH UTARA (Y)

Dimensi Pembangunan Dan pemeliharaan Jaringan Jalan (Y)

N/ITEM	1	2	3	4	5	Total Y	Y^2	$(X+Y)$	$(X+Y)^2$
1	4	3	4	3	3	17	289	46	2116
2	4	3	3	3	3	16	256	46	2116
3	3	2	3	4	3	15	225	45	2025
4	4	3	4	4	3	18	324	49	2401
5	4	4	4	4	4	20	400	58	3364
6	4	3	3	3	3	16	256	47	2209
7	3	3	3	3	3	15	225	47	2209
8	3	3	4	4	3	17	289	52	2704
9	3	4	4	4	3	18	324	52	2704
10	3	3	4	3	3	16	256	45	2025
11	3	3	3	3	3	15	225	47	2209
12	4	3	3	3	3	16	256	46	2116
13	3	3	4	3	3	16	256	47	2209
14	3	3	3	3	3	15	225	46	2116
15	3	3	3	3	3	15	225	44	1936
16	3	4	4	4	3	18	324	51	2601
17	4	3	4	4	3	18	324	52	2704
18	3	3	3	3	3	15	225	45	2025
19	3	3	3	3	3	15	225	44	1936
20	4	3	3	3	3	16	256	45	2025
21	3	4	4	3	3	17	289	48	2304
22	3	3	3	3	3	15	225	45	2025
23	4	3	4	3	3	17	289	49	2401
24	3	3	4	3	3	16	256	48	2304
25	3	3	3	3	3	15	225	48	2304
26	4	3	3	3	3	16	256	49	2401
27	3	3	3	3	3	15	225	45	2025
28	3	4	4	4	4	19	361	57	3249
29	4	3	4	4	3	18	324	55	3025
30	4	3	4	4	4	19	361	57	3249
31	4	4	4	4	4	20	400	59	3481
32	3	3	2	2	3	13	169	39	1521
33	4	4	4	3	4	19	361	56	3136
34	4	4	4	3	4	19	361	55	3025
35	4	3	4	4	3	18	324	55	3025
36	4	4	4	4	4	20	400	57	3249
37	3	3	3	3	3	15	225	43	1849
38	4	4	4	4	3	19	361	52	2704
39	4	4	4	4	3	19	361	54	2916
40	3	3	3	3	3	15	225	44	1936
41	4	4	4	4	4	20	400	55	3025
42	4	4	4	4	4	20	400	59	3481
43	4	4	4	4	4	20	400	57	3249
44	3	3	4	4	4	18	324	57	3249
45	4	3	4	4	4	19	361	58	3364
46	3	3	3	2	3	14	196	44	1936
47	4	4	4	4	4	20	400	59	3481
48	4	3	3	3	3	16	256	49	2401
49	4	4	4	3	4	19	361	55	3025
50	4	4	4	4	4	20	400	57	3249
51	4	4	4	4	4	20	400	57	3249
52	4	4	4	4	4	20	400	58	3364
53	3	3	4	4	3	17	289	50	2500
54	4	3	4	4	4	19	361	59	3481

N/ITEM	1	2	3	4	5	Total Y	Y ²	(X+Y)	(X+Y) ²
55	3	4	4	4	4	19	361	57	3249
56	3	3	4	4	3	17	289	54	2916
57	4	4	4	3	4	19	361	53	2809
58	4	4	4	4	4	20	400	56	3136
59	3	4	4	4	4	19	361	55	3025
60	4	4	4	4	4	20	400	58	3364
61	4	4	4	4	4	20	400	59	3481
62	4	4	4	4	4	20	400	58	3364
63	4	4	4	3	4	19	361	56	3136
64	4	3	4	4	4	19	361	57	3249
65	3	4	4	4	4	19	361	58	3364
66	3	4	4	3	3	17	289	50	2500
67	4	4	4	4	4	20	400	56	3136
68	3	4	4	4	4	19	361	56	3136
69	4	4	4	4	4	20	400	56	3136
70	4	4	4	4	3	19	361	54	2916
71	4	3	4	4	4	19	361	56	3136
72	4	4	4	4	4	20	400	58	3364
73	4	4	4	3	4	19	361	53	2809
74	4	4	4	3	4	19	361	53	2809
75	2	3	4	3	4	16	256	53	2809
76	4	3	4	4	4	19	361	55	3025
77	4	4	4	3	4	19	361	55	3025
78	2	4	4	4	3	17	289	51	2601
79	2	4	4	4	3	17	289	50	2500
80	3	3	3	2	3	14	196	42	1764
81	4	4	4	4	4	20	400	57	3249
82	4	3	4	4	4	19	361	58	3364
83	4	4	4	3	4	19	361	55	3025
84	4	4	3	4	4	19	361	57	3249
85	4	3	4	4	4	19	361	58	3364
86	4	4	4	4	4	20	400	57	3249
87	4	4	4	4	3	19	361	53	2809
88	4	3	4	3	4	18	324	55	3025
89	4	4	3	4	4	19	361	55	3025
90	3	4	4	4	4	19	361	58	3364
91	4	4	4	4	3	19	361	54	2916
92	3	4	4	4	3	18	324	55	3025
93	3	3	4	4	4	18	324	56	3136
94	3	4	3	4	4	18	324	55	3025
95	4	3	4	4	3	18	324	55	3025
96	4	4	4	3	4	19	361	53	2809
97	3	2	4	4	3	16	256	50	2500
98	3	3	4	3	3	16	256	52	2704
99	3	2	4	3	3	15	225	46	2116
100	4	3	4	4	3	18	324	51	2601
101	3	3	4	4	3	17	289	53	2809
102	3	3	4	3	3	16	256	46	2116
103	3	3	3	4	3	16	256	47	2209
104	4	3	4	4	3	18	324	54	2916
105	4	3	3	3	3	16	256	47	2209
106	3	3	4	3	3	16	256	45	2025
107	4	2	4	3	3	16	256	50	2500
108	2	3	4	3	3	15	225	43	1849
	382	370	405	383	374	1914	34280	5637	296905

PERHITUNGAN SKOR RESPONDEN
PERANAN DINAS BINA MARGA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK SEMUA ITEM PERNYATAAN PADA VARIABEL (X & Y)

No	Variabel/Dimensi	Skor			Persentase	Keterangan
		Nom	Jumlah	Total Jumlah		
1.	Pembangunan Dan Pelayanan Publik		1080	3723		
	1. Kemampuan Anggaran		324	1164	100	
	Sangat Setuju	4	297	828	71,13	
	Setuju	3	102	306	26,29	
	Kurang Setuju	2	15	30	2,58	
	Tidak Setuju	1	0	0	0	
	2. Sumber Daya Manusia (SDM)		756	2559	100	
	Sangat Setuju	4	375	1500	58,62	
	Setuju	3	301	903	35,29	
	Kurang Setuju	2	76	152	5,94	
	Tidak Setuju	1	4	4	0,16	
2.	Pemana Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara		540	1914		
	1. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jaringan Jalan		540	1914	100	
	Sangat Setuju	4	306	1224	63,95	
	Setuju	3	222	666	34,80	
	Kurang Setuju	2	12	24	1,25	
	Tidak Setuju	1	0	0	0,00	

Hasil Out Put SPSS Versi 20 For Widows

**REKAPITULASI PERHITUNGAN SKOR RESPONDEN
PERANAN DINAS BINA MARGA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN ACEH UTARA VARIABEL (X1 & X2)**

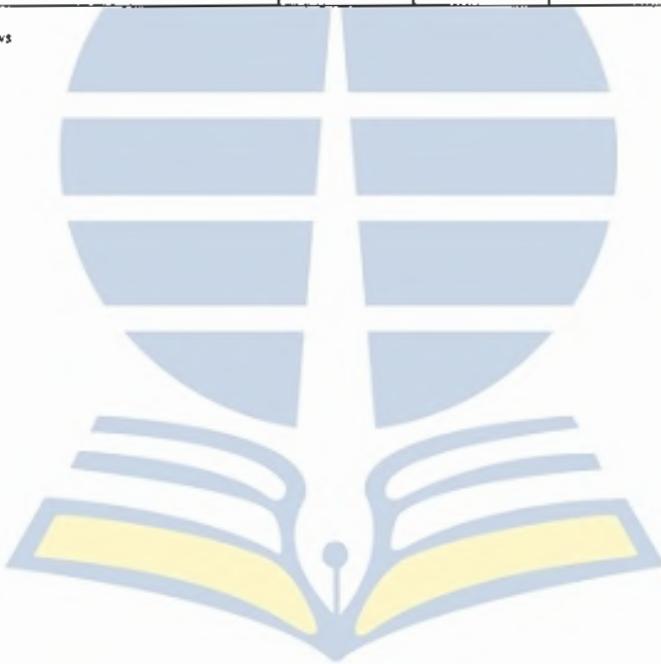
No	Variabel/Dimensi	Skor			Persentase	Keterangan
		Nilai	Jumlah	Total Jumlah		
1	Pembangunan Dan Pelayanan Publik (X)		1080	3723		
	1. Kemampuan Anggaran (X1)		324	1164	100	
	Sangat Setuju	4	207	828	71,13	
	Setuju	3	102	306	26,29	
	Kurang Setuju	2	15	30	2,58	
	Tidak Setuju	1	0	0	0	
	2. Sumber Daya Manusia (SDM) (X2)		756	2559	100	
	Sangat Setuju	4	375	1500	58,62	
	Setuju	3	301	903	35,29	
	Kurang Setuju	2	76	152	5,94	
	Tidak Setuju	1	4	4	0,16	
	Rekapitulasi X1 dan X2		1080	3723	100	
	Sangat Setuju	4	582	2328	62,53	
	Setuju	3	403	1209	32,47	
	Kurang Setuju	2	91	182	4,89	
	Tidak Setuju	1	4	4	0,11	

Hasil Out Put SPSS Versi 20 For Widows

**REKAPITULASI PERHITUNGAN SKOR RESPONDEEN
PERANAN DINAS BINA MARGA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN ACEH UTARA VARIABEL (Y)**

No	Variabel/Dimensi	Skor			Persentase	Keterangan
		Nilai	Jumlah	Total Jumlah		
2.	Peranan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara (Y)		540	1914		
1.	Pembangunan Dan Pemeliharaan Jaringan Jalan (Y1 s.d Y5)		540	1914	100	
	Sangat Setuju	4	306	1224	63,95	
	Setuju	3	222	666	34,80	
	Kurang Setuju	2	12	24	1,25	
	Tidak Setuju	1	0	0	0,00	

Hasil Out Put SPSS Versi 20 For Widows



**REKAPITULASI PERHITUNGAN SKOR RESPONDEN
PERANAN DINAS BINA MARGA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN ACEH UTARA VARIABEL (X & Y)**

No	Variabel/Dimensi	Skor			Persentase (%)	Keterangan
		Nihil	Jumlah	Total Jumlah		
1	Variabel (X dan Y)		1620	5637	100	
	Sangat Setuju	4	888	3552	63,01	
	Setuju	3	625	1875	33,26	
	Kurang Setuju	2	103	206	3,65	
	Tidak Setuju	1	4	4	0,07	

Hasil Out Put SPSS Versi 20 For Widows



Frequencies (Karakteristik)

Statistics

	Jenis Kelamin	Umur Responden	Pekerjaan	Kecamatan
N	Valid 108	108	108	108
	Missing 0	0	0	0
Mode	1,00	3,00	5,00	1,00 ^a
Std. Deviation	,34744	1,28586	1,57263	7,82519
Variance	,121	1,653	2,473	61,234

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	93	86,1	86,1	86,1
	15	13,9	13,9	100,0
Total		100,0	100,0	

Umur Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 30 tahun	19	17,6	17,6
	31 s/d 35 tahun	13	12,0	29,6
	36 s/d 40 tahun	39	36,1	65,7
	41 sd/ 45 tahun	20	18,5	84,3
	> 45 tahun	17	15,7	100,0
	Total	108	100,0	100,0

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Geuchik	11	10,2	10,2
	IRT	2	1,9	1,9
	Imum Mukim/Mukim	19	17,6	17,6
	Petani	11	10,2	10,2
	PNS	36	33,3	33,3
	Wiraswasta	29	26,9	26,9
Total		108	100,0	100,0

Kecamatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baktiya	4	3,7	3,7
	Baktiya Barat	4	3,7	7,4
	Banda Baro	4	3,7	11,1
	Cot Girek	4	3,7	14,8
	Dewantara	4	3,7	18,5
	Geureudong Pase	4	3,7	22,2
	Kuta Makmur	4	3,7	25,9
	Langkahan	4	3,7	29,6
	Lapang	4	3,7	33,3
	Lhoksukon	4	3,7	37,0
	Matangkuli	4	3,7	40,7
	Meurah Melia	4	3,7	44,4
	Muara Batu	4	3,7	48,1
	Nibong	4	3,7	51,8
	Nisarn	4	3,7	55,6
	Nisam Antara	4	3,7	59,3
	Paya Bakong	4	3,7	63,0
	Pirak Timu	4	3,7	66,7
	Samudra	4	3,7	70,4
	Sawang	4	3,7	74,1
	Seunuddon	4	3,7	77,8
	Simpang Keuramat	4	3,7	81,5
	Syamtalira Aron	4	3,7	85,2
	Syamtalira Bayu	4	3,7	88,9
	Tanah Jambu Aye	4	3,7	92,6
	Tanah Luas	4	3,7	96,3
	Tanah Pasir	4	3,7	100,0
Total		108	100,0	100,0

Correlations Untuk Validitas

Correlations untuk X1

		X11	X12	X13	Kemampuan Anggaran
X11	Pearson Correlation	1	,217*	,941**	,900**
	Sig. (2-tailed)		,024	,000	,000
	N	108	108	108	108
X12	Pearson Correlation	,217*	1	,152	,599**
	Sig. (2-tailed)	,024		,115	,000
	N	108	108	108	108
X13	Pearson Correlation	,941**	,152	1	,872**
	Sig. (2-tailed)	,000	,115		,000
	N	108	108	108	108
Kemampuan Anggaran	Pearson Correlation	,900**	,599**	,872**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	108	108	108	108

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations untuk X2

		X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	Sumber Daya Manusia
X21	Pearson Correlation	1	,407**	,171	,313**	,217*	,041	,053	,536**
	Sig. (2-tailed)		,000	,077	,001	,024	,674	,583	,000
	N	108	108	108	108	108	108	108	108
X22	Pearson Correlation	,407**	1	-,016	,041	,192*	-,058	,199*	,434**
	Sig. (2-tailed)	,000		,873	,673	,046	,551	,039	,000
	N	108	108	108	108	108	108	108	108
X23	Pearson Correlation	,171	-,016	1	,105	,250**	,141	,057	,411**
	Sig. (2-tailed)	,077	,873		,279	,009	,145	,561	,000
	N	108	108	108	108	108	108	108	108
X24	Pearson Correlation	,313**	,041	,105	1	,400**	,164	,121	,569**
	Sig. (2-tailed)	,001	,673	,279		,000	,090	,210	,000
	N	108	108	108	108	108	108	108	108
X25	Pearson Correlation	,217*	,192*	,250**	,400**	1	,246*	,419**	,755**
	Sig. (2-tailed)	,024	,046	,009	,000		,010	,000	,000
	N	108	108	108	108	108	108	108	108
X26	Pearson Correlation	,041	-,058	,141	,164	,246*	1	,321**	,503**
	Sig. (2-tailed)	,674	,551	,145	,090	,010		,001	,000
	N	108	108	108	108	108	108	108	108
X27	Pearson Correlation	,053	,199*	,057	,121	,419**	,321**	1	,596**
	Sig. (2-tailed)	,583	,039	,561	,210	,000	,001		,000
	N	108	108	108	108	108	108	108	108
Sumber Daya Manusia	Pearson Correlation	,536**	,434**	,411**	,569**	,755**	,503**	,596**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	108	108	108	108	108	108	108	108

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations untuk variabel Y

		Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Peranan Dinas Bina Marga
Y11	Pearson Correlation	1	,240*	,209*	,216*	,397**	,615**
	Sig. (2-tailed)		,013	,030	,024	,000	,000
	N	108	108	108	108	108	108
Y12	Pearson Correlation	,240*	1	,294**	,324**	,550**	,710**
	Sig. (2-tailed)	,013		,002	,001	,000	,000
	N	108	108	108	108	108	108
Y13	Pearson Correlation	,209*	,294**	1	,571**	,281**	,656**
	Sig. (2-tailed)	,030	,002		,000	,003	,000
	N	108	108	108	108	108	108
Y14	Pearson Correlation	,216*	,324**	,571**	1	,360**	,713**
	Sig. (2-tailed)	,024	,001	,000		,000	,000
	N	108	108	108	108	108	108
Y15	Pearson Correlation	,397**	,550**	,281**	,360**	1	,750**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,000		,000
	N	108	108	108	108	108	108
Peranan Dinas Bina Marga	Pearson Correlation	,615**	,710**	,656**	,713**	,750**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	108	108	108	108	108	108

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X11	7,1111	,791	,749	,892	,264
X12	7,3148	1,208	,187	,071	,969
X13	7,1296	,805	,676	,889	,356

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
10,7778	1,819	1,34882	3

Scale: Sumber Daya Manusia**Case Processing Summary**

	N	%
Valid	108	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	108	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,619	,606	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X21	3,5185	,58775	108
X22	3,5278	,60308	108
X23	3,5185	,55504	108
X24	3,4074	,67029	108
X25	3,0463	,83593	108
X26	3,3611	,68982	108
X27	3,3148	,70576	108

Reliability

Scale: Kemampuan Anggaran

Case Processing Summary

	N	%
Cases	Valid	108 100,0
	Excluded ^a	0 ,0
	Total	108 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,687	,700	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X11	3,6667	,54687	108
X12	3,4630	,60258	108
X13	3,6481	,56889	108

Inter-Item Correlation Matrix

	X11	X12	X13
X11	1,000	,217	,941
X12	,217	1,000	,152
X13	,941	,152	1,000

Inter-Item Covariance Matrix

	X11	X12	X13
X11	,299	,072	,293
X12	,072	,363	,052
X13	,293	,052	,324

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,593	3,463	3,667	,204	1,059	,013	3
Item Variances	,329	,299	,363	,064	1,214	,001	3

Inter-Item Correlation Matrix

	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27
X21	1,000	,407	,171	,313	,217	,041	,053
X22	,407	1,000	-,016	,041	,192	-,058	,199
X23	,171	-,016	1,000	,105	,250	,141	,057
X24	,313	,041	,105	1,000	,400	,164	,121
X25	,217	,192	,250	,400	1,000	,246	,419
X26	,041	-,058	,141	,164	,246	1,000	,321
X27	,053	,199	,057	,121	,419	,321	1,000

Inter-Item Covariance Matrix

	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27
X21	,345	,144	,056	,123	,107	,017	,022
X22	,144	,364	-,005	,017	,097	-,024	,085
X23	,056	-,005	,308	,039	,116	,054	,022
X24	,123	,017	,039	,449	,224	,076	,057
X25	,107	,097	,116	,224	,699	,142	,247
X26	,017	-,024	,054	,076	,142	,476	,156
X27	,022	,085	,022	,057	,247	,156	,498

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,385	3,046	3,528	,481	1,158	,029	7
Item Variances	,448	,308	,699	,391	2,268	,017	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X21	20,1759	5,399	,343	,281	,579
X22	20,1667	5,692	,218	,243	,615
X23	20,1759	5,810	,211	,101	,615
X24	20,2870	5,160	,352	,238	,574
X25	20,8481	4,118	,550	,353	,489
X26	20,3333	5,384	,263	,152	,804
X27	20,3796	5,004	,373	,261	,567

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
23,6944	6,681	2,58485	7

Scale: Peranan Dinas Bina Marga

Case Processing Summary

	N	%
Cases	Valid	108
	Excluded ^a	0
	Total	108
		100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,719	,724	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y11	3,5370	,57072	106
Y12	3,4259	,56707	108
Y13	3,5648	,44874	108
Y14	3,5463	,55340	108
Y15	3,4630	,50095	108

Inter-Item Correlation Matrix

	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
Y11	1,000	,240	,209	,216	,397
Y12	,240	1,000	,294	,324	,550
Y13	,209	,294	1,000	,571	,281
Y14	,216	,324	,571	1,000	,360
Y15	,397	,550	,281	,360	1,000

Inter-Item Covariance Matrix

	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
Y11	,326	,078	,054	,068	,114
Y12	,078	,322	,075	,102	,156
Y13	,054	,075	,201	,142	,063
Y14	,068	,102	,142	,306	,100
Y15	,114	,156	,063	,100	,251

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3,507	3,426	3,565	,139	1,041	,004	5
Item Variances	,281	,201	,326	,124	1,618	,003	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y11	14,0000	2,355	,357	,169	,722
Y12	14,1111	2,165	,492	,328	,666
Y13	13,9722	2,438	,476	,344	,675
Y14	13,9907	2,177	,504	,374	,660
Y15	14,0741	2,191	,584	,400	,630

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
17,5370	3,307	1,81852	5

Frequencies Untuk Penilaian Jawaban Responden

Frequencies (X1)

Statistics

	X11	X12	X13
N	Valid 108	108	108
	Missing 0	0	0
Mean	3,6667	3,4630	3,6481
Std. Deviation	,54687	,60258	,56889
Variance	,299	,363	,324

Frequency Table (X1)

X11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju 4	3,7	3,7	3,7
	Setuju 28	25,9	25,9	29,6
	Sangat setuju 76	70,4	70,4	100,0
	Total 108	100,0	100,0	

X12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju 6	5,6	5,6	5,6
	Setuju 46	42,6	42,6	48,1
	Sangat setuju 58	51,9	51,9	100,0
	Total 108	100,0	100,0	

X13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju 5	4,6	4,6	4,6
	Setuju 28	25,9	25,9	30,6
	Sangat setuju 75	69,4	69,4	100,0
	Total 108	100,0	100,0	

Frequencies (X1)

Frequencies (X2)

Statistics

	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27
N	Valid	108	108	108	108	108	108
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3,5185	3,5278	3,5185	3,4074	3,0463	3,3611
Std. Deviation		,58775	,60308	,55504	,67029	,83593	,68982
Variance		,345	,364	,308	,449	,699	,476
							,498

Frequency Table (X2)

X21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	5	4,6	4,6
	Setuju	42	38,9	38,9
	Sangat setuju	61	56,5	56,5
	Total	108	100,0	100,0

X22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	6	5,6	5,6
	Setuju	39	36,1	36,1
	Sangat setuju	63	58,3	58,3
	Total	108	100,0	100,0

X23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	3	2,8	2,8
	Setuju	46	42,6	42,6
	Sangat setuju	59	54,6	54,6
	Total	108	100,0	100,0

X24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	11	10,2	10,2
	Setuju	42	38,9	49,1
	Sangat setuju	55	50,9	100,0
	Total	108	100,0	100,0

X25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	2	1,9	1,9
	Kurang setuju	29	26,9	26,9
	Setuju	39	36,1	64,8
	Sangat setuju	38	35,2	100,0
	Total	108	100,0	100,0

X26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	1	,9	,9
	Kurang setuju	10	9,3	9,3
	Setuju	46	42,6	42,6
	Sangat setuju	51	47,2	47,2
	Total	108	100,0	100,0

X27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	1	,9	,9
	Kurang setuju	12	11,1	11,1
	Setuju	47	43,5	43,5
	Sangat setuju	48	44,4	44,4
	Total	108	100,0	100,0

Frequencies (Y)

Statistics

	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
N	Valid 108	108	108	108	108
	Missing 0	0	0	0	0
Mean	3,5370	3,4259	3,7500	3,5463	3,4630
Std. Deviation	,57072	,56707	,45601	,55340	,50095
Variance	,326	,322	,208	,306	,251

Frequency Table (Y)

Y11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju 4	3,7	3,7	3,7
	Setuju 42	38,9	38,9	42,6
	Sangat setuju 62	57,4	57,4	100,0
	Total 108	100,0	100,0	

Y12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju 4	3,7	3,7	3,7
	Setuju 54	50,0	50,0	53,7
	Sangat setuju 50	46,3	46,3	100,0
	Total 108	100,0	100,0	

Y13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju 1	,9	,9	,9
	Setuju 25	23,1	23,1	24,1
	Sangat setuju 82	75,9	75,9	100,0
	Total 108	100,0	100,0	

Y14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang setuju	3	2,8	2,8
	Setuju	43	39,8	42,6
	Sangat setuju	62	57,4	100,0
	Total	108	100,0	100,0

Y15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	58	53,7	53,7
	Sangat setuju	50	46,3	46,3
	Total	108	100,0	100,0



Uji Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KAX2, KAX1 ^b		. Enter

a. Dependent Variable: KAY1

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,852 ^a	,726	,721	,19213	1,820

a. Predictors: (Constant), KAX2, KAX1

b. Dependent Variable: KAY1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,278	2	5,139	139,209	,000 ^b
	Residual	3,876	105	,037		
	Total	14,154	107			

a. Dependent Variable: KAY1

b. Predictors: (Constant), KAX2, KAX1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,358	,191		1,878	,063				
	KAX1	,402	,046	,497	8,795	,000	,716	,651	,449	,817 1,22 4
	KAX2	,504	,056	,511	9,051	,000	,724	,662	,462	,817 1,22 4

a. Dependent Variable: KAY1

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	KAX1	KAX2
	1	2,986	1,000	,00	,00	,00
1	2	,008	18,924	,17	1,00	,20
	3	,006	22,606	,82	,00	,80

a. Dependent Variable: KAY1

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,6013	3,9810	3,5074	,30993	108
Std. Predicted Value	-2,924	1,528	,000	1,000	108
Standard Error of Predicted Value	,019	,068	,031	,008	108
Adjusted Predicted Value	2,6014	3,9877	3,5076	,31002	108
Residual	-,60310	,34082	,00000	,19033	108
Std. Residual	-3,139	1,774	,000	,991	108
Stud. Residual	-3,166	1,782	,000	1,003	108
Deleted Residual	-,61368	,34411	-,00016	,19519	108
Stud. Deleted Residual	-3,313	1,801	-,003	1,013	108
Mahal. Distance	,030	12,556	1,981	1,885	108
Cook's Distance	,000	,085	,009	,013	108
Centered Leverage Value	,000	,117	,019	,018	108

a. Dependent Variable: KAY1

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2563	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Tabel r untuk df = 101 - 150

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
101	0.1630	0.1937	0.2290	0.2528	0.3196
102	0.1622	0.1927	0.2279	0.2515	0.3181
103	0.1614	0.1918	0.2268	0.2504	0.3166
104	0.1606	0.1909	0.2257	0.2492	0.3152
105	0.1599	0.1900	0.2247	0.2480	0.3137
106	0.1591	0.1891	0.2236	0.2469	0.3123
107	0.1584	0.1882	0.2226	0.2458	0.3109
108	0.1576	0.1874	0.2216	0.2446	0.3095
109	0.1569	0.1865	0.2206	0.2436	0.3082
110	0.1562	0.1857	0.2196	0.2425	0.3068
111	0.1555	0.1848	0.2186	0.2414	0.3055
112	0.1548	0.1840	0.2177	0.2403	0.3042
113	0.1541	0.1832	0.2167	0.2393	0.3029
114	0.1535	0.1824	0.2158	0.2383	0.3016
115	0.1528	0.1816	0.2149	0.2373	0.3004
116	0.1522	0.1809	0.2139	0.2363	0.2991
117	0.1515	0.1801	0.2131	0.2353	0.2979
118	0.1509	0.1793	0.2122	0.2343	0.2967
119	0.1502	0.1786	0.2113	0.2333	0.2955
120	0.1496	0.1779	0.2104	0.2324	0.2943
121	0.1490	0.1771	0.2096	0.2315	0.2931
122	0.1484	0.1764	0.2087	0.2305	0.2920
123	0.1478	0.1757	0.2079	0.2296	0.2908
124	0.1472	0.1750	0.2071	0.2287	0.2897
125	0.1466	0.1743	0.2062	0.2278	0.2886
126	0.1460	0.1736	0.2054	0.2269	0.2875
127	0.1455	0.1729	0.2046	0.2260	0.2864
128	0.1449	0.1723	0.2039	0.2252	0.2853
129	0.1443	0.1716	0.2031	0.2243	0.2843
130	0.1438	0.1710	0.2023	0.2235	0.2832
131	0.1432	0.1703	0.2015	0.2226	0.2822
132	0.1427	0.1697	0.2008	0.2218	0.2811
133	0.1422	0.1690	0.2001	0.2210	0.2801
134	0.1416	0.1684	0.1993	0.2202	0.2791
135	0.1411	0.1678	0.1986	0.2194	0.2781
136	0.1406	0.1672	0.1979	0.2186	0.2771
137	0.1401	0.1666	0.1972	0.2178	0.2761
138	0.1396	0.1660	0.1965	0.2170	0.2752
139	0.1391	0.1654	0.1958	0.2163	0.2742
140	0.1386	0.1648	0.1951	0.2155	0.2733
141	0.1381	0.1642	0.1944	0.2148	0.2723
142	0.1376	0.1637	0.1937	0.2140	0.2714
143	0.1371	0.1631	0.1930	0.2133	0.2705
144	0.1367	0.1625	0.1924	0.2126	0.2696
145	0.1362	0.1620	0.1917	0.2118	0.2687
146	0.1357	0.1614	0.1911	0.2111	0.2678
147	0.1353	0.1609	0.1904	0.2104	0.2669
148	0.1348	0.1603	0.1898	0.2097	0.2660
149	0.1344	0.1598	0.1892	0.2090	0.2652
150	0.1339	0.1593	0.1886	0.2083	0.2643

Tabel r untuk df = 151 - 200

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
151	0.1335	0.1587	0.1879	0.2077	0.2635
152	0.1330	0.1582	0.1873	0.2070	0.2626
153	0.1326	0.1577	0.1867	0.2063	0.2618
154	0.1322	0.1572	0.1861	0.2057	0.2610
155	0.1318	0.1567	0.1855	0.2050	0.2602
156	0.1313	0.1562	0.1849	0.2044	0.2593
157	0.1309	0.1557	0.1844	0.2037	0.2585
158	0.1305	0.1552	0.1838	0.2031	0.2578
159	0.1301	0.1547	0.1832	0.2025	0.2570
160	0.1297	0.1543	0.1826	0.2019	0.2562
161	0.1293	0.1538	0.1821	0.2012	0.2554
162	0.1289	0.1533	0.1815	0.2006	0.2546
163	0.1285	0.1528	0.1810	0.2000	0.2539
164	0.1281	0.1524	0.1804	0.1994	0.2531
165	0.1277	0.1519	0.1799	0.1988	0.2524
166	0.1273	0.1515	0.1794	0.1982	0.2517
167	0.1270	0.1510	0.1788	0.1976	0.2509
168	0.1266	0.1506	0.1783	0.1971	0.2502
169	0.1262	0.1501	0.1778	0.1965	0.2495
170	0.1258	0.1497	0.1773	0.1959	0.2488
171	0.1255	0.1493	0.1768	0.1954	0.2481
172	0.1251	0.1488	0.1762	0.1948	0.2473
173	0.1247	0.1484	0.1757	0.1942	0.2467
174	0.1244	0.1480	0.1752	0.1937	0.2460
175	0.1240	0.1476	0.1747	0.1932	0.2453
176	0.1237	0.1471	0.1743	0.1926	0.2446
177	0.1233	0.1467	0.1738	0.1921	0.2439
178	0.1230	0.1463	0.1733	0.1915	0.2433
179	0.1226	0.1459	0.1728	0.1910	0.2426
180	0.1223	0.1455	0.1723	0.1905	0.2419
181	0.1220	0.1451	0.1719	0.1900	0.2413
182	0.1216	0.1447	0.1714	0.1895	0.2406
183	0.1213	0.1443	0.1709	0.1890	0.2400
184	0.1210	0.1439	0.1705	0.1884	0.2394
185	0.1207	0.1435	0.1700	0.1879	0.2387
186	0.1203	0.1432	0.1696	0.1874	0.2381
187	0.1200	0.1428	0.1691	0.1869	0.2375
188	0.1197	0.1424	0.1687	0.1865	0.2369
189	0.1194	0.1420	0.1682	0.1860	0.2363
190	0.1191	0.1417	0.1678	0.1855	0.2357
191	0.1188	0.1413	0.1674	0.1850	0.2351
192	0.1184	0.1409	0.1669	0.1845	0.2345
193	0.1181	0.1406	0.1665	0.1841	0.2339
194	0.1178	0.1402	0.1661	0.1836	0.2333
195	0.1175	0.1398	0.1657	0.1831	0.2327
196	0.1172	0.1395	0.1652	0.1827	0.2321
197	0.1169	0.1391	0.1648	0.1822	0.2315
198	0.1166	0.1388	0.1644	0.1818	0.2310
199	0.1164	0.1384	0.1640	0.1813	0.2304
200	0.1161	0.1381	0.1636	0.1809	0.2298

Nilai Korelasi Tabel R

N	Nilai N=100	101	102	103	104	105	106	107	108
S%	0,195	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
		0,0008	0,0016	0,0024	0,0032	0,0040	0,0048	0,0055	0,0063
	0,19421	0,19342	0,19263	0,19183	0,19104	0,19025	0,18946	0,18767	
1%	0,256	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
		0,0011	0,0022	0,0033	0,0043	0,0054	0,0065	0,0076	0,0087
	0,25492	0,25383	0,25275	0,25167	0,25058	0,24950	0,24842	0,24733	

Sumber : Junaidi,2010



Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07788	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88582	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74895	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.98795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85956	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26218	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81248	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97884	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73263
16	0.69013	1.33878	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68815
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73408	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08598	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51785	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81878	3.50499
23	0.68531	1.31948	1.71387	2.06868	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49218	2.79694	3.46878
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70582	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47288	2.77088	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40818
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68278	1.31042	1.69728	2.04227	2.45728	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30948	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69238	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30821	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33282
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70448	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>), 2010

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01869	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28807
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25769
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66178	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66026	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65866	3.22930
62	0.67847	1.29538	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22896
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66884	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99658	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64896	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67798	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99348	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29238	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichanago.wordpress.com>), 2010

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29198	1.66385	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98898	2.37212	2.63837	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37158	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63266	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29082	1.66123	1.98552	2.36687	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36481	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36348	2.62489	3.17208
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28918	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 – 160)

Pr df \	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
121	0.67852	1.28859	1.85754	1.97976	2.35758	2.61707	3.15895
122	0.67851	1.28853	1.85744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67849	1.28847	1.85734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67847	1.28842	1.85723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67846	1.28836	1.85714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67844	1.28831	1.85704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67843	1.28825	1.85694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67841	1.28820	1.85685	1.97867	2.35583	2.61476	3.15512
129	0.67840	1.28815	1.85675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15481
130	0.67838	1.28810	1.85666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67837	1.28805	1.85657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15381
132	0.67835	1.28800	1.85648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67834	1.28795	1.85639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67833	1.28790	1.85630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67831	1.28785	1.85622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67830	1.28781	1.85613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67828	1.28776	1.85605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67827	1.28772	1.85597	1.97730	2.35387	2.61193	3.15034
139	0.67826	1.28767	1.85589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67825	1.28763	1.85581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67823	1.28758	1.85573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67822	1.28754	1.85568	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67821	1.28750	1.85558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67820	1.28746	1.85550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67819	1.28742	1.85543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67817	1.28738	1.85536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67816	1.28734	1.85529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67815	1.28730	1.85521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67814	1.28726	1.85514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67813	1.28722	1.85508	1.97591	2.35148	2.60900	3.14545
151	0.67812	1.28718	1.85501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67811	1.28715	1.85494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67810	1.28711	1.85487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67809	1.28707	1.85481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67808	1.28704	1.85474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67807	1.28700	1.85468	1.97629	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67806	1.28697	1.85462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67805	1.28693	1.85455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67804	1.28690	1.85449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67803	1.28687	1.85443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 – 200)

Pr \ df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
161	0.67602	1.28883	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28880	1.65431	1.97472	2.34969	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28877	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28873	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28870	1.65414	1.97445	2.34918	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28867	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28864	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28861	1.65397	1.97418	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28858	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28855	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13888
171	0.67593	1.28852	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28849	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28846	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67580	1.28844	1.65368	1.97368	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67580	1.28841	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67588	1.28838	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28835	1.65351	1.97348	2.34780	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28833	1.65348	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28830	1.65341	1.97331	2.34738	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28827	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28825	1.65332	1.97318	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28822	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28819	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28817	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28814	1.65313	1.97287	2.34667	2.60287	3.13487
186	0.67581	1.28812	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28810	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28807	1.65300	1.97268	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28805	1.65298	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28802	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28800	1.65287	1.97248	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67578	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28588	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Tabel Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.78	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	8.59	8.39	8.26	8.18	8.09	8.04	8.00	5.98	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.78	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.98	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.48	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.88	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.98	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.88	2.85
11	4.84	3.98	3.58	3.38	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.28	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.98	2.85	2.78	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.66	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.98	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.68	2.58	2.51	2.48	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.48	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.38	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.98	2.78	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.18	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.06	2.08
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.58	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.80	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.18	2.13	2.09	2.08	2.04	2.01
31	4.18	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.87	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.86	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.08	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.85	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.84	2.49	2.37	2.29	2.22	2.18	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.83	2.48	2.38	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.83	2.47	2.38	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.82	2.48	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.81	2.48	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.81	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.80	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.08	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.11	2.08	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.08	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.08	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichanago.wordpress.com>). 2010

Tabel Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.96	1.94	1.91	1.89	1.88
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.88
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.88
55	4.02	3.18	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.98	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.38	2.24	2.16	2.09	2.03	1.96	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.38	2.24	2.15	2.06	2.03	1.96	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.96	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.96	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.06	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.36	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.98	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.98	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.98	1.92	1.86	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.98	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.86	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.86	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.86	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.08	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.06	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaldichanago.wordpress.com>). 2010

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.88	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.88	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.88	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.88	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.88	1.83	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.48	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.89	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.89	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.89	2.48	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.78
104	3.93	3.08	2.89	2.48	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.78
105	3.93	3.08	2.69	2.48	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.48	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.48	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.48	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.89	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.89	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.89	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.98	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.88	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.88	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.88	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.88	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.88	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.88	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.88	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.88	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.88	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.08	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.88	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.08	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.88	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.08	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.88	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichanago.wordpress.com>). 2010

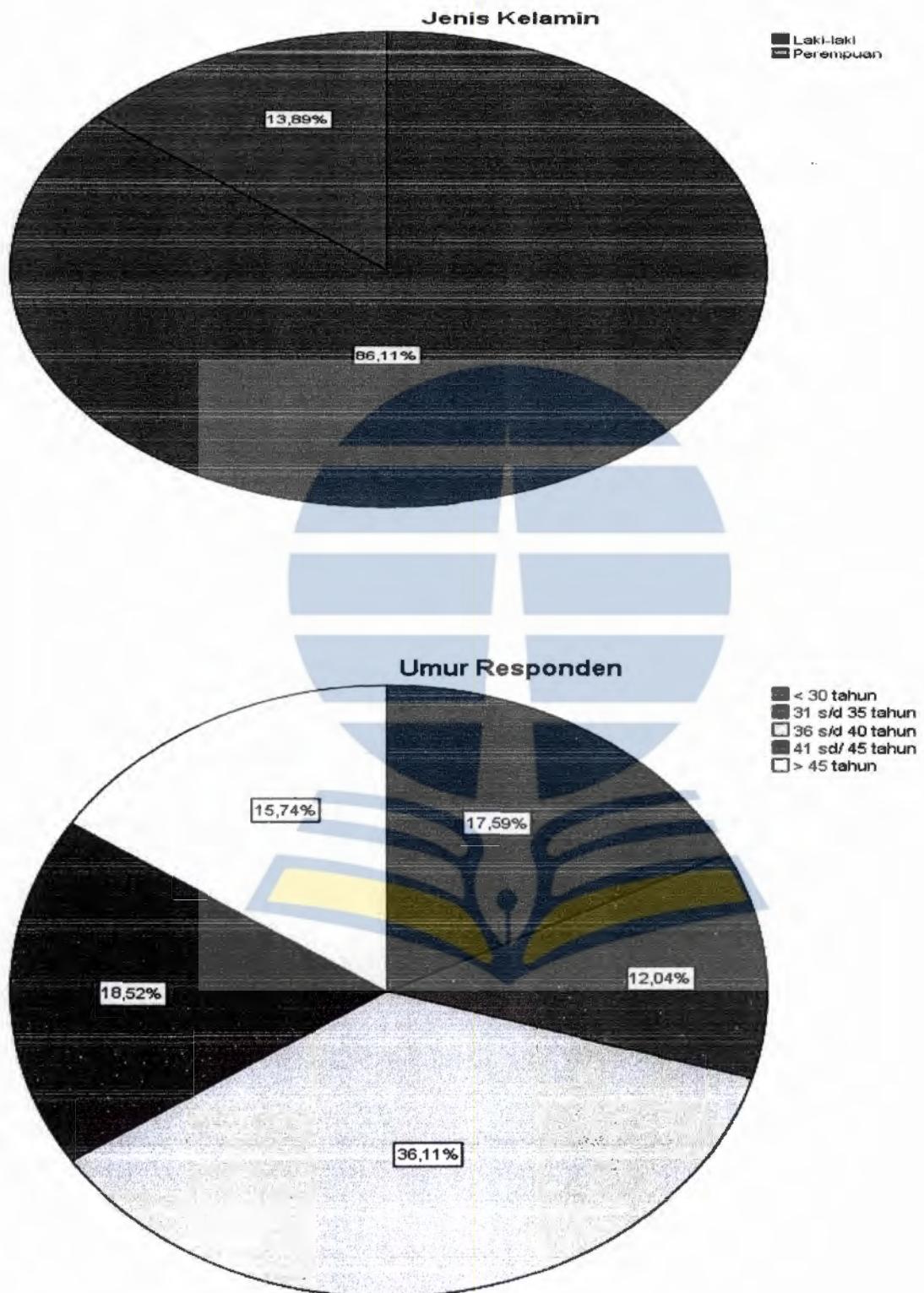
Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

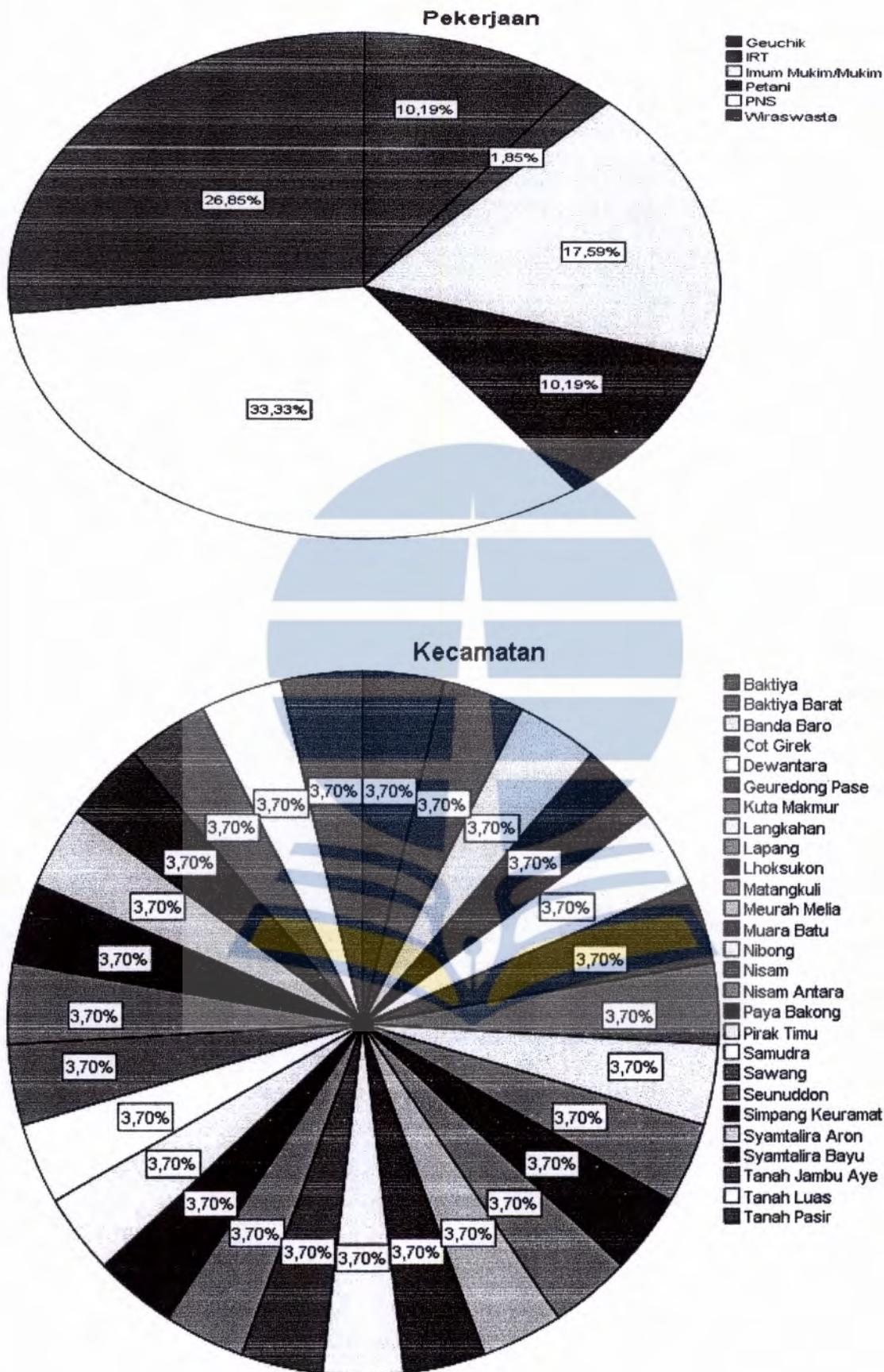
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.87	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.18	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.06	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.06	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.18	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.78	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.78	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>). 2010

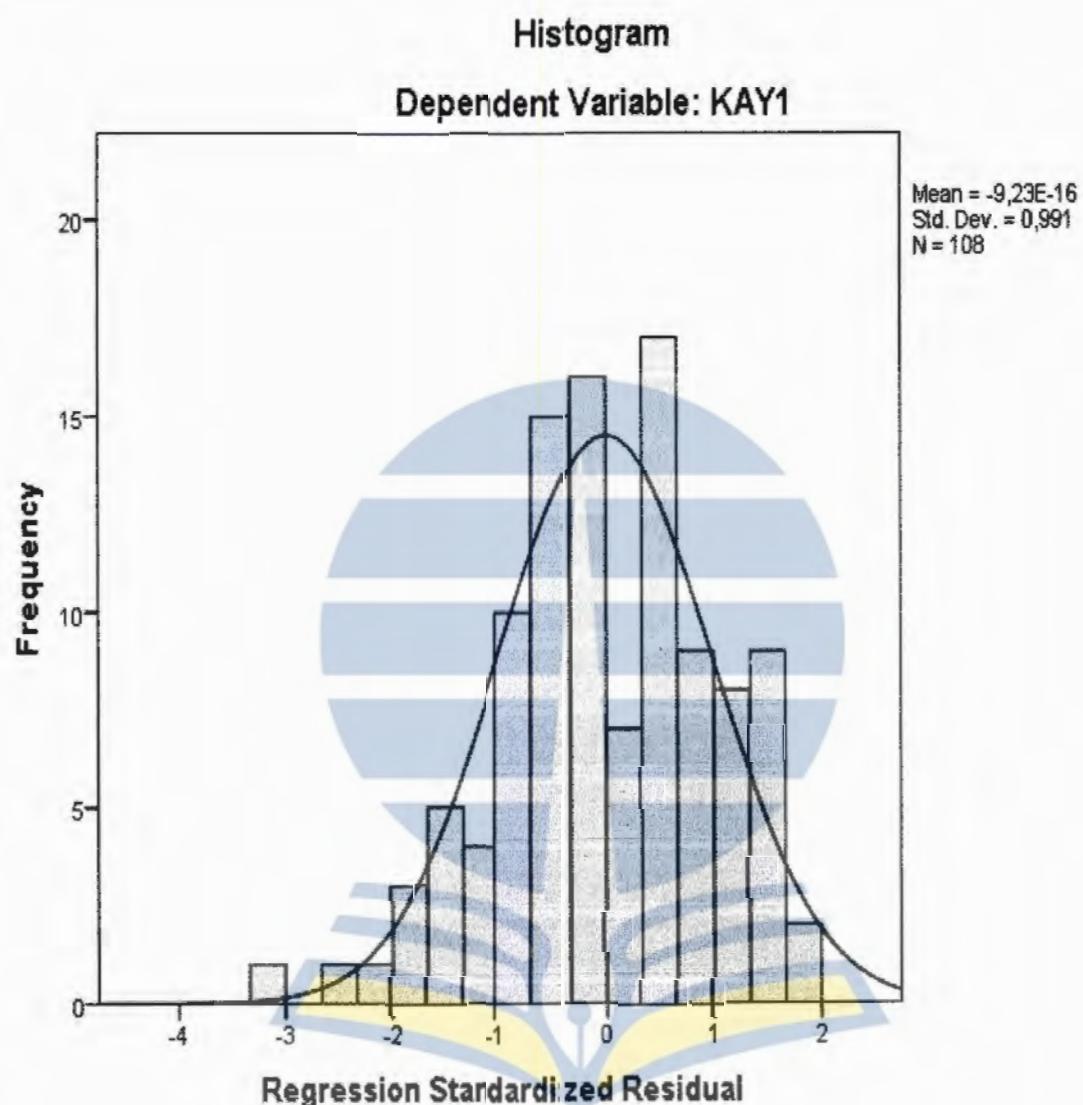
Titik Percentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

Pie Chart





Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**Dependent Variable: KAY1**